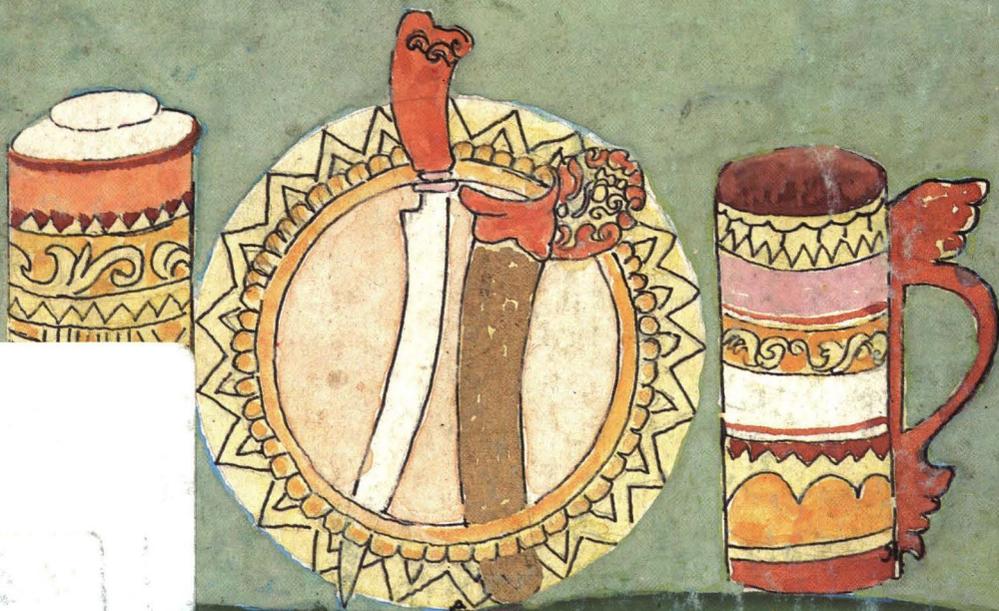




SEJARAH PENGARUH PELITA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN DAERAH SUMATERA BARAT



72

J

IS

1107/1994

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH PENGARUH PELITA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT PEDESAAN DAERAH SUMATERA BARAT

PERPUSTAKAAN DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL	
Nomor induk :	1107 / 94
Tanggal terima :	21 - 1 - 94
Tanggal catat :	21 - 1 - 94
Beli/hadiah dari :	Hadiah
Nomor buku :	307.720959 P13 Set
Kopi ke :	5

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN DAERAH
JAKARTA 1984

PERPUSTAKAAN
DIT. SEJARAH & NILAI TRADISIONAL

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Barat Tahun 1981/1982.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerjasama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli perorangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut diatas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari Drs. Marjani Martamin; Dr. Azinar Sayuti, MA; Drs. Yusrizal Saaduddin; Drs. Masri Zen; Drs. Nurli K; Irman J; Syaiful Indra; Masri; Mukhtarudin dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari Sutrisno Kutoyo; Drs. Mardanas Safwan.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Oktober 1984.

Pemimpin Proyek,



Drs. H. Ahmad Yunus

NIP. 130146112

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1981/1982 telah berhasil menyusun naskah Sejarah Pengaruh Pelita Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan Daerah Sumatera Barat.

Selesainya naskah ini disebabkan adanya kerjasama yang baik dari semua pihak di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi. Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan dan masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Oktober 1984.

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130 119 123.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	iii
KATA SAMBUTAN	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. RUMUSAN PERMASALAHAN	1
B. TUJUAN PENULISAN	2
C. RUANG LINGKUP	3
D. DEFINISI OPERASIONAL	3
E. PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN	4
1. Prosedur Penelitian	4
2. Metodologi	5
BAB II. KEADAAN DESA SEBELUM PELITA	
A. LINGKUNGAN ALAM DAN PENDUDUK	11
1. Desa Ujung Gading, Sungai Aur, dan Muara Kia- wai di Kabupaten Pasaman	11
2. Desa Tanjung Bonai, Balai Tengah dan Tapi Selo di Kabupaten Tanah Datar	18
3. Desa Koto Baru Simalanggang, Koto Tengah Si- malanggang dan Taeh Baruh di Kabupaten 50 Kota	24
B. PENDIDIKAN	29
1. Desa Ujung Gading, Sungai Aur dan Muara Kiawai di Kabupaten Pasaman	29
2. Desa Tanjung Bonai, Balai Tengah dan Tapi Selo di Kabupaten Tanah Datar	34
3. Desa Koto Baru Simalanggang, Koto Tengah Si- malanggang dan Taeh Baruh di Kabupaten 50 Kota	36
C. STRUKTUR PEMERINTAHAN	37
D. CARA PEMILIHAN PEMIMPIN PEMERINTAH DESA	42
	vii

E. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMIMPIN MASYARAKAT NON PEMERINTAH	45
F. ORGANISASI POLITIK DAN NON POLITIK	47
1. Desa Ujung Gading, Sungai Aur dan Muara Kia-wai di Kabupaten Pasaman	47
2. Desa Tanjung Bonai, Balai Tengah, dan Tapi Selo di Kabupaten Tanah Datar	48
3. Desa Koto Baru Simalanggang, Koto Tengah Simalanggang, dan Tanah Baruh di Kabupaten 50 Kota	49
G. PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN	50
1. Desa Ujung Gading, Sungai Aur dan Muara Kia-wai di Kabupaten Pasaman	50
2. Desa Tanjung Bonai, Balai Tengah dan Tapi Selo di Kabupaten Tanah Datar	51
3. Desa Koto Baru Simalanggang, Koto Tengah Simalanggang dan Taeh Baruh di Kabupaten 50 Kota	53
H. SOSIAL BUDAYA	54
1. Desa Ujung Gading, Sungai Aur dan Muara Kia-wai di Kabupaten Pasaman	54
2. Desa Koto Baru Simalanggang, Koto Tengah Simalanggang, dan Taeh Baruh di Kabupaten 50 Kota	56
3. Desa Balai Tengah, Tapi Selo, dan Tanjung Bonai di Kabupaten Tanah Datar	56

BAB III. PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

A. LANDASAN PELAKSANAAN	59
1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 015/GSB/1968 mengenai Peraturan tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dalam Daerah Propinsi Sumatera Barat	59
2. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat Nomor 155/GSB/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari di Wilayah Daerah Tingkat II Sumatera Barat	63

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa	66
B. PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DI BI- DANG PEMERINTAHAN DESA	70
C. HASIL YANG DIPEROLEH	72
1. Bidang Pemerintahan Desa	72
2. Bidang Pembangunan Lainnya	73
BAB IV. PENGARUH PELITA DI DAERAH DI BIDANG PE- MERINTAHAN DESA	
A. STRUKTUR PEMERINTAHAN	106
B. CARA PEMILIHAN APARAT PEMERINTAHAN DESA	108
C. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMIMPIN MA- SYARAKAT NON PEMERINTAH	110
D. ORGANISASI POLITIK DAN NON POLITIK	111
1. Organisasi Politik.	111
2. Organisasi Non Politik.	112
BAB V. KESIMPULAN	
A. RANGKUMAN ISI	114
B. POKOK-POKOK MASALAH	116
C. PENUTUP	119
LAMPIRAN	120
DAFTAR KEPUSTAKAAN	145

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
II.1. JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DI DESA UJUNG GADING, SUNGAI AUR, DAN MUARA KIAWAI PADA TAHUN 1965 DAN 1971	16
II.2. JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA KERJA DI DESA UJUNG GADING, SUNGAI AUR, DAN MUARA KIAWAI PADA TAHUN 1965	18
II.3. PENGGUNAAN TANAH DI NAGARI TEPI SELO, BALAI TANGAH, DAN TANJUNG BONAI SEBELUM PELITA	21
II.4. JARAK NAGARI-NAGARI TERHADAP IBUKOTA KECAMATAN, KABUPATEN, DAN PROPINSI (DALAM KM)	21
II.5. KEMIRINGAN NAGARI TEPI SELO, BALAI TANGAH, DAN TANJUNG BONAI	22
II.6. PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS SUMBER KEHIDUPAN DI DESA KOTO BARU SIMALANGGANG, KOTO TANGAH SIMALANGGANG, DAN TAEH BARUH KABUPATEN 50 KOTA PADA MASA SEBELUM PELITA	28
II.7. JUMLAH MURID MENURUT JENIS SEKOLAH PADA DESA UJUNG GADING, SUNGAI AUR, DAN MUARA KIAWAI DI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 1968 ...	31
II.8. NAMA JORONG PADA SETIAP NAGARI/DESA SASARAN PENELITIAN DI KABUPATEN PASAMAN, KABUPATEN TANAH DATAR, DAN KABUPATEN 50 KOTA MENURUT KEADAAN SEBELUM PELITA.	43
III.1. SASARAN YANG DICAPAI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PERTANIAN PADA DESA UJUNG GADING, SUNGAI AUR, DAN MUARA KIAWAI DALAM KECAMATAN LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN SELAMA SELAMA PELITA I S/D TAHUN KEDUA PELITA III ..	74
III.2. PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DI DESA SWAKARYA SUNGAI AUR KECAMATAN LEMBAH MELINTANG SEJAK PELITA I S/D II	76

III.3. PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DI DESA SWAKARYA SUNGAI AUR KECAMATAN LEMBAH MELINTANG SEJAK PELITA I S/D II	78
III.4. PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DI DESA SWADAYA MUARA KIAWAI KECAMATAN LEMBAH MELINTANG SEJAK PELITA I S/D PELITA II	79
III.5. INDIKATOR PENDIDIKAN DI DESA UJUNG GADING, SUNGAI AUR, DAN MUARA KIAWAI DI KABUPATEN PASAMAN MENURUT KEADAAN SEBELUM DAN SESUDAH PELITA	80
III.6. JUMLAH SEKOLAH, MURID, KELAS, RUANG BELAJAR, DAN GURU PADA SD, SLTP, DAN SLTA DI DESA UJUNG GADING, SUNGAI AUR, DAN MUARA KIAWAI KECAMATAN LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN TAHUN 1981	81
III.7. LUAS DESA, JUMLAH PENDUDUK, DAN PENDUDUK USIA 7 – 12 TAHUN MENURUT DESA DI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 1980.....	84
III.8. PENDUDUK MENURUT AGAMA PER NAGARI PADA NAGARI UJUNG GADING, SUNGAI AUR, DAN MUARA KIAWAI DI KABUPATEN PASAMAN.....	85
III.9. BANYAK BANGUNAN FISIK MENURUT JENIS PADA NAGARI UJUNG GADING, SUNGAI AUR, DAN MUARA KIAWAI DI KABUPATEN PASAMAN	85
III.10. DISTRIBUSI RUMAH PENDUDUK MENURUT JENIS BANGUNAN NAGARI	88
III.11. PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK NAGARI TEPI SELO, BALAI TANGAH, DAN TANJUNG BONAI TAHUN 1971 – 1980	90
III.12. LAJU PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DASAR NAGARI TEPI SELO, BALAI TANGAH, DAN TANJUNG BONAI TAHUN 1971–1980	90
III.13. PENYULUHAN KESEHATAN DI NAGARI TEPI SELO, BALAI TANGAH, DAN TANJUNG BONAI TAHUN 1975–1980.....	91
III.14. PKK DI NAGARI TEPI SELO, BALAI TANGAH, DAN TANJUNG BONAI TAHUN 1975–1980	92

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. RUMUSAN PERMASALAHAN

Sejak tahun 1969 pemerintah telah melaksanakan Pembangunan Lima Tahun (PELITA), yang dilaksanakan dengan sambung menyambung. Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) antara lain dinyatakan :

Agar pelaksanaan Pembangunan Nasional dapat berjalan dengan lancar dan benar-benar mengarah dalam mencapai tujuan Nasional, perlu ditentukan Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang pelaksanaannya telah dimulai sejak tahun 1969 dengan pelaksanaan Pembangunan Lima Tahun yang pertama dan kedua yang selanjutnya disusul dengan Pelita ketiga, Pelita keempat dan seterusnya, sehingga merupakan rangkaian Pelita yang saling sambung menyambung dalam suatu kesatuan yang serasi.¹⁾

Sampai saat ini telah dilaksanakan Pelita ketiga, dengan segala hasil yang telah dapat dirasakan manfaatnya. Telah banyak terjadi perubahan terhadap kehidupan masyarakat di daerah perkotaan, begitu juga di daerah pedesaan. Pengaruh ini tidak hanya dirasakan di daerah Indonesia lainnya, tetapi juga di Sumatera Barat.

Sebagian besar penduduk Indonesia diam di desa dan mata pencaharian utamanya adalah di bidang pertanian. Sumatera Barat, berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 1980, jumlah penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedesaan sekitar 86%.

Tidak sedikit kebutuhan hidup masyarakat Indonesia tergantung pada desa. Tetapi di lain pihak, mengingat laju transportasi yang membaik, maka desa pun tidak dapat pula menghindarkan diri dari pengaruh kota. Hal ini didorong pula oleh semakin majunya alat komunikasi seperti radio, televisi dan media massa lainnya.

1) Team pembinaan Penatar dan Bahan-bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Garis-garis Besar Haluan Negara*, Team Pembinaan Penatar dan Bahan-bahn Penataran Pegawai republik Indonesia, Jakarta, 1978, halaman 45.

2) *Ibid*, halaman 74 dan 75.

Sadar akan pentingnya kedudukan dalam rangka pembangunan negara, maka pemerintah selalu meningkatkan perhatiannya ke desa. Bantuan pembangunan desa pada setiap Pelita semakin meningkat. Dalam rangka pembangunan pedesaan ini dalam GBHN dikemukakan antara lain sebagai berikut :

Perhatian sebesar-besarnya perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana yang langsung maupun yang tidak langsung diperuntukan bagi pembangunan pedesaan seperti INPRES bantuan desa dan lain-lain.²⁾

Sehubungan dengan uraian di atas maka perlu pengaruh Pelita di daerah terhadap kehidupan masyarakat pedesaan ini dikumpulkan bahan dan sejarahnya. Rumusan permasalahannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelita telah dilaksanakan dalam dua tahap yang dewasa ini sedang memasuki tahap ketiga, perlu diteliti dan dicatat pengaruh yang telah ditimbulkannya.
2. Makin diperlukan pengetahuan sejarah untuk menyempurnakan langkah pembangunan yang akan datang.
3. Perkembangan pemerintahan desa sejak dilaksanakannya Pelita oleh Pemerintah, perlu diteliti untuk menyempurnakan pemerintahan desa dan lebih mendaya gunakan pemerintahan tersebut.
4. Mengenai topik yang akan diteliti dan ditulis, termasuk ke dalam "sejarah kontemporer."

B. TUJUAN PENULISAN

1. Tujuan Penulisan Sejarah Pengaruh Pelita Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan ialah agar Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (Ditsenitra) dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai data dan informasi tentang adanya pengaruh Pelita di dalam Kehidupan Masyarakat Pedesaan. Di harapkan dengan data ini pengambilan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah akan lebih disempurnakan.

2. Tujuan lainnya ialah untuk membuat suatu naskah khusus sebagai langkah awal untuk penulisan sejarah pelaksanaan Pelita oleh pemerintah. Naskah ini diharapkan pula akan dapat memberikan sumbangan kepada mereka yang menaruh minat terhadap usaha penulisan sejarah "kontemporer" Indonesia.
3. Penulisan ini dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan kesejarahhan yang diharapkan berguna untuk penulisan sejarah nasional, di kemudian hari.

C. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup menyangkut dua pokok yaitu :

- Ruang lingkup geografis
- Ruang lingkup permasalahan.

Ruang lingkup geografis meliputi Propinsi Sumatera Barat, yang tidak dapat dijangkau seluruhnya. Oleh karena itu, penelitian hanya dilakukan pada sembilan desa atau nagari di Propinsi ini. Kesembilan desa tersebut berada pada tiga daerah Kabupaten setiap Kabupaten dipilih tiga nagari.

Ruang lingkup permasalahan digarap sesuai dengan topik penelitian, yaitu Sejarah Pengaruh Pelita di Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan. Pengaruh dimaksudkan di sini ditekankan pada masalah yang menyangkut pemerintahan desa.

D. DEFINISI OLEH OPERASIONAL

Untuk beroleh pegangan yang sama dari istilah-istilah yang banyak digunakan dalam laporan penelitian ini, di bawah ini akan dikemukakan pengertian umum dari beberapa istilah desa adalah sebagai berikut :

1. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

2. Desa Swasembada adalah desa yang berkembang dari desa Swakarya dan desa Swakarya berkembang dari desa Swadaya.
3. Pemerintah desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

E. PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN

1. Prosedur Penelitian

Dengan mempedomani Pola Penelitian Kerangka Laporan dan Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Sejarah Pengaruh Pelita di Daerah Terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan yang disusun oleh Proyek IDKD Pusat, maka dilakukan penyusunan Rancangan Penelitian yang dijadikan pegangan selanjutnya untuk pengumpulan data di lapangan, analisis data, dan bahan penulisan laporan akhir. Dalam rancangan penelitian juga digariskan jadwal kegiatan, menetapkan anggota peneliti dan memperkirakan rencana anggaran untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sebelum turun ke lapangan diadakan studi kepustakaan untuk menunjang bahan yang diperlukan dan menjajaki variabel yang akan diteliti di lapangan untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dan melihat perubahan serta interaksi antar variabel yang akan diselidiki sesuai dengan keadaan lingkungan alam, penduduk, sosial budaya, dan aspek yang berhubungan dengan pemerintahan desa, yang akan dijadikan sasaran penelitian.

Sebelum turun ke lapangan diberitahu secara resmi kepada Kantor Gubernur Sumatera Barat tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada daerah tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengumpulkan data atau informasi dipergunakan teknik observasi, teknik wawancara dan pengisian angket oleh para informan kunci. Disamping itu juga dikumpulkan data atau informasi yang relevan pada Kantor dan Instansi Pemerintah atau Swasta yang ditemui di lapangan. Instrumen penelitian yang dipergunakan dilampirkan pada bahagian belakang laporan ini.

- 3) **Presiden Republik Indonesia**, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa*, CV Pencuran Tujuh, Jakarta, 1980, **halaman 2.**

Data atau informasi yang dikumpulkan diolah sedemikian rupa dan dialais untuk dijadikan bahan dalam penulisan laporan penelitian. Laporan ditulis oleh suatu tim khusus yang sudah dibentuk sebelumnya. Tim penulis, disamping berkonsultasi antara sesama tim, juga dengan resource person yang telah dipilih sebelumnya.

2. Metodologi

a. Jenis datanya yang dikumpulkan.

Sesuai dengan sasaran penelitian, maka jenis data yang dikumpulkan dibagi dalam beberapa kelompok yaitu :

- Keadaan lingkungan alam dan penduduk.
- Keadaan sosial budaya.
- Keadaan dan perkembangan pendidikan.
- Pemerintahan desa.
- Keadaan organisasi politik dan non politik.
- Keadaan perekonomian masyarakat.
- Landasan pelaksanaan dan hasil yang diperoleh.

b. Penentuan Daerah Penelitian.

Desa yang akan diteliti, yaitu sembilan desa atau nagari yang terletak pada tiga Kabupaten di Sumatera Barat.

Ditinjau dari sudut kelancaran komunikasi dan transportasi yang erat kaitannya dengan Pelita maka nagari di Sumatera Barat pada umumnya dapat dibagi menjadi :

- 1). Nagari yang kurang lancar hubungan transportasi dan komunikasi karena jalan yang ada sering rusak serta belum semua jalan mempunyai jembitan. Hubungan jalan yang melalui sungai terpaksa menggunakan "pelayangan" atau alat penyeberangan lainnya.

Kelancaran hubungan di daerah ini tidak tepat, karena jalan sering rusak atau ditimpa serangan banjir. Biasanya keadaan ini ditemui di daerah pinggiran Sumatera Barat seperti Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Pasaman

- 2). Nagari yang terletak di daerah yang lancar hubungan transportasi dan komunikasinya. Biasanya nagari tersebut terletak di daerah pinggiran ibukota Kabupaten atau Kotamadya. Kelancaran transportasi dan komunikasi tidak saja ke Ibukota Kabupaten bersangkutan, tetapi juga ke ibukota Propinsi dan bahkan ke Propinsi lainnya yang berdekatan. Ibukota Kabupaten dan Kotamadya itu adalah Bukittinggi, Lubuksikaping, Payakumbuh, Solok, Pariaman, Painan, Batusangkar, Muaro Sijunjung, Padang, Padang Panjang dan Sawahlunto.
- 3). Nagari yang terletak di daerah yang sedang kelancaran hubungan transportasi dan komunikasi. Nagari ini biasanya terletak cukup jauh dari ibukota Kabupaten/Kotamadya, tetapi keadaan jalan cukup baik dan pada umumnya jembatan sudah ada dan tidak ada rintangan banjir. Nagari seperti ini tersebar di Sumatera Barat.

Nagari yang dipilih adalah sebagai berikut :

No.	Kabupaten	Kecamatan	N a g a r i	Kategori
1.	Lima puluh Kota	Payakumbuh	1. Kota baru Simalanggang 2. Koto Tengah Simalanggang. 3. Taeh Baruh.	Transportasi dan komunikasi lancar.
2.	Tanah Datar	Lintau Buo	1. Balai Tengah 2. Tepi Selo 3. Tanjung Bonai	Transportasi dan komunikasi sedang
3.	Pasaman	Lembah Melintang	1. Ujung Gading 2. Sungai Aur 3. Muara Kiawi	Transportasi dan komunikasi kurang lancar.

Untuk mendapat gambaran yang luas dari daerah penelitian dalam peta I pada halaman yang berikut dapat dilihat secara terperinci.

c. Responden atau Informan Kunci

Karena data yang dikumpulkan menyangkut pengaruh Pelita di daerah, maka yang menjadi responden dalam adalah Pimpinan Pemerintahan (camat dan Kepala Nagari), kepala Instansi/Dinas yang ada di daerah seperti Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum, Kakandep P dan K beserta para Penilik, Juru Penerangan (Jupen), Dinas Perikanan, Kantor Urusan Agama, Instansi Pendidikan Agama Kecamatan dan unsur Pimpinan Kantor Bupati.

Karena pengaruh Pelita berkaitan dengan sosial budaya masyarakat, maka para responden juga dipilih dari tokoh masyarakat yang menguasai masalah yang diteliti. Responden ini dinamakan informan kunci yang terdiri dari Ninik Mamak, Cerdik Pandai, dan Alim Ulama yang dalam masyarakat Sumatera Barat disebut "*Tali Tigo Sapilin, Tungku Tigo Sajarangan*", artinya tiga serangkai. Dalam melaksanakan sesuatu kegiatan di daerah setempat kelancarannya akan lebih terjamin jika ketiga unsur itu telah sepakat dan diikuti sertakan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan program.

d. Pengolahan dan Analisa Data.

Data yang telah dikumpulkan, diolah dalam kelompok dan cross tabulasi tertentu dan dianalisis dengan mempergunakan teknik statistik deskriptif sehingga muah untuk ditafsirkan dan disimpulkan baik yang berhubungan dengan perubahan variabel, kait berkaitan variabel, dan perkiraan yang mungkin terjadi dari variabel itu.

Data yang telah diolah dibandingkan dengan hasil observasi langsung serta dibandingkan pula dengan informasi lisan yang diterima dari para responden atau informan kunci. Dengan demikian penafsiran dan kesimpulan yang ditemui di lapangan akan lebih mantap diungkapkan.

Untuk memudahkan penyajian laporan sebahagian dari data dilaporkan dalam bentuk tabel, juga dicantumkan foto dokumentasi yang relevan. Diharapkan teknik penyajian laporan ini akan lebih membantu untuk memahami semua penemuan yang diperoleh di lapangan.

e. Sistematika Laporan atau Kerangka Penulisan.

Untuk memudahkan pengambilan kesimpulan dan memperoleh gambaran dari hasil penelitian naskah ini disusun dengan kerangka sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Rumusan Permasalahan
- B. Tujuan Penelitian
- C. Ruang Lingkup Penelitian
- D. Definisi Operasional
- E. Pertanggung Jawaban Penulisan.

BAB II KEADAAN DESA SEBELUM PELITA

- A. Keadaan Lingkungan Alam dan Penduduk
- B. Keadaan Pendidikan.
 - 1. Pemerintah
 - 2. Swasta
- C. Struktur Pemerintahan
- D. Cara Pemilihan Pemimpin Pemerintahan Desa
- E. Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat Non Pemerintah.
- F. Keadaan Organisasi Politik dan Non Politik.
- G. Keadaan Perekonomian Masyarakat Pedesaan
- H. Keadaan Sosial Budaya.

BAB III. PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

- A. Landasan Pelaksanaan
- B. Pelaksanaan Pelita di Daerah di Bidang Pemerintahan Desa
- C. Hasil yang diperoleh.

BAB IV. PENGARUH PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA.

- A. Struktur Pemerintahan.
- B. Cara Pemilihan Aparat Pemerintahan Desa
- C. Kedudukan dan Peranan Pemimpin Masyarakat Non Pemerintah.
- D. Keadaan Organisasi Politik dan Non Politik.

BAB V. KESIMPULAN

- A. Rangkuman Isi
- B. Kesimpulan
- C. Penutup

Sistematika penulisan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Proyek Inventarisasi Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan hasil konsultasi tim peneliti di daerah.

f. Hambatan Yang Ditemui.

Jarak antara daerah penelitian dengan tempat tinggal Tim peneliti yaitu kota Padang adalah jauh. Waktu Tim Peneliti turun ke lapangan maka kegiatan pengumpulan data terpaksa dilakukan berulang kali.

Data mengenai keadaan desa sebelum Pelita yaitu antara tahun 1950 – 1968 sulit diperoleh sumbernya baik tertulis apalagi dengan wawancara.

Sulit menemui informan kunci karena pada waktu anggota Tim berkunjung ke lapangan informan yang bersangkutan tidak berada di tempat, sibuk dengan pekerjaan sehari-hari dan kegiatan lain di lingkungan keluarga dan masyarakat. Untuk menunggu lebih lama di lapangan Tim Peneliti selain kesulitan dana, juga hambatan lainnya, sehingga naskah ini terlambat penyelesaiannya.

BAB II

KEADAAN DESA SEBELUM PELITA

A. LINGKUNGAN ALAM DAN PENDUDUK

1. Desa Ujung Gading, Sungai Aur, dan Muara Kiawai di Kabupaten Pasaman.

a. Keadaan Lingkungan Alam.

Secara Astronomis Desa Nagari Ujung Gading, Sungai Aur, dan Muara Kiawai di Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman terletak antara $0^{\circ}20'U - 0^{\circ}11'S$ dan $83^{\circ} - 100^{\circ}22'BT$. Ketiga desa ini terletak di bagian barat Kabupaten Pasaman atau sebagian barat Pulau Sumatera. Tinggi daerah dari permukaan laut antara 26 meter – 30 meter.

Ditinjau dari sudut topografi, ketiga daerah ini terdiri dari pantai dan bergunung atau berbukit atau daerah yang bertopografi kasar. Daerah pegunungan atau dataran tinggi ada sekitar 40% dan 60% lagi terdiri dari dataran rendah. Khusus Nagari Sungai Aur dan Muara Kiawai daerah pegunungan dan dataran tinggi sekitar 75%, sedangkan dataran rendah pantai hanya sebanyak 25%.

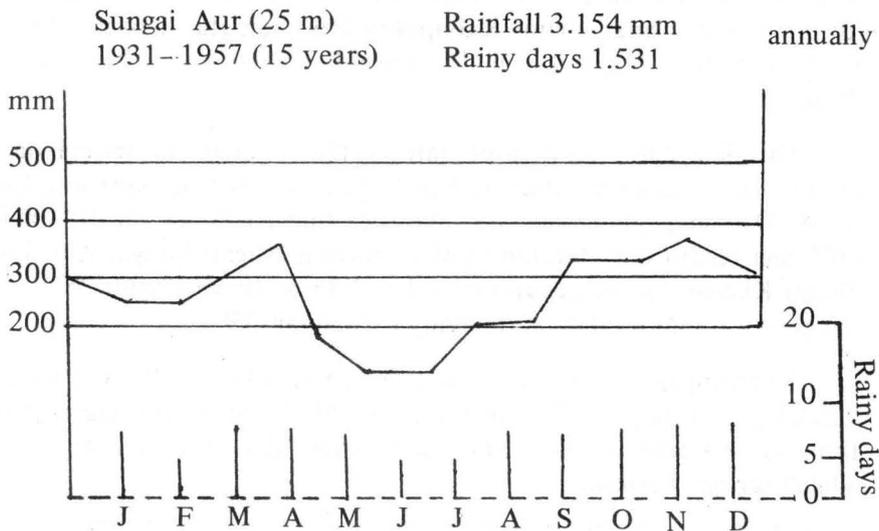
Kemiringan rata-rata dari ketiga nagari sekitar 14° sedangkan kemiringan tertinggi 25° dan terendah 3° . Jarak ketiga nagari dari Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten, dan Ibukota Propinsi adalah sebagai berikut :

Desa/Nagari	Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten	Ibukota Propinsi
Ujung Gading	0 km	153 km	321 km
Sungai Aur	9 km	144 km	312 km
Muara Kiawai	29 km	124 km	292 km

Di daerah ini terdapat gunung-gunung, yang tertinggi adalah gunung Melintang. Di sekitar Gunung Melintang daerahnya landai dan makin lama makin menurun dari puncak gunung ke rawa dan pantai. Kaki Gunung Melintang dipotong oleh lembah yang berlereng curam

dari gunung berapi. Endapan *colluvial fluvio* – vulkanis merupakan penyusunan utama dari daerah ini. Hanya kaki sebelah Barat dan Barat Daya mengandung endapan aluvial yang bukan berasal dari batuan vulkanik.

Rata-rata temperatur harian berkisar antara $27^{\circ} - 28^{\circ}$ C. Rata-rata curah hujan tahunan antara 3.000 – 4.000 mm dan rata-rata lama hujan per tahun adalah 150 hari. Biasanya curah hujan meningkat dengan makin tingginya tempat. Dari bulan Mei sampai Agustus curah hujan lebih sedikit dibandingkan dengan bulan lainnya. Dalam grafik di bawah ini digambarkan curah hujan di Sungai Aur berdasarkan penelitian selama 15 tahun.



CURAH HUJAN DI SUNGAI AUR 4

Gunung dan sungai yang terdapat di ketiga desa tersebut adalah :

Nama Gunung	Tinggi (m)	Lokasi
1. Gunung Melintang	1.382	Ujung Gading, Sungai Aur, dan Muara Kiawai
2. Gunung Salisit	450	Sungai Aur
3. Gunung Perkubuan	350	Sungai Aur
4. Gunung/Bukit Sipagu	200	Ujung Gading

Nama Sungai	Panjang (m)	Lokasi
1. Batang Sikabau	50	Kecamatan Lembah Melintang dan Kecamatan Sungai Baremas
2. Batang Sikilang	52	Sungai Aur
3. Batang Air Haji	27	Sungai Aur
4. Batang Kontang	23	Sungai Aur
5. Batang Tinggiran	15	Sungai Aur
6. Batang Air Talang	—	Ujung Gading
7. Sungai Bayang	—	Ujung Gading
8. Batang Kiawai	—	Muara Kiawai

Luas ketiga nagari tersebut adalah sebagai berikut :

Nama Desa/Nagari	Luas (km ²)
— Ujung Gading	333,18
— Sungai Aur	635,95
— Muara Kiawai	200,00

Keadaan tanah di sekitar Gunung Melintang dijumpai jenis hutan sekunder yang lebih menonjol dibandingkan dengan daerah lainnya. Pada bagian Barat terdapat padang alang-alang dan semak belukar yang luas, biasanya para peladang menggunakan tanah sering berpindah-pindah tempat. Jenis tanah latosol yang berasal dari bahan vulkanis lebih menonjol di sekitar gunung Melintang. Kesuburan tanah adalah sedang sampai rendah karena derajat asam yang relatif tinggi dari batuan vulkanis. Di samping hutan sekunder, hutan primer menutupi sebagian besar daerah ini. Aliran air adalah sedang dan sebagian ada yang cepat, umumnya drainage adalah baik.

4. Agricultural Development Project (ADP), *Rencana Pembangunan untuk Pasaman Barat/Sumatera*, Dep. Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Jakarta, 1975, halaman 37.

Pada umumnya tanah di ketiga desa ini berwarna kuning dan hitam, sifat tanah berpori-pori lebar yang mudah basah dan kering. Tanah terdiri dari pasir dan tanah liat, dan pada umumnya tingkat kesuburan tanah baik. Sesuai dengan iklim tropis maka tanam-tanaman yang tumbuh di daerah ini adalah tanaman perdagangan.

Jenis penggunaan tanah sebelum Pelita adalah sebagai berikut :

Jenis pegunungan	Ujung Gading (ha)	Sungai Aur (ha)	Muara Kiawai (ha)
– Hutan	± 12.000	± 30.438	± 9.201,0
– Tanah sawah	± 1.200	± 1.100	± 2.534,0
– Pertanian tanah kering	± 300	± 1.250	± 1.195,6
– Perkebunan	± 35	–	–
– Perkebunan, pekarangan/perumahan, jalan, rawa, sungai, dan tanah kering lainnya.	± 19.783	± 30.807	± 7.069,4

Karena jenis tanah, iklim, dan letak daerah ini hampir sama, maka pada umumnya jenis tahaman serta tumbuhan yang hidup di daerah ini adalah juga sama. Di samping padi jenis tanaman yang terdapat di daerah ini adalah :

1. Tanaman Keras

Kelapa, cengkeh, kulit manis (Cassiavera), karet, pala, kopi, gambir, dan nilam.

2. Palawija

Kacang tanah, jagung, kacang hijau, kacang kedele, ketela pohon, dan ubi rambat.

3. Sayur-sayuran.

Terung, ketimun, bayam, kacang panjang, lobak/kol, kangkung, petai dan lombok /cabe.

4. Buah-buahan.

Pisang, pepaya, mangga, jeruk manis, rambutan, jambu, durian, salak, lansek, dan manggis.

Sebagai daerah yang mempunyai hutan cukup luas maka selain kayu juga dihasilkan rotan, damar, dan manau. Jenis kayu untuk bahan bangunan di antaranya banio, rasak, maranti, surian, kayu kapur, bayur, dan sulung-sulung.

Sesuai dengan ekologi dan iklim daerah ini maka jenis hewan cukup banyak ragamnya, baik binatang peliharaan maupun binatang liar. Jenis binatang yang hidup di kawasan ini hampir sama di ketiga nagari seperti :

1. Binatan Peliharaan.

Kerbau, sapi, kambing, ayam, itik, biri-biri, kuda dan angsa.

2. Binatang Liar

Harimau, rusa, kera, kijang, pelanduk, babi hutan, siamang dan tupai.

Selain dari binatang ini juga ditemui anjing, kucing, cipan, dan berbagai jenis burung. Burung yang bagus bulunya adalah burung kaua dan burung muo, sedangkan yang merdu suaranya adalah burung balam, burung pungguk, ketitiran, dan burung puyuh.

Bahan galian yang terdapat di daerah ini adalah belerang yang ditemui di Desa Sungai Aur, sedangkan emas kemungkinan didapat di Desa Ujung Gading dan Sungai Aur. Semua bahan galian tersebut belum pernah diolah, kecuali tanah liat yang sudah mulai diolah untuk dijadikan batu bata sejak akhir tahun 1979.

Di daerah ini juga ditemui beberapa obyek wisata, seperti di Sampuran Betung, Sampuran Talang, dan Pantai Sikilang. Yang belum diolah adalah keindahan alam di Puncak Gunung Bendera nagari Sungai Aur.

Obyek wisata di Nagari Ujung Gading dan Muara Kiawai Proyek Permandian di Desa Ujung Gading yang baru berfungsi pada tahun 1980. Tempat rekreasi yang merupakan keindahan alam yang potensial di nagari Ujung Gading terletak di Si Janggar Langit, Rabu Julu, dan Danau Karuh yang luasnya 150 x 150 m.

b. **Penduduk.**

Sejak tahun 1965 sampai dengan 1969 rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun berbeda di antara ketiga nagari. Nagari Ujung Gading adalah yang terpadat penduduknya sedangkan Nagari Muara Kiawai berpenduduk jarang walaupun Nagari Sungai Aur sedikit lebih padat dari Muara Kiawai.

Pada tahun 1965 penduduk ketiga nagari yang sukar hubungan transportasi dan komunikasi adalah sebagai berikut :

Tabel II. 1 JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DI DESA UJUNG GADING, SUNGAI AUR, DAN MUARA KIAWAI PADA TAHUN 1965.

No.	Desa/Nagari	Penduduk Tahun 1965		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Ujung Gading	5.064	5.246	10.310
2.	Sungai Aur	5.286	5.267	10.553
3.	Muara Kiawai	1.212	1.314	2.526

Pertambahan penduduk dari tahun 1965 sampai dengan 1971 jauh lebih tinggi di Ujung Gading dibandingkan dengan kedua nagari lainnya. Di Ujung Gading rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun dalam periode tersebut adalah 4,31%, sedangkan di Sungai Aur hanya 1,53% , dan di Muara Kiawai 2,99% per tahun.

Jumlah penduduk laki-laki di Muara Kiawai jauh lebih sedikit dibandingkan dengan penduduk perempuan (47,97% berbanding 52,3%). Di Ujung Gading dan Sungai Aur jumlah penduduk menurut jenis kelamin ini perbandingannya hampir seimbang. Jumlah rata-rata anggota keluarga dari penduduk ketiga nagari ini adalah antara 4-5 orang. Pada tahun 1965 tercatat jumlah kepala keluarga di Ujung Gading adalah 2.291 KK, di Sungai Aur sebanyak 2.212 KK, dan Muara Kiawai hanya sebanyak 562 KK. Pada tahun 1965 rata-rata kepadatan penduduk di Ujung Gading adalah sekitar 31 jiwa/km², di Sungai Aur 17 jiwa/km², dan di Muara Kiawai hanya 13 jiwa/km².

Memperhatikan kepadatan penduduk ketiga nagari ini dan dibandingkan dengan sumber alam yang ada jelaslah bahwa daerah ini kekurangan tenaga kerja. Dengan penambahan penduduk yang cukup berarti dan dibarengi dengan meningkatkan ketrampilan anggota masyarakat faktor alam yang potensial akan lebih dapat dimanfaatkan untuk masyarakat setempat dan daerah lainnya.

Komposisi penduduk menurut mata pencaharian di tiga nagari yang bertopografi dan keadaan alam yang hampir sama ini tidak banyak berbeda. Pada umumnya masyarakat berusaha dalam lapangan pertanian (95%) sedangkan yang lainnya berusaha di bidang perdagangan (1,5%), bangunan, pengangkutan dan jasa lainnya sekitar (1,5%) dan sisanya berusaha dalam berbagai kegiatan seperti : kerajinan, buruh, pegawai, dan lain-lain.

Masyarakat daerah ini dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari masih mempergunakan perlengkapan dan cara-cara berusaha bersifat tradisional. Alat-alat dan cara modern belum banyak dipergunakan. Penyebaran penduduk pada ketiga nagari ini pada masa sebelum Pelita belum merata seperti sekarang ini.

Pada umumnya penduduk tinggal di tepi jalan raya dan sungai serta daerah pantai seperti Sungai Aur. Daerah pertanian ada kalanya terdapat jauh dari tempat tinggal sebagian penduduk. Tidak jarang penduduk meninggalkan kampung untuk beberapa lama dan menetap di ladang pada waktu musim panen atau kegiatan untuk mengolah tanah dan memelihara tanaman yang sedang tumbuh.

Perbandingan penduduk usia kerja dengan jumlah penduduk yang belum usia kerja adalah hampir sama besar yaitu sekitar 50%. Penduduk usia kerja berusia antara 15 – 65 tahun, sedangkan yang belum berusia kerja adalah antara 0 – 14 tahun. Diperkirakan jumlah penduduk menurut golongan umur berdasarkan usia kerja pada tiga desa dalam tahun 1965 adalah seperti di bawah ini.

Tabel II. 2. JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA KERJA DI NAGARI UJUNG GADING, SUNGAI AUR, DAN MUARA KIAWAI PADA TAHUN 1965.

Kelompok Umur	Ujung Gading	Sungai Aur	Muara Kiawai
0 – 14 tahun	4.940 (47,91%)	4.875 (46,20%)	1.158 (45,85%)
15 – 65 tahun	5.061 (49,09%)	5.361 (50,80%)	1.292 (51,15%)
65 tahun	309 (3%)	317 (3%)	76 (3%)

Jumlah penduduk umur Sekolah Dasar (7 – 12 tahun) pada tahun 1975 adalah sebanyak 1.721 orang (16,69%) di Ujung Gading dan sebanyak 1.811 orang (17,16%) Sungai Aur, sedangkan di Muara Kiawai berjumlah 433 orang (17,14 %).

Dihubungkan dengan jumlah murid Sekolah Dasar yang berumur antara 7 – 12 tahun ternyata Net Enroulmen Ratio (NER) di ketiga desa ini masih rendah yaitu berkisar antara 36% – 51%. Di Ujung Gading angka NER ini 42,88% dan di Sungai Aur 50,64%, sedangkan di Muara Kiawai masih rendah yaitu 36,95%. Pada tahun 1965 penduduk umur sekolah baik di tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan menengah cukup banyak.

2. Desa Tanjung Bonai, Balai Tangah, dan Tapi Selo di Kabupaten Tanah Datar.

a. Keadaan Alam.

Nagari Tanjung Bonai mempunyai luas 79 km², Tapi Selo 27,1 km², dan nagari Balai Tangah hanya 6 km². Balai Tangah terletak di tengah antara nagari yang termasuk Lintau (lihat peta).

Batas Nagari Balai Tangah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan Nagari Batu Bulat dan Tanjung Bonai, sebelah selatan dengan Nagari Tepi Selo, sebelah barat dengan Nagari Batu Bulat dan Tepi Selo, dan sebelah timur dengan Nagari Bonai dan Lubuk Jantan.

Batas Nagari Tepi Selo adalah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Batu Bulat dan Balai Tangah, sebelah selatan dengan Nagari Lubuk Jantan dan Pangian, sebelah barat dengan Nagari Tanjung Barulak dan sebelah timur dengan Lubuk Jantan.

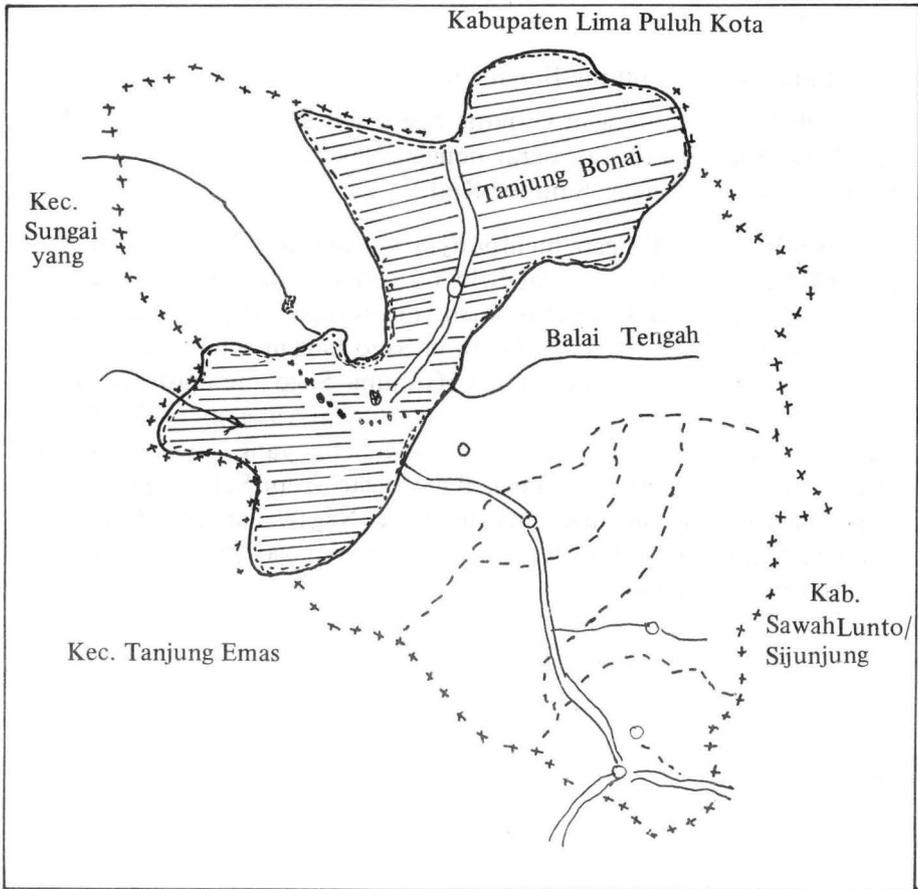
Batas Nagari Tanjung Bonai adalah sebagai berikut :

Sebelah utara dengan Gunung Sago, sebelah selatan dengan Nagari Balai Tangah, sebelah barat dengan Nagari Batu Bulat, dan sebelah timur dengan Nagari Sumpur Kudus.

Nagari Balai Tangah mempunyai ketinggian 650 meter di atas permukaan laut, Nagari Tepi Selo 625 meter, dan Nagari Tanjung Bonai 700 meter di atas permukaan laut. Ketiga nagari ini terletak di lereng Gunung Sago, puncak Gunung Sago bagian selatan dan timur terletak di Nagari Tanjung Bonai. Gunung Sago mempunyai tinggi 2.406 meter di atas permukaan laut. Sungai yang mengalir dalam wilayah nagari-nagari ini, adalah Batang Selo, yang melalui Nagari Balai Tangah (sepanjang 3 km), dan Nagari Tepi Selo (sepanjang 5 km), serta Batang Sinamar yang meliwati Nagari Tanjung Bonai (sepanjang 5 km). Penggunaan tanah di nagari-nagari ini dapat dilihat dalam Tabel 3 berikut.

PETA KECAMATAN LINTAU BUO

Sekala : 1 : 100.000



KETERANGAN :

—— Jalan Propinsi

—— Jalan Kabupaten

+++ Batas Kabupaten/Kecamatan

--- Batas Nagari

Wilayah Kenagarian Sampel

Tabel II. 3. PENGGUNAAN TANAH DI NAGARI TEPI SELO, BALAI TANGAH, DAN TANJUNG BONAI SEBELUM PELITA 5.

Jenis Penggunaan/ Nagari	Tepi Selo (dalam ha)	Balai Tengah (dalam ha)	Tanjung Bonai (dalam ha)
1. Hutan	1.453	118	3.050,50
2. Tanah gundul	13.375	10	641.75
3. Tanah sawah	420	195	1.487,30
4. Pertanian sawah kering	280	150	0
5. Perkebunan rakyat	197	50	1.383,88
6. Perkebunan besar	—	—	—
7. Pekarangan	202,8	94,75	1.190.75
8. Kolam Ikan	42,2	25	25
9. Jalan-jalan dan pasar dan lain-lain	0,25	5,25	154

Tabel II. 4. JARAK NAGARI DARI IBUKOTA KECAMATAN, KABUPATEN, DAN PROPINSI (DALAM KM)

Ibukota/Nagari	Tepi Solo	Balai Tengah	Tanjung Bonai
Kecamatan	6	7	9
Kabupaten	28	27	29
Propinsi	130	129	131

5. Kantor Kepala Nagari, Tepi Selo, Balai Tengah dan Tanjung Bonai.

Nagari-nagari ini terdiri dari daerah pegunungan dan dataran tinggi. Tepi Selo memiliki daerah pegunungan seluas 1.108 km², Balai Tangah 0 km², dan Tanjung Bonai mempunyai daerah pegunungan seluas 22,5 km², Tepi Selo memiliki dataran tinggi seluas 16,02 km², Balai Tangah seluas 6 km², dan Tanjung Bonai seluas 68,2 km².

Tabel II. 5. KEMIRINGAN NAGARI TEPI SELO, BALAI TANGAH, DAN TANJUNG BONAI

Kemiringan/Nagari	Tepi Selo	Balai Tangah	Tanjung Bonai
Rata-rata	35 ^o	25 ^o	40 ^o
Tertinggi	60 ^o	50 ^o	60 ^o
Terendah	0 ^o	0 ^o	20 ^o

Keadaan tanah di nagari-nagari ini adalah podsolik merah kuning. Bahan galian yang tersedia adalah : tanah liat dan batu kapur di Tepi Selo, mar-mar (batu pualam) di Balai Tangah dan tanah liat di Tanjung Bonai.

Iklim di tiga nagari ini sama yaitu : temperatur 22,7^o C, curah hujan 2.500 mm dan rata-rata lama hujan 120 hari per tahun.

b. Penduduk.

Diperkirakan jumlah penduduk pada ketiga desa tersebut pada tahun 1961 dan 1968 adalah sebagai berikut :

Nama Nagari	1961	1963
1. Tepi Selo	4.124	4.691
2. Balai Tangah	2.316	2.372
3. Tanjung Bonai	6.272	7.354

Pertambahan penduduk di ketiga nagari bervariasi. Rata-rata tingkat perkembangan penduduk per tahun sejak tahun 1971 sampai dengan 1980 diperkirakan sebagai berikut :

1. Tepi Selo 1,86%
2. Balai Tengah 0,34%
3. Tanjung Bonai 2,30%

Dalam periode yang sama rata-rata tingkat perkembangan penduduk per tahun di Kabupaten Tanah Datar adalah 1,02%

Masyarakat Kecamatan Lintau Buo di mana ketiga nagari ini terletak, penduduknya suka merantau tidak saja ke daerah dalam Propinsi Sumatera Barat tetapi juga menyebar ke Propinsi lain terutama Riau, Sumatera Utara dan Pulau Jawa. Berat dugaan rendahnya tingkat perkembangan penduduk di Desa Balai Tengah dipengaruhi oleh aspek merantau. Rata-rata kepadatan penduduk juga bervariasi antara desa yang satu dengan desa lainnya. Kepadatan penduduk Desa Tepi Selo adalah 152 jiwa per km², Desa Balai Tengah 386 jiwa per km², dan Desa Tanjung Bonai adalah 79 jiwa per km².

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin di ketiga desa ini menunjukkan perempuan lebih banyak dari laki-laki. Gambaran lengkap pada ketiga nagari itu pada tahun 1961 adalah sebagai berikut :

Nagari/Desa	Laki-laki	Perempuan
1. Tepi Selo	1.989 (48,22%)	2.135 (51,78%)
2. Balai Tengah	1.104 (47,66%)	1.212 (52,34%)
3. Tanjung Bonai	3.078 (49,08%)	3.194 (50,92%)

Jika penduduk usia kerja berumur antara 15 – 65 tahun dapat disimpulkan bahwa antara jumlah penduduk usia kerja dengan penduduk yang masih di bawah umur dan sudah tua persentasenya tidak begitu berbeda kecuali di Desa Tanjung Bonai. Perincian jumlah penduduk menurut kelompok umur adalah sebagai berikut :

Luas ketiga nagari adalah sebagai berikut :

1. Koto Baru Simalanggang 6,15 km²
2. Koto Tengah Simalanggang 3,90 km²
3. Taeh Baruh 9,50 km²

Jarak nagari dari Ibukota Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi adalah :

Nama Nagari	Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten	Ibukota Propinsi
1. Koto Baru Simalanggang	0 km	6 km	131 km
2. Koto Tengah Simalanggang	4 km	6 km	131 km
3. Taeh Baruh	7 km	9 km	134 km

Jenis tanah yang banyak dijumpai di ketiga nagari adalah podsolik merah kuning dan tanah latosol. Jenis tanaman yang tumbuh di daerah tersebut antara lain adalah padi, ubi-ubian, kelapa, buah-buahan, jagung, dan palawija lainnya.

Rata-rata temperatur tiap hari di daerah ini berkisar antara 22^o – 26^o C. Rata-rata curah hujan tahunan antara 2.000 mm – 2.500mm. Lama hujan per tahun rata-rata 160 hari. Pada bulan Oktober, Nopember, Desember, dan Januari ternyata curah hujan dan hari hujan lebih besar dan banyak dibanding dengan bulan lainnya sehingga bulan tersebut merupakan bulan penghujan hampir sepanjang tahun. Karena usim penghujan sering terjadi banjir pada daerah aliran sungai terutama Sungai atau Batang Limpasi di Nagari Koto Baru Simalanggang. Sungai lainnya yang terdapat di daerah ini adalah Batang Namang dan Pilola yang masing-masing panjangnya 3 km.

Di Koto Tengah Simalanggang ditemui Sungai Batang Sinamar dan Batang Namang yang panjang alirannya masing-masing 2 km. Di Taeh Baruh hanya terdapat satu buah sungai yaitu Batang Sinamar yang mengalir sepanjang 5,5 km.

Penggunaan tanah di daerah ini pada masa sebelum Pelita tidak diperoleh keterangan yang pasti. Pada tahun 1966 menurut Kantor Perwakilan Departemen Pertanian Propinsi Sumatera Barat luas sawah pada tiga nagari ini adalah sebagai berikut :

1. Koto Baru Simalanggang 304 ha
2. Koto Tengah Simalanggang 138 ha
3. Taeh Baruh 442 ha

Penggunaan tanah yang lain adalah untuk pertanian tanah kering, perkebunan pekarangan, perumahan, jalan dan sungai. Di Koto Tengah Simalanggang terdapat tanah gundul sekitar 25 ha, hutan lebat tidak ditemui di daerah ini, hanya terdapat hutan belukar yang tidak begitu luas.

Pengairan pada masa sebelum Pelita tidak memadai, sawah sebagian besar sumber airnya berasal dari tadah hujan. Di daerah yang dekat dengan aliran sungai pengairan banyak menggunakan "Kincir Air" yaitu mengalirkan air sungai ke sawah atau ladang dengan mempergunakan kincir.

Jenis binatang yang hidup di daerah ini pada umumnya tidak berbeda dengan nagari lainnya di Sumatera Barat, binatang liar juga ada hidup di hutan. Jenis binatang yang banyak ditemui adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, ayam dan itik, yang dipelihara oleh masyarakat. Binatang liar yang banyak terdapat adalah babi hutan, ular, tupai, tikus dan kera atau beruk yang umumnya dipelihara masyarakat untuk memetik buah kelapa.

Selain dari binatang tersebut ditemui lagi beberapa jenis binatang lainnya yaitu kucing, anjing, dan berbagai jenis burung seperti burung balam, burung ketitiran, dan burung hantu. Di daerah ini juga hidup dan dipelihara berbagai jenis ikan air tawar seperti ikan gurami, ikan tawas, ikan mujair dan lain-lain. Juga ditemu "belut" yang hidup di paya-paya yang merupakan salah satu jenis ikan yang berasal dari daerah ini.

Bahan galian yang banyak terdapat adalah pasir dan kerikil, di samping itu juga terdapat tanah liat. Bahan galian ini banyak digunakan sebagai bahan bangunan baik perumahan rakyat maupun bangunan pemerintah atau masyarakat.

Jalan yang sudah ada sejak zaman penjajahan, sekarang masih ada tetapi keadaannya sangat menyedihkan walaupun alam daerah ini datar, jalan yang ada sukar dilalui oleh kendaraan bermotor, karena belum diperbaiki.

b Penduduk.

Pada tahun 1965 jumlah penduduk menurut jenis kelamin pada setiap nagari adalah sebagai berikut :

Nama Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1. Koto Baru Simalanggang	1.280 (48,99%)	1.322 (51,01%)	2.612 (100%)
2. Koto Tengah Simalanggang	790 (50,05%)	789 (49,95%)	1.579 (100%)
3. Taeh Baruh	2.072 (48,73%)	2.179 (51,27%)	4.251 (100%)

Pertambahan penduduk tiap tahun di ketiga nagari ini berbeda satu sama lain. Di Koto Baru Simalanggang pertambahan penduduk tiap tahun sekitar 3,48%, di Koto Tengah Simalanggang lebih kurang 2,69%, sedangkan di Taeh Baruh hanya sekitar 1,51% tiap tahun. Di Kabupaten 50 Kota rata-rata pertambahan penduduk tiap tahun adalah 2,16% dan di Kecamatan Payakumbuh pertambahan penduduk diperkirakan sekitar 2,46%.

Berdasarkan angka pertambahan penduduk diperkirakan pada tahun 1968 jumlah penduduk di Koto Baru Simalanggang berjumlah 2.894 jiwa, di Koto Tengah Simalanggang ± 1.710 jiwa, dan di Taeh Baruh sekitar 4.446 jiwa.

Jumlah penduduk angkatan kerja yang berumur 15–65 tahun di Koto Baru Simalanggang dan Taeh Baruh lebih besar jumlahnya dari mereka yang belum berumur kerja dan yang telah tua (0 – 14 tahun dan 65 tahun), sedangkan di Koto Tengah Simalanggang jumlah penduduk menurut angkatan kerja ini sama banyaknya. Distribusi jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat seperti di bawah ini.

Kelompok Umur	Koto Baru Simalanggang	Koto Tengah Simalanggang	Taeh Baruh
0-14 tahun	41,38% (1.198)	47,35% (810)	42,56% (1.892)
15-65 tahun	55,62% (1.609)	49,65% (849)	54,44% (2.421)
65 tahun	3,00% (87)	3,00% (51)	3,00% (133)

Jumlah penduduk menurut kelompok umur Sekolah Dasar yaitu 7 - 12 tahun pada tahun 1968 di Desa Koto baru Simalanggang diperkirakan berjumlah 512 orang atau 17,70%, di Desa Koto Tengah Simalanggang berjumlah 315 orang atau 18,43%, dan di Desa Taeh Baruh diperkirakan sebanyak 810 orang atau 18,21%.

Di Desa Koto Baru Simalanggang dan Taeh Baruh jenis mata pencaharian yang banyak adalah pertanian. Sedangkan di Desa Koto Tengah Simalanggang jenis sumber kehidupan masyarakat bermacam-macam yaitu di samping bertani juga usah industri, kerajinan dan anyam-anyaman.

Tabel II. 6. PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK MANURUT JENIS SUMBER KEHIDUPAN DI KOTO BARU SIMALANGGANG, KOTO TANGAH SIMALANGGANG, DAN TAEH BARUH KABUPATEN 50 KOTA PADA MASA SEBELUM PELITA

Sumber kehidupan Nagari	Taeh Baruh	Kota Baru Simalanggang	Kota Tengah Simalanggang
1. Tani	90,0%	60,0%	90,0%
2. Pegawai	5,5%	4,0%	2,0%
3. Dagang	3,7%	2,0%	3,0%
4. Jasa	0,8%	2,5%	2,0%
5. Tukang	—	5,0%	2,0%
6. Industri	—	23,0%	—
7. Lain-lain	—	3,5%	1,0%
Jumlah	100,0%	100,0%	100,0%

Agama yang dianut masyarakat pada ketiga desa ini seluruhnya beragama Islam. Di daerah ini banyak dijumpai mesjid, musolla, dan tempat pengajian agama Islam.

Sebagai daerah yang dekat dengan Ibukota Kabupaten yaitu Payakumbuh, jumlah penduduk pada setiap nagari termasuk padat dibandingkan dengan rata-rata kepadatan Kabupaten 50 Kota tetapi tidak sepadat Kota Payakumbuh. Pada tahun 1965 rata-rata kepadatan penduduk per km² di nagari ini adalah sebagai berikut :

Kota Baru Simalanggang	425 jiwa/km ²
Kota Tengah Simalanggang	405 jiwa/km ²
Taeh Baruh	447 jiwa/km ²

Dibandingkan dengan enam Kecamatan lainnya yang terdapat di Kabupaten 50 Kota, ternyata Kecamatan Payakumbuh lebih padat penduduknya. Dengan demikian wajar jika ketiga nagari yang terletak dalam Kecamatan Payakumbuh ini lebih padat penduduknya.

Jumlah anggota keluarga pada setiap rumah tangga pada masa sebelum Pelita (1965) sekitar 6 dan 7 orang. Pola perkampungan penduduk pada umumnya menyebar menurut jalur jalan raya dan aliran sungai serta pusat pasar dan perbelanjaan penduduk.

D. KEADAAN PENDIDIKAN

1. Desa Ujung Gading, Sungai Aur, dan Muara Kiawai di Kabupaten Pasaman.

Dibandingkan dengan keadaan sekarang perkembangan pendidikan di Nagari Ujung Gading, Sungai Aur, dan Muara Kiawai pada masa sebelum Pelita belum berkembang. Jumlah sekolah tidak dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu.

Sekolah yang ada di Ujung Gading pada masa sebelum Pelita adalah Taman Kanak-kanak, Sekolah Rakyat, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Guru Agama (PGA), dan Sekolah Teknik (ST). Di Sungai Aur hanya dijumpai Sekolah Rakyat, Pendidikan Guru Agama (PGA), dan Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), sedangkan di Desa Muara Kiawai hanya ditemui Sekolah Rakyat saja.

Semua sekolah itu tidak seluruhnya berstatus negeri tetapi sebagian sekolah swasta. Penyebaran sekolah pada ketiga nagari ini tidak pula merata. Pada umumnya sekolah banyak ditemui di Nagari Ujung Gading sebagai Ibukota Kecamatan Lembah Melintang.

Jumlah sekolah menurut keadaan tahun 1968, pada masing-masing nagari adalah sebagai berikut :

Jenis Sekolah/Status	Ujung Gading	Sungai Aur	Muarai Kiawai
1. TK			
Negeri	—	—	—
Swasta	1	—	—
2. SR/SD			
Negeri	9	8	1
Swasta	1	—	—
3. SMP			
Negeri	1	—	—
Swasta	—	—	—
4. SMEP			
Negeri	—	—	—
Swasta	—	1	—
5. Madrasah Tsana- wiyah			
Negeri	—	—	—
Swasta	1	—	—
6. PGA			
Negeri	—	—	—
Swasta	1	1	—
7. ST			
Negeri	1	—	—
Swasta	—	—	—
8. Madrasah Ibtidaiyah			
Negeri	—	—	—
Swasta	2	2	—
8. Madrasah Aliyah			
Negeri	—	—	—
Swasta	1	1	—

Tabel II. 7. JUMLAH MURID MENURUT JENIS SEKOLAH PADA DESA/NAGARI UJUNG GADING, SUNGAI AUR, DAN MUARA KIAWAI DI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 1968 @)

No.	Jenis Sekolah	Ujung Gading	Sungai Aur	Muara Kiawai
1.	TK	33	—	—
2.	SD	1.745	1.451	184
3.	Madrasah Ibtidaiyah	116	84	—
4.	SMP	168	—	—
5.	SMEP	—	39	—
6.	Madrasah Tsana- wiyah	76	—	—
7.	PGA	85	43	—
8.	ST	81	—	—
9.	Madrasah Aliyah	47	38	—

Keinginan melanjutkan pendidikan dari anggota masyarakat pada ketiga nagari tersebut cukup besar. Hampir semua anggota masyarakat ingin melanjutkan pendidikan anaknya ke pendidikan menengah atas. Pada masa sebelum Pelita keinginan ini banyak menemui hambatan terutama kurangnya Sekolah Menengah Tingkat Pertama di daerah ini dan Sekolah Menengah Tingkat Atas tidak ada. Untuk menyekolahkan anak ke luar kecamatan, sebagian besar masyarakat kurang untuk membiayai pendidikan anak-anaknya karena masih rendahnya tingkat pendapatan masyarakat itu.

Para lulusan SR Ujung Gading pada umumnya melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah pertama di nagari mereka sendiri, sedangkan lulusan SR di Sungai Aur dan Muara Kiawai sebagian besar melanjutkan ke Ujung Gading. Memang di Desa Sungai Aur terdapat SLTP Swasta seperti SMEP dan Madrasah Tsanawiyah tetapi para lulusan sekolah di daerah ini lebih senang melanjutkan ke SMP.

Jarak rumah murid dengan SITP Ujung Gading yang paling jauh adalah ± 8 kilometer dan yang terdekat sekitar 0,5 kilometer. Sungai Aur jarak terjauh adalah 12 kilometer dan terdekat 1 kilometer, sedangkan di Muara Kiawai antara 9–15 kilometer.

Mengingat keadaan yang demikian maka banyak murid di SLTP pindah tinggal di sekitar sekolah mereka. Untuk pulang pergi ke rumah orang tua bagi sebagian pelajar tidak mengizinkan karena hubungan sulit.

Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat menengah atas umumnya anak-anak pada ketiga desa ini melanjutkan pada SLTA yang berada di luar kecamatan daerah mereka. Malah sebagian ada di luar Kabupaten Pasaman, karena di Ibukota Kabupaten hanya ada SMA dan SGA.

Bagi lulusan SLTP yang ingin melanjutkan ke SMEA, STM, dan SLTA lainnya pergi ke Bukittinggi, Padang, dan lain-lain. Untuk memasuki Madrasah Aliyah yang terdapat dalam Kecamatan Lembah Melintang umumnya dilakukan oleh tamatan Madrasah Tsanawiyah. Dengan demikian tamatan SLTP banyak melanjutkan pendidikan ke Ibukota Kabupaten atau Kotamadya lainnya.

Sebagai akibat dari daya tampung yang kurang tersebut banyak para lulusan yang tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi, menjadi menganggur atau bekerja apa adanya di masyarakat. Melanjutkan sekolah ke daerah lain sulit bagi anggota masyarakat itu karena faktor ekonomi dan faktor sosial budaya lainnya.

Di samping itu anak yang putus sekolah setiap tahun jumlahnya cukup besar, yaitu Sekolah Dasar $\pm 5,6\%$ per tahun, SMP $\pm 3,5\%$ per tahun, dan di Aliyah diperkirakan $\pm 3\%$ per tahun. Anak putus sekolah sebagian besar disebabkan karena tenaganya dibutuhkan oleh orang tua untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Faktor lainnya seperti kesehatan, kemampuan murid dan sebagian tidak begitu mempengaruhi besarnya anak putus sekolah.

Penyelenggara pendidikan sebagian bertumpu kepada usaha pemerintah baik melalui program nasional maupun program pemerintah daerah terutama untuk Sekolah Dasar. Pada masa sebelum Pelita hanya satu Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh badan swasta yakni SD Muhammadiyah di Air Bayang Ujung Gading. Sekolah me-

nengah yang diselenggarakan hanya SMEP di nagari Sungai Aur. Pada tingkat menengah ini cukup banyak sekolah yang dilola oleh badan swasta, seperti Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Aliyah, dan PGA di Ujung Gading. Di Sungai Aur adalah PGA, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta. Sedangkan di Muara Kawai tidak ada sekolah swasta ini.

Pendidikan Luar Sekolah.

Pendidikan Luar Sekolah yang pernah diselenggarakan di Ujung Gading, Sungai Aur, dan muara Kiawai hanyalah Kursus Pemberantasan Buta Huruf (PBH) yang pada umumnya diselenggarakan oleh pendidikan masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang ada di daerah ini. Dalam penyelenggaraan kursus ini banyak diperoleh bantuan dari masyarakat setempat.

Kursus lainnya yang pernah ada adalah semacam Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), tetapi tidak seperti sekarang. Pemerintah bekerjasama dengan beberapa kelompok masyarakat menyelenggarakan kursus ketrampilan seperti jahit menjahit dan masak memasak. Tetapi belum ditemui suatu badan swasta khusus yang menyelenggarakan kursus.

Kursus PBH yang diselenggarakan pada masa sebelum Pelita cukup bermanfaat bagi masyarakat setempat. Anggota masyarakat yang sebelumnya buta huruf, setelah memasuki kursus ini dapat membaca dan menulis. Khusus di Sungai Aur pada masa sebelum Pelita diperkirakan penduduk berumur 15 tahun ke atas pada awal tahun lima puluh diperkirakan buta huruf sebanyak 40% dari seluruh penduduk pada tingkatan umur itu. Setelah diselenggarakan kursus PBH masyarakat yang buta huruf jumlahnya semakin sedikit. Kursus ketrampilan wanita kemanfaatannya cukup besar dirasakan oleh masyarakat, walaupun hanya terbatas dalam masak memasak dan jahit menjahit pakaian wanita.

Pendidikan luar sekolah pada masa sebelum Pelita kegiatannya tidak banyak dan tidak mencukupi kebutuhan masyarakat. Keadaan ini berubah lebih baik setelah adanya Pelita.

2. Desa Tanjung Bonai, Balai Tengah, dan Tepi Selo di Kabupaten Tanah Datar.

Pendidikan telah berkembang sejak zaman lampau, minat penduduk terhadap pendidikan cukup tinggi. Sebelum Pelita telah banyak sarjana yang berasal dari ketiga nagari ini, baik dokter, insinyur, sarjana hukum, ekonomi, pendidikan, dan sastra. Kalau seandainya pendidikan telah berkembang jumlah cendekiawan yang berasal dari ketiga nagari akan lebih banyak lagi.

Minat yang besar terhadap pendidikan merupakan faktor utama yang mendorong kemajuan ketiga nagari itu. Bekerja keras dan belajar tekun merupakan kebiasaan yang ditanamkan orang tua dalam masyarakat. Keberanian dan keuletan penduduk nagari-nagari ini untuk mendirikan sekolah telah terbukti sejak masa lampau. Pada tahun sebelum Perang Dunia Kedua penduduk nagari-nagari ini telah memberanikan untuk membuka HIS Swasta. Walaupun akhirnya ditutup. Kemungkinan membuka sekolah setingkat HIS, karena telah tersedia tenaga pengajar yang berumutu yakni tamatan HIK dan "Sekolah Raja."

Pada tahun 1947 penduduk nagari-nagari ini kembali membuka sebuah SMP Swasta. Pengajar di sekolah ini berasal dari tenaga luar kecamatan dan kabupaten serta tenaga yang berasal dari nagari tersebut. SMP Swasta ini berlokasi di Balai Tengah. Sebagian besar murid SMP Swasta tersebut pada masa kini banyak yang telah menjadi orang yang terpandang dengan ijazah sekurang-kurangnya Sarjana Muda. Kesungguhan penduduk untuk mengembangkan pendidikan tidak hanya dalam pendidikan umum, tetapi juga dalam pendidikan agama setingkat SLTP. Masing-masing nagari memiliki satu SLTP swasta Agama.

Sebelum tahun 1965 di Tepi Selo telah ada tiga buah SD, di Balai Tengah dua, dan di Tanjung Bonai yang semuanya SD negeri. Perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah sekolah pada masa ini, rata-rata tiap 2.000 penduduk satu buah SD. Pada tahun 1965, anak sekolah yang berasal dari nagari ini yang bersekolah di kota mengajak pemuka masyarakat untuk mendirikan SMA Swasta di Tanjung Bonai. Berkat kesungguhan kaum muda bersama pemuka masyarakat setempat, maka akhirnya berdirilah SMA Swasta di nagari ini.

Jumlah murid yang belajar di SD tidak sama di tiap-tiap nagari. Pada tahun 1968, di Tepi Selo terdaftar murid sebanyak 641 orang, di Balai Tengah sebanyak 245 orang, dan di Tanjung Bonai sebanyak 731 orang. Diperkirakan partisipasi penduduk usia 7–12 tahun bersekolah pada tahun tersebut rata-rata sekitar 70%. Jumlah putus sekolah di SD pada tahun 1968 sekitar 7% di ketiga nagari.

Dikaitkan dengan jumlah penduduk menurut umur Sekolah Dasar (7–12 tahun) ternyata tingkat partisipasi atau *net enrollment ratio* pada tingkat pendidikan dasar ini masih rendah pada maa sebelum Pelita. Pada tahun 1968 angka partisipasi di Tepi Selo adalah sekitar 57,16%, di Balai Tengah± 42,56%, sedangkan di Tanjung Bonai 40,90%. Pada masa sebelum Pelita masih banyak penduduk umur sekolah yang belum dapat ditampung di sekolah dasar, karena kurangnya jumlah sekolah dan guru. Di samping itu jarak antara rumah dan sekolah belum dapat dijangkau oleh murid kelas I SD yang masih kecil ditambah lagi belum lancarnya hubungan pada saat ini.

Pendidikan Luar Sekolah

Kebanyakan pendidikan Luar Sekolah diselenggarakan dalam bentuk pemberantasan buta huruf yang disponsori oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan instansi lainnya. Diselenggarakan dalam bentuk kursus seperti sulam menyulam, jahit menjahit pakaian wanita, memasak, dan ketrampilan wanita lainnya. Kursus ini banyak diikuti oleh wanita remaja tidak saja untuk memperoleh ketrampilan yang akan dijadikan sebagai sumber mata pencaharian tetapi juga sebagai bekal dalam hidup berumah tangga.

Pendidikan ketrampilan wanita ini sebagian ada yang dipelajari di daerah seperti Batusangkar, Payakumbuh, dan Padang, malah juga dari perantau Minang yang pulang dari Jawa juga menyebarkannya kepada para remaja wanita ketrampilan teknik seperti perbengkelan, listrik, pertukangan, elektro, dan pengetahuan mesin lainnya tidak begitu berkembang.

Pendidikan ketrampilan teknik mesin kendaraan bermotor dilaksanakan secara individual dengan bekerja di perusahaan angkutan bermotor dengan belajar sambil bekerja.

3. Desa Koto Baru Simalanggang, Koto Tengah Simalanggang, dan Taeh Baruh di Kabupaten 50 Kota.

Pada masa sebelum Pelita belum banyak sekolah di ketiga nagari itu. Sejak tahun 1946 sampai dengan tahun 1967 di nagari Koto Baru Simalanggang hanya terdapat dua Sekolah Dasar negeri, sekolah swasta belum ada. Sampai tahun 1968 seilah belum bertambah, jumlah murid 392 orang yang terdiri dari 12 kelas. Jumlah murid perempuan lebih besar dari murid laki-laki, yaitu perempuan 210 orang dan laki-laki hanya 182 orang.

Partisipasi atau net enrollment ratio Sekolah Dasar pada tahun 1968 masih rendah yaitu 63,55%. Penduduk umur SD yang ada di daerah tersebut sebanyak 36,45% tidak berpartisipasi dalam Sekolah Dasar. Hal ini disebabkan kurangnya prasarana dan sarana pendidikan dan masih terdapat anak yang putus sekolah sekitar 6% per tahun.

Di Nagari Koto Tengah Simalanggang sejak tahun 1952 hanya terdapat satu buah Sekolah Dasar Negeri. Pada tahun 1968 tercatat jumlah murid sebanyak 322 orang yang belajar dalam enam ruangan kelas. Dari enam ruangan kelas ini dua ruang di antaranya baru dibangun pada tahun 1966.

Perbandingan jumlah murid laki-laki dan perempuan hampir sama yaitu 165 orang murid laki-laki dan murid perempuan. Dari jumlah murid sebanyak 332 orang diperkirakan sebanyak 249 orang adalah anak yang berumur antara 7–12 tahun. Partisipasi atau net enrollment ratio di Desa Koto Tengah Simalanggang sekitar 79,05%. Partisipasi nagari ini lebih tinggi dari nagari Koto Baru Simalanggang yang merupakan Ibukota Kecamatan Payakumbuh.

Di nagari Taeh Baruh pada tahun 1968 angka partisipasi atau net enrollment ratio Sekolah Dasar masih rendah yaitu 55,28% atau sekitar 448 orang dari 810 orang penduduk usia 7–12 tahun. Masih banyak anak usia Sekolah Dasar yang belum bersekolah pada masa sebelum Pelita. Jumlah murid SD pada tahun 1968 sebanyak 597 orang yang terdiri dari 46,93% murid laki-laki dan 53,07% murid perempuan. Sekolah yang ada sejak tahun 1946 sampai dengan tahun 1968 hanya dua buah sekolah negeri.

Sekolah Menengah Tingkat Pertama dan Tingkat Atas sampai dengan Pelita II belum ada. Untuk melanjutkan pendidikan para

lulusan SD di ketiga nagari ini pergi ke kota Payakumbuh. Hubungan ke kota Payakumbuh dari ketiga nagari ini tidak lancar, merupakan salah satu penyebab belum adanya SLTP dan SLTA di ketiga nagari ini. Di samping itu daya tampung sekolah lanjutan yang ada di kota Payakumbuh masih memungkinkan menampung lulusan SD yang berasal dari daerah pinggiran kota.

Sampai saat ini para pelajar yang bersekolah di kota Payakumbuh mempergunakan kendaraan bermotor maupun sepeda. Sedikit di antara pelajar ini yang tinggal di kota Payakumbuh pada waktu bersekolah. Di kota Payakumbuh di samping sekolah lanjutan umum juga terdapat sekolah lanjutan kejuruan dan sekolah lanjutan Islam, yang menyebabkan tingginya daya tampung sekolah di kota itu.

Pendidikan Luar Sekolah

Pendidikan luar sekolah di ketiga nagari ini pada masa sebelum Pelita hanya Kursus Pemberantasan Buta Huruf yang diselenggarakan oleh pemerintah. Anggota masyarakat yang berminat menambah pengetahuan dan ketrampilan di luar pendidikan formal kebanyakan pergi ke Payakumbuh seperti kursus mengetik, kursus pembukuan, kursus administrasi, kursus ketrampilan wanita, dan kursus kejuruan lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Usaha menambah ketrampilan terutama kerajinan wanita dan anyam-anyaman berlangsung di Koto Tengah Simalanggang yang sejak lama masyarakatnya telah trampil dalam jahir-menjahit, sulam-menyulam, dan anyaman bambu. Sistem pendidikannya adalah latihan sambil belajar, sebagai salah satu sumber mata pencaharian.

Di kedua nagari lainnya pendidikan ketrampilan masyarakat tidak begitu menonjol. Faktor pendukung berkembangnya ketrampilan anyam-anyaman disebabkan tersedianya bahan baku bambu dan mesiang. Sedangkan hasil ketrampilan wanita mudah dipasarkan ke Kota Payakumbuh dan pusat pasar lainnya.

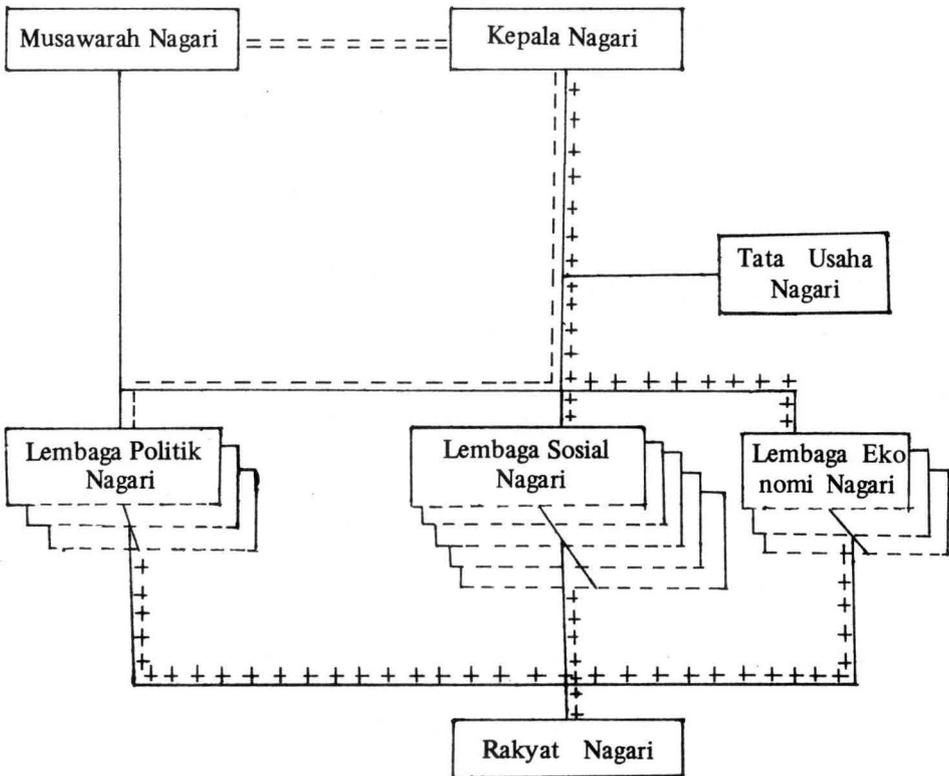
C. STRUKTUR PEMERINTAHAN

Istilah nagari telah berlaku semenjak zaman penjajahan Belanda sampai dengan sekarang, kecuali setelah tahun 1980 pada daerah Kota atau Ibukota Kabupaten dan Kotamadya pemerintahan nagari

dinamakan Kelurahan. Dalam melaksanakan pemerintahan, Kepala Nagari dibantu oleh Badan Musyawarah nagari dan kepala Jorong, yang daerahnya merupakan bagian dari nagari.

Kepala nagari yang pada masa penjajahan disebut "Angku Palo" atau "Datuk Palo", pada zaman Indonesia merdeka berganti menjadi "Wali Nagari" atau "Kepala Nagari", merupakan penguasa tunggal dalam nagari.

Dari dulu sampai sekarang kekuasaan dalam nagari dijalankan dalam organisasi sebagai berikut :



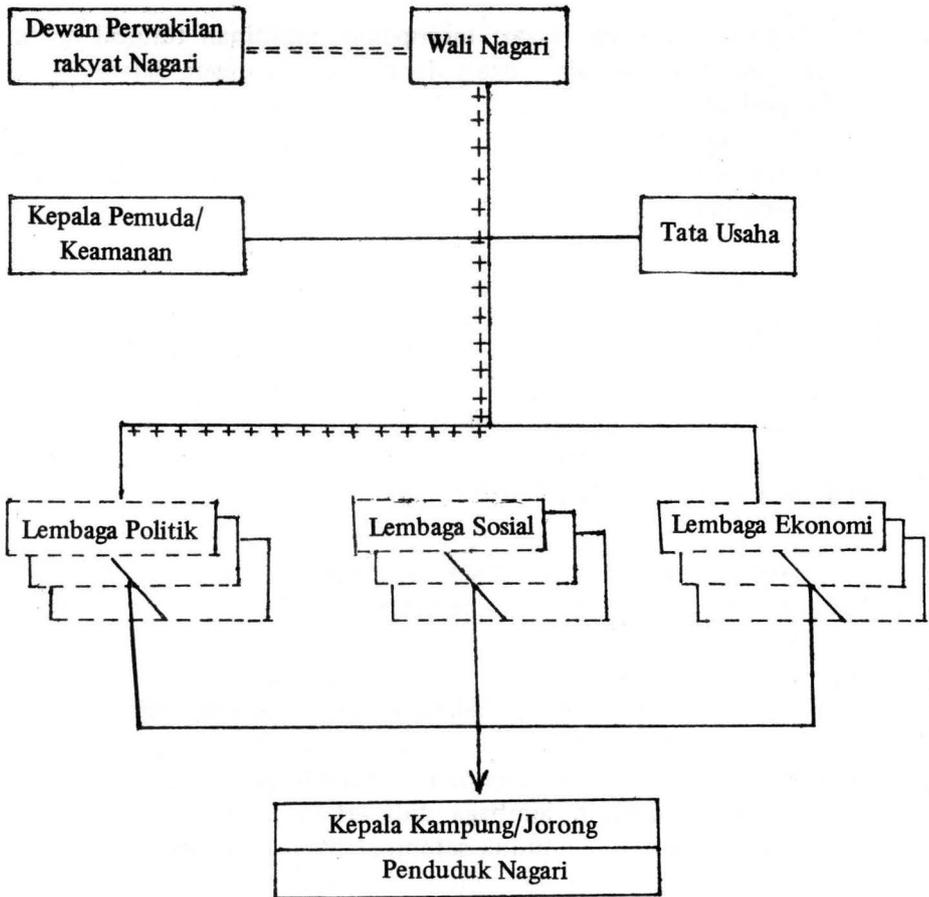
- Keterangan :**
- Direkrif penuh
 - +++++++ Direktif dan Konsultatif
 - ===== Konsultatif Kepala Nagari memperhatikan kesempatan Musyawarah Nagari.
 - Konsultasi yang tidak mengikat.

Walaupun Kepala Nagari merupakan pimpinan tunggal dalam nagari, hubungan Kepala Nagari dengan segala unsur dalam nagari adalah perpaduan konsultatif dan direktif. Di samping itu antara lembaga yang ada dalam beberapa hal terdapat hubungan konsultatif. Hubungan demikian mungkin apabila seorang kepala nagari dipilih oleh penduduk.

Daerah yang tidak begitu luas, pemukiman penduduk yang berkelompok, sistem perkawinan nagari menjadi faktor yang menentukan penduduk nagari bersikap dan berperilaku "*Saiyo Satido*" (bermusyawarah) "*sadancıang bak basi*" (satu bunyi seperti dencing besi kalau dipukul) dan "*saciok bak ayam*" (sama-sama menciap seperti ayam). Hakekat kesatuan penduduk yang telah "bertali darah" sejak dulu terpecah pada setiap langkah pemerintahan nagari.

Walaupun terjadi perubahan dari lembaga tertentu, tetapi kegiatannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan "alur dan patut". Berkurangnya penonjolan suatu lembaga tertentu pada suatu saat, bukan berarti pimpinan atau anggota lembaga tersebut berkurang peranannya dalam nagari yang bersangkutan. Eksistensi suatu organisasi di nagari sangat ditentukan oleh manfaat lembaga tersebut dalam mewujudkan kesejahteraan penduduk nagari. Kepentingan pengadaan lembaga didasarkan pada perhitungan rasional dan kebutuhan penduduk setempat. Laju perkembangan nagari sejak Pelita, terutama sesudah tahun 1974 makin meningkat.

Sistem pemerintahan nagari sebelum Pelita juga telah banyak disesuaikan dengan tuntutan masyarakat nagari yang selaras dengan ketentuan pemerintah. Sesudah Indonesia merdeka, Wali Nagari didampingi oleh Dewan Perwakilan Nagari. Pekerjaan rutin Wali Nagari dibantu oleh juru tulis dan kegiatan yang berhubungan dengan usaha pertahanan keamanan bersama dengan ABRI dilaksanakan oleh Kepala Pemuda. Segala kegiatan ditujukan untuk menyediakan perbekalan perang menghadapi Belanda. Struktur kekuasaan dalam nagari adalah :



Keterangan : ===== Konsultatif Wali Nagari lebih berperan Direktif

----- Direktif

+++++ Konsultatif.

Ada empat unsur yang memimpin pemerintahan nagari :

- a. Wali Nagari (bersama juru tulis sebagai pelaksana administrasi nagari)
- b. Kepala Pemuda/Keamanan
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Nagari
- d. Kepala Kampung/Jorong dalam Nagari.

Kepemimpinan tradisional seperti Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai, tetap merupakan unsur kekuatan yang ditemukan dalam keempat unsur di atas. Struktur Pemerintahan di atas berlaku umum di Sumatera Barat. Perkembangan struktur pemerintahan tersebut dalam masa kemerdekaan sampai dengan masa dilaksanakan Pelita.

Pada masa sebelum Pelita undang-undang tentang pemerintahan nagari yang berlaku sejak tahun 1946 sampai dengan tahun 1967 dikenal tiga undang-undang berupa Maklumat Residen, Peraturan Daerah, dan Surat Keputusan Gubernur, yaitu :

- a. Maklumat Residen Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 1946 yang ditetapkan tanggal 21 Mei 1946.
- b. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Nomor 50/GP/1950 tentang Pembentukan Wilayah ditetapkan tanggal 14 Juni 1950.
- c. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat Nomor 2/Desa/GSB/PRT-1963 tentang Peraturan Nagari dalam Daerah Sumatera Barat.

- a. Dalam maklumat Nomor 20 tahun 1946 pimpinan pemerintahan nagari terdiri atas :
 - Dewan Perwakilan Nagari (DPN)
 - Dewan Hariah Nagari (DHN)
 - Wali Nagari (WN)

Wali Nagari juga sebagai Ketua Dewan Perwakilan Nagari dan Ketua Dewan Hariah Nagari (DHN). Sekurang-kurangnya jumlah anggota DPN sebanyak sembilan orang yang mewakili lebih kurang 1.000 orang penduduk. Wali Luhak, Demang, dan Pegawai Nagari atau Setia usaha Nagari tidak boleh menjadi anggota Dewan Perwakilan Nagari.

Ketentuan tentang Dewan Hariah Nagari diatur sebagai berikut :

- Anggota Dewan ini sekurang-kurangnya tiga orang dan sebanyak-banyaknya lima orang yang berasal dari anggota Dewan Perwakilan Nagari.
- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Nagari adalah juga sebagai Wakil Ketua anggota Dewan Hariah Nagari.

- Setia usaha Dewan Perwakilan Nagari juga menjadi setia usaha Dewan Harian Nagari.
 - Dewan Harian Nagari adalah pelaksana pemerintahan sehari-hari sesuai dengan keputusan Dewan Perwakilan Nagari.
- b. Struktur pemerintahan wilayah menurut peraturan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Nomor 50 Tahun 1950 terdiri dari Kepala Wilayah, dan Dewan Perwakilan Wilayah.

Wilayah dalam peraturan ini adalah suatu daerah yang merupakan gabungan dari nagari, yang berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Tiap-tiap wilayah mempunyai paling kurang sembilan orang anggota dan sebanyak-banyaknya 25 orang.

B. CARA PEMILIHAN PEMIMPIN PEMERINTAHAN DESA

Berpijak kepada ketiga undang-undang pemerintahan nagari maka pemilihan pemimpin pemerintahan nagari telah dilaksanakan menurut peraturan tersebut. Dalam maklumat Nomor 20 tahun 1946 Wali Nagari dipilih langsung oleh warganegara yang memenuhi syarat untuk memilih anggota Dewan Harian Nagari dan disahkan oleh Residen. Yang berhak memilih adalah warganegara Indonesia yang telah berusia 18 tahun dan tidak kehilangan hak pilihnya.

Yang berhak menjadi anggota Dewan Perwakilan Nagari adalah warganegara yang bertempat tinggal di nagari itu dan telah berumur 25 tahun, mempunyai hak memilih dan dipilih, pandai menulis, dan memenuhi syarat menjadi wakil rakyat ditinjau dari norma umum yang berlaku di daerah itu. Masa jabatan anggota DPN ini adalah satu tahun dan dapat diperpanjang tiap tahun dalam masa paling lama empat tahun.

Wakil Ketua DPN dipilih oleh Dewan Perwakilan Nagari, berkewajiban mewakili Ketua DPN jika berhalangan. Yang bersangkutan sesuai dengan peraturan yang berlaku langsung menjadi Wakil Ketua dan merangkap sebagai anggota Dewan Harian Nagari. Anggota Dewan Nagari sebanyak tiga sampai lima orang dipilih oleh Dewan Perwakilan Nagari. Yang menjadi anggota Dewan Harian Nagari ini adalah anggota Dewan Perwakilan Nagari.

Cara pemilihan pemimpin pemerintahan nagari menurut Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Nomor 50/GP/1950 adalah juga sesuai dengan Struktur Pemerintahan yang berlaku. Kepala Wilayah dan Dewan Perwakilan Wilayah dipilih oleh warga wilayah daerah bersangkutan dengan ketentuan setiap 2.000 jiwa warganegara Indonesia mempunyai satu orang wakil. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Wilayah dipilih di antara anggota dewan. Untuk pertama kali Kepala Wilayah ditunjuk oleh Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Jumlah jorong atau kampung sebagai unit pemerintahan di bawah kenegarian dalam nagari yang diteliti adalah sebagai berikut :

Tabel II. 7 NAMA JORONG PADA SETIAP NAGARI YANG DITELITI DI KABUPATEN PASAMAN, TANAH DATAR, DAN 50 KOTA SEBELUM PELITA

No.	Kabupaten	Nagari	Jorong
1.	Pasaman	1. Ujung Gading	1. Ujung Gading Hilir 2. Ujung Gading Koto 3. Ujung Gading Timur 4. Ujung Gading Barat 5. R. Robajuki
		2. Sungai Aur	1. Situang 2. Tanjung Beringin 3. Sopobandah 4. Sontang 5. Sungai Aur 6. Koto Balam 7. Kasik Putih 8. Sikilang
2.	50 Kota	1. Kota Baru Simalanggang	1. Koto Baru 2. Parumpung 3. Tabek Panjang
		2. Koto Tangah Simalanggang	1. Batu Nan Limo 2. Dalam Koto 3. Parit Dalam

No.	Kabupaten	Nagari	Jorong
		3. Tepi Selo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota 2. T. Padang 3. Pd. Lawe 4. Limau Manis 5. Kajai 6. Kubang Koto 7. Dr. Bangko 8. Md. Lindan 9. Gelanggang 10. Ujung Tanah

E. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMIMPIN MASYARAKAT NON PEMERINTAH

Penghulu atau Ninik Mamak, Alim Ulama dan Cerdik Pandai adalah pimpinan masyarakat di Minangkabau. Mereka tidak diangkat melalui suatu surat keputusan dari pemerintah. Walaupun demikian kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah ini sangat besar dan berpengaruh, di Minangkabau.

Tugas seorang Penghulu di dalam nagari sampai saat ini tetap merupakan pimpinan yang diberikan oleh kaum suku atau nagari kepadanya. Alim Ulama sebagai pemimpin agama yang mempunyai pengikut tetap menjanlan tugas dan peranannya di masyarakat nagari. Kepemimpinan Alim Ulama tetap mempunyai pengaruh dan besar di dalam melaksanakan agama di dalam nagari.

Cerdik Pandai setelah zaman Kemerdekaan semakin meningkat peranannya karena pada umumnya mereka adalah tokoh yang berpendidikan dan berilmu pengetahuan sebagai pemimpin atau pemuka masyarakat. Kepemimpinan pemerintahan nagari dan jorong banyak mempergunakan tenaga Cerdik Pandai.

Wewenang dan tanggungjawab Kepala Nagari sebenarnya merupakan delegasi wewenang dan tanggungjawab para pemuka masyarakat seperti Ninik Mamak, Alim Ula, dan Cerdik Pandai. Situasi demikian terjadi karena hukum adat diperlakukan di nagari sepanjang

tidak bertentangan dengan undang-undang negara. Adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah, adalah merupakan kaitan wewenang dan tanggungjawab para Ninik Mamak dan para Ulama di Nagari. Kelahiran, khitanan, perkawinan, dan kematian, zakat dan fitrah serta upacara lainnya tidak dapat terlepas dari peranan Alim Ulama.

Perkawinan, kematian, dan bertegak "PENGHULU" merupakan kegiatan kehidupan yang diatur oleh adat. Peranan Ninik Mamak menentukan syahnya pelaksanaan suatu upacara yang diadakan. Izin kawin, senantiasa diminta lebih dahulu kepada "PENGHULU PUONOK" (PENGHULU yang merupakan kepala suku). Biasanya para PENGHULU tidak mempersulit izin kawain anak kemenakan mereka, karena seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, yang akan malu adalah PENGHULU yang bersangkutan juga.

Peranan Alim Ulama juga menentukan dalam masyarakat, yang penduduknya 100% memeluk agama Islam. Sedapat mungkin penduduk akan menghindarkan tingkah laku yang bertentangan dengan agama. Panggilan "tidak beradat dan tidak baagamo" (tidak beradat dan tidak beragama) adalah merupakan panggilan yang dianggap menghina oleh penduduk nagari. Walaupun ada penduduk yang belum mampu menjalankan kewajiban sebagai pemeluk agama Islam, namun bila dikatakan tidak beragama mereka tidak akan senang.

Keterbukaan penduduk terhadap kemajuan zaman terlihat pada besarnya aspirasi mereka terhadap pendidikan. Penghargaan mereka terhadap kemajuan zaman dan pendidikan itu berakar dari tata cara hidup tradisional yang senantiasa menghormati petuah cerdik pandai. Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai adalah merupakan pemimpin yang berpengaruh dalam masyarakat. Seorang Kepala Nagari akan selalu mendekati ketiga kelompok pemimpin di atas. Kegagalan mendekati salah satu dapat berakibat tidak menguntungkan bagi Kepala Nagari.

Sejak Indonesia merdeka penduduk yang terpilih untuk menjadi Kepala Nagari ada yang berasal dari kelompok Alim Ulama, PENGHULU, dan Cerdik Pandai atau cendekiawan. Pengaruh pemuka agama dan adat mengalami sedikit pasang surut pada sekitar tahun 1961 - 1966. Namun demikian, pengaruh salah satu kelompok senantiasa

tetap dipertahankan karena kesetiaan penduduk dalam kehidupan menurut adat setempat. Para cendekiawan makin berpengaruh, sesuai dengan perkembangan pemerintahan dari atas yang beranggotakan para cendekiawan.

Susunan pimpinan nagari pada saat ini merupakan gabungan antara pimpinan pemerintahan dan pimpinan masyarakat. Kepala Nagari sebagai kepala pemerintahan administrasi nagari bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari atau Kerapatan Nagari yang beranggotakan unsur Penghulu (Ninik Mamak), Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kandung, dan Kepala Jorong adalah merupakan komponen pemerintahan nagari. Kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat tidak dapat diabaikan, dan merupakan salah satu unsur penentu dalam kelancaran roda pemerintahan tidak saja pada masa sebelum Pelita tetapi juga sampai saat ini.

F. ORGANISASI POLITIK DAN NON POLITIK

1. Desa Ujung Gading, Sungai Aur, dan Muara Kiawai di Kabupaten Pasaman.

Organisasi atau partai politik yang terdapat di ketiga nagari ini sebelum tahun 1965 adalah Masyumi, Nahdatul Ulama (NU), Partai Islam Perti, PNI, dan PKI. Selain dari pada itu juga terdapat sebagai anggota masyarakat yang memasuki IPKI tetapi jumlahnya sedikit. Partai yang banyak pengikutnya di nagari Ujung Gading adalah Partai Masyumi dan IPKI, sedangkan di Sungai Aur dan Muara Kiawai adalah Partai NU dan Partai Islam Perti.

Pada umumnya organisasi non politik bergerak di bidang Koperasi, perdagangan, olahraga, kesenian, kewanitaan, kepemudaan, keagamaan, dan kepegawaian. Selain itu juga ditemui organisasi pramuka dan usaha, tani tetapi kegiatannya tidak begitu menonjol. Yang menonjol diantara organisasi non politik adalah Muahammadiyah dan Aisyiah di Ujung Gading, sedangkan perkumpulan olahraga dan kesenian serta koperasi merata pada ketiga nagari ini. Organisasi yang bergerak dalam usaha perdagangan banyak dijumpai di Ujung Gading dan Sungai Aur.

Pada masa sebelum Pelita lebih banyak masyarakat yang ikut dalam organisasi sosial dari pada masa sesudah Pelita. Kurangnya minat masyarakat memasuki organisasi sosial disebabkan oleh beberapa faktor antara lain tekanan ekonomi, di samping rendahnya pengetahuan dan pendidikan sebagian masyarakat. Selain dari itu tempat tinggal sebagian penduduk jauh dari pusat pemukiman, sehingga kegiatan organisasi ini kurang dimengerti oleh masyarakat.

Bagi anggota masyarakat yang aktif dalam organisasi sosial budaya faktor yang mempengaruhinya antara lain karena pengurus cukup pandai menarik simpati calon anggota dan masyarakat bersangkutan telah memahami tujuan dan dasar organisasi itu.

2. **Desa Tanjung Bonai, Balai Tengah, dan Tepi Selo di Kabupaten Tanah Datar.**

Masyumi adalah partai yang paling menonjol pada tahun 1946—1958 sesudah tahun 1960 dan PKI juga mendapat kesempatan berkembang dalam masyarakat. Walaupun demikian berapa jauh perkembangan itu tidak dapat dibuktikan, kecuali Masyumi yang dapat dilihat pada Pemilihan Umum 1955.

Organisasi non politik seperti "Lambung Pitih", olah raga, pencak silat wanita, Hisbullwathan, Muhammadiyah, dan Aisyiah sudah berkembang sejak masa penjajahan Belanda. Sejak zaman kemerdekaan koperasi bersama dengan organisasi di atas, berkembang pesat. Walaupun demikian perkembangan itu tidak selalu sama, Aisyiah dan Muhammadiyah berkembang sampai sekarang, Hisbullwathan hanya sampai Jepang.

Organisasi olahraga, pencak silat, dan organisasi wanita lainnya tumbuh secara tidak berkelanjutan. Organisasi non politik lainnya adalah organisasi langgar dan surau. Langgar dan surau dipakai tidak hanya untuk tempat "mengaji" tetapi juga tempat mempersatukan kaum kerabat dalam satu suku dalam upacara makan bersama yang diadakan sekali setahun pada waktu subuh sebelum pergi sembahyang Idul Fitri. Para anggota keluarga, tua muda makan bersama di "surau" tersebut yang hidangannya dibawa oleh ibu-ibu dari rumah masing-masing pada pagi hari.

Lembaga ini mengikat kesatuan anggota suku sambil bermaaf-maafan. Tidak jarang beberapa orang tua bertangis-tangisan di pagi hari yang mulia ini, teringat sanak saudara di rantau orang,

entah makan entah tidak dan terkenang anggota kerabat yang sudah meninggal. Semua itu membawa mereka kepada penghambaan yang mendalam terhadap Yang Maha Pencipta, sadar akan kelamahan masing-masing menanamkan kesediaan untuk saling bermaafan setulus-tulusnya, menumbuhkan kembali ikatan kesatuan sebagai suatu kaum dalam nagari sehingga kembali "saciok bak ayam, sadancieng bak basi".

3. Desa Koto Baru Simalanggang, Koto Tengah Simalanggang dan Taeh Baruh di Kabupaten 50 Kota.

Pada sekitar tahun lima puluh partai yang hidup di Desa Koto Baru Simalanggang adalah Masyumi, PKI dan Partai Islam Perti. Masyumi sangat berpengaruh di jorong Koto Baru dan Perti berpengaruh di jorong Tabek Panjang sedangkan di Jorong Parumpung kekuatan Masyumi dan Perti hampir berimbang. PKI ditemui pada ketiga jorong ini tapi jumlahnya tidak seberapa. Sesuai dengan perkembangan kehidupan politik sesudah tahun enam puluhan sampai dengan tahun 1965 kelihatannya PKI semakin berkembang.

Organisasi non politik di nagari Koto Baru Simalanggang pada masa sebelum Pelita antara lain yang berkembang adalah organisasi olahraga, kesenian, koperasi, dan keagamaan. Organisasi Olahraga adalah perkumpulan Bola kaki, Bola Volli dan Pencak Silat. Kegiatan olahraga tidak terus menerus, ada kalanya pada suatu periode hanya bola kaki saja yang menarik minat para pemuda sedang dalam periode lainnya bola volli atau pencak silat. Kesenian yang menonjol adalah gambus dan kasidah, di samping itu juga berkembang Permainan Randai terutama di Jorong Koto Baru dan Parumpung.

Organisasi non politik lainnya adalah Organisasi Pemuda dan Koperasi. Organisasi pemuda yang hidup pada masa sebelum Pelita adalah Pemuda Muhammadiyah dan untuk wanita adalah organisasi Aisyiah. Koperasi disponsori oleh suatu perserikatan yang bernama "Pencita Kesejahteraan Rakyat" dan jenis koperasi yang dikembangkan adalah Simpan Pinjam. Karena kurangnya kader, maka pembinaan koperasi tidak berkembang sampai tahun-tahun terakhir menjelang Pelita.

Sekitar tahun 1955 pemimpin politik sangat menonjol perannya di Desa Taeh Baruh. Partai Politik yang hidup pada masa itu adalah Partai Islam Perti, Masyumi dan PKI. PKI pada masa-masa sebelumnya tidak begitu banyak penganutnya tetapi setelah tahun 1958 terlihat kemajuan yang menyolok.

Setelah tahun 1965 juga hidup Partai Nahdatul Ulama (NU) dan PNI di daerah ini. Di samping itu juga tumbuh dan berkembang organisasi dan kesenian seperti Ranai dan Pencak Silat. Pada masa ini anggota masyarakat sangat hati-hati ikut serta dalam organisasi politik karena pengaruh pengalaman pada masa lalu baik memasuki Partai Masyumi maupun PKI.

Di nagari Koto Tengah Simalanggang keadaan kehidupan politik pada masa sebelum Pelita tidak jauh berbeda dengan dua nagari lainnya. Partai politik yang hidup sama saja yaitu Masyumi, Perti dan PKI. Organisasi non politik di nagari Koto Baru Simalanggang kebanyakan organisasi olahraga, kesenian dan pemuda.

Kehidupan politik di ketiga nagari itu sangat mempengaruhi gerak dan arah pembangunan karena mereka saling mempertahankan golongan atau kelompok masing-masing. Di Taeh Baruh misalnya jika yang menjadi Kepala atau Wali Nagari berasal dari Partai Islam Perti maka sukar bagi partai lainnya seperti Masyumi untuk menggantikan pimpinan nagari yang bersangkutan. Organisasi non politik tidak begitu berkembang seperti partai politik.

G. PEREKONOMIAN MASYARAKAT PEDESAAN.

1. Desa Ujung Gading, Sungai Aur dan Muara Kiawai di Kabupaten Pasaman.

Karena jauhnya letak ketiga nagari dari Ibukota Kabupaten dan pusat perekonomian dan kurangnya pendidikan anggota masyarakat maka kehidupan pada ketiga nagari tersebut sebelum Pelita dapat dikatakan sangat menyedihkan.

Sukarnya pasar untuk menjual hasil pertanian dan kerajinan anak nagari serta sulitnya mendatangkan kebutuhan pokok yang berasal dari luar daerah dirasakan oleh daerah ini, sebagai daerah yang terisolasi. Karena kurang baiknya sistem irigasi hasil pertanian sawah

dan ladang tidak dapat ditingkatkan secara berarti sehingga sukar untuk merubah atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena kurangnya sumber mata pencaharian lain di samping bertani, maka kehidupan masyarakat sangat tergantung kepada fluktuasi harga hasil pertanian yang hampir selalu mengalami gangguan konjungtur.

2. Desa Balai Tengah, Tepi Selo dan Tanjung Bonai di Kabupaten Tanah Datar.

Penduduk ketiga nagari ini terutama tergantung pada pertanian padi. Sebelum tahun 1966 jumlah konsumsi pangan (beras) lebih besar dari kemampuan nagari-nagari ini untuk menghasilkannya. Jumlah sawah tidak bertambah sampai masa tersebut. Pada masa ini tiap tahun rakyat berusaha menutup kekurangan berasnya dengan mendatangkan dari nagari atau kecamatan terdekat. Namun sewaktu Bupati Mahyuddin Algamar bertugas di Kabupaten Tanah Datar dilaksanakan kampanye intensifikasi pertanian dengan menggunakan bibit unggul dan pupuk buatan. Karena bersamaan dengan itu, masyarakat sudah terbiasa memelihara irigasi secara baik, pelaksanaan intensifikasi pertanian telah dapat melipat gandakan hasil sawah $\pm 25\%$ setahun bagi nagari yang sawahnya beroleh irigasi (1966).

Pertanian palawija lainnya di nagari ini adalah lombok, kacang-kacangan, terung, bayam, singkong dan pelo (ubi jalar) dan sebagainya. Tanaman keras yang biasa ditanam penduduk setempat adalah Casia Verra, Kopi dan Cengkeh. Cengkeh banyak yang "mati tagak" (mengalami mati mulai dari pucuk menjalar sampai ke pokoknya).

Kerajinan rakyat sebagai tambahan pendapatan anak nagari adalah bertukang (tukang rumah), pandai besi. Penduduk wanita melakukan kegiatan menganyam yang produksi utamanya adalah tikar dari pandan, yang terkenal sampai di Kabupaten lain terutama di 50 Kota. Payakumbuh merupakan pasar penjualan bagi produksi penduduk nagari ini serta tempat pembelian bahan industri bagi keperluan konsumsi dan investasi di nagari.

Walaupun nagari ini terletak di Kabupaten Tanah Datar, hubungan ekonomi (sebelum tahun 1970 lebih banyak dilakukan dengan Kota Payakumbuh ibukota Kabupaten 50 Kota). Pasar harian, mingguan juga dimiliki oleh nagari ini, yakni terletak di nagari

Balai Tengah yang merupakan Pasar Serikat bagi ketiga nagari di atas. Situasi hubungan ekonomi dengan demikian, kesamaan adat dan pertalian darah lebih mengokohkan kesatuan penduduk nagari. Penduduk nagari ini dan termasuk nagari lain di daerah itu, bila sudah merantau ke kabupaten lain tidak dianggap atau dinamakan penduduk masing-masing melainkan ketiga-tiganya disebut "Orang Lintau."

Sumber pendapatan ketiga nagari tidak berbeda, yakni hasil gotong royong masyarakat nagari, baik yang tinggal di nagari tersebut maupun yang merantau. Sebelum tahun 1966, di tiap nagari belum diterapkan penyusunan anggaran tahunan nagari. Usaha pengembangan dan pembangunan yang timbul dalam musyawarah masyarakat nagari pada masa lampau maupun dalam tahun yang sedang berjalan, dibiayai dengan sumbangan anggota masyarakat secara sukarela.

Usaha pembangunan di nagari tergantung pada kehadiran tokoh tertentu dalam nagari yang bersangkutan dalam mengelola pembangunan yang dipilih. Besarnya sumber anggaran belanja nagari ada hubungannya dengan masa panen di nagari yang bersangkutan. Di samping itu dalam bulan Ramadhan sumber penghasilan nagari, khusus untuk membiayai mesjid dan langgar makin meningkat. Peningkatan sumber ini antara lain disebabkan karena dalam bulan tersebut para perantau banyak yang pulang ke nagarinya dan terjadi peningkatan sedekah dan untuk kepentingan masyarakat.

Besarnya pendapatan nagari dalam bentuk ini biasanya tergantung pada jenis kegiatan pembangunan yang dipilih oleh musyawarah kelompok penduduk nagari yang bersangkutan. Suatu kegiatan dilaksanakan ada juga yang berdasarkan sumbangan yang terkumpul dalam masa itu saja. Bangunan besar seperti mesjid dan madrasah kadang-kadang baru dapat diselesaikan sesudah beberapa kali bulan Ramadhan.

Suatu bangunan yang telah dirancang beberapa tahun sebelumnya berdasarkan pertimbangan yang timbul kemudian seperti pendapatan masyarakat desa, arsitektur baru, kebutuhan perluasan, dan sebagainya akhirnya dirombak lagi. Sebagian besar bangunan yang kelihatan megah di ketiga nagari itu dibangun dalam waktu yang panjang. Pembangunan mesjid terbesar di Tanjung Bonai telah dimulai sejak lebih kurang 20 tahun yang lampau.

Sumber pendapatan lain dari nagari yang dibutuhkan untuk membiayai *maintenance* dari *social* atau *economic overhead capital* di tiap nagari seperti perbaikan irigasi, jalan, jembatan, mesjid, madrasah, langgar dan sebagainya biasanya diperoleh dalam bentuk sumbangan sukarela dari penduduk yang bermukim di nagari yang bersangkutan atau dalam bentuk jasa (gotong royong) penduduk serta sumbangan yang dikirimkan oleh "perantau".

Nagari Balai Tengah mempunyai penghasilan dari pendapatan Pasar Serikat, yang ada di Nagari itu. Nagari Tanjung Bonai telah mencoba juga membuka pasar di nagari itu, namun tidak mampu berkembang menyaingi Pasar Serikat di nagari Balai Tengah. Pasar Serikat yang mempunyai kegiatan sekali seminggu merupakan pasar nagari Balai Tengah, Tanjung Bonai dan Tepi Selo. Adanya Pasar Serikat di Nagari Balai Tengah, juga merupakan sumber pendapatan tambahan di nagari ini.

Dari tahun 1966–1968 di Nagari Balai Tengah telah dimulai menetapkan anggaran penerimaan dan Pengeluaran, sedang di nagari Tanjung Bonai dan Tepi Selo, baru dilaksanakan sejak Pelita I.

Penggalian sumber guna peningkatan pembangunan nagari yang berasal dari nagari yang bersangkutan, hanya untuk membiayai pemeliharaan. Di samping itu juga telah dapat dipergunakan untuk biaya pendidikan. Pada saat ini usaha pembangunan *economic overhead Capital* yang dibutuhkan dalam menunjang pembangunan masyarakat belum berkembang. Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan sejak masa Pelita. Maksud untuk membangun desa telah ada sejak masa lampau, tetapi mengalami kesulitan dan kurangnya kemampuan pemerintah untuk menyediakan biaya.

3. Desa Koto Baru Simalanggang, Koto Tengah Simalanggang, dan Taeh Baruh di Kabupaten 50 Kota.

Kehidupan masyarakat di ketiga nagari ini adalah sangat menyedihkan pada masa sebelum Pelita, terutama pada sekitar tahun lima-puluh. Di nagari Koto Baru Simalanggang anggota masyarakat ada yang menjadi pegawai, pedagang, petani, dan usaha lain seperti buruh dan penjual kayu api ke kota Payakumbuh. Sistem pengairan dan pertanian masih bersifat tradisional dan sebagian besar sawah adalah

sawah tadah hujan. Hasil satu hektar sawah pada waktu itu di bawah 2 ton. Keadaan sawah demikian juga ditemui di nagari Koto Tangah Simalanggang dan Taeh Baruh. Di kedua nahagari ini sebagian sawah diairi dengan kincir air, tetapi hasilnya tidak memadai. Tidak sedikit anggota masyarakat yang hidup sebagai buruh tani di nagari itu dan sebagai buruh di kota Payakumbuh.

Rusaknya jalan menghalangi kelancaran hubungan antar nagari atau ke Kota Payakumbuh, yang berpengaruh kepada kegiatan pertanian masyarakat. Pada waktu sesusah tahun limapuluh mempergunakan sepeda lebih cepat sampai ke tempat tujuan dari mempergunakan kendaraan bermotor.

Di nagari Taeh Baruh di samping pertanian sawah masyarakat juga mengusahakan pertanian tembakau. Hasil tembakau adakalanya baik, tetapi pemasaran di Kota Payakumbuh hampir seluruhnya berada di tangan pedagang "Cina".

Kehidupan petani tembakau tergantung kepada pasaran yang ditetapkan oleh pedagang Cina.

Karena kurangnya jenis mata pencaharian anggota masyarakat di nagari ini, maka kehidupan pada umumnya ditentukan oleh usaha pertanian. Kehidupan sebagai pedagang hanya pedagang kecil dengan berjualan di pasar harian yang ada di nagari ini maupun berdagang satu kali dalam seminggu pada hari pasar di Kota Payakumbuh.

H. SOSIAL BUDAYA

1. Desa Ujung Gading, Sungai Aur, dan Muara Kiawai di Kabupaten Pasaman.

Ketiga nagari ini didiami oleh dua suku bangsa yaitu suku bangsa Minangkabau dan suku bangsa Mahdahiling. Diperkirakan suku bangsa Minangkabau berjumlah 40% dan suku bangsa Mandahiling sekitar 60%, agama penduduk hampir seluruhnya Islam. Sampai sekitar tahun limpuluh terdapat lima partai politik yang hidup di daerah ini yaitu Masyumi, Partai Islam Perti, Nahdatul Ulama (NU), PNI, dan PKI. Yang banyak pengikutnya adalah Partai Masyumi, Perti dan Nahdatul Ulama.

Kebiasaan bekerja bagi penduduk setiap hari adalah antara jam 07.⁰⁰ sampai dengan jam 17.⁰⁰ atau 5 sore dengan istirahat pada jam 12.⁰⁰ WIB sampai dengan jam 13.30 siang. Waktu istirahat dipergunakan untuk sholat lohor di samping makan siang dan istirahat. Pada malam hari ada juga penduduk yang bekerja dan sebagian besar melakukan istirahat di rumah dan ada pula yang mengikuti wirid pengajian agama.

Kehidupan sosial budaya lainnya adalah upacara adat yang diselenggarakan pada setiap penggantian penghulu, upacara tolak bala yang biasanya dilakukan pada waktu musim panen. Upacara agama yang banyak dilakukan adalah Khatam Kaji atau upacara tamat membaca Al Qur'an yang biasa dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Upacara lainnya adalah upacara perkawinan, upacara kematian, dan memperingati hari besar Islam dan hari besar nasional. Di samping organisasi politik masyarakat nagari ini pada masa sebelum Pelita juga melakukan olahraga, kesenian, kepemudaan, keagamaan, dan koperasi.

Suatu kebiasaan masyarakat yang menonjol di daerah ini adalah membentuk perkumpulan yang dinamakan "Julo-julo" atau arisan. Kegiatan olah raga yang digemari di ketiga daerah ini bola kaki, bola volly, badminton, dan sebagian kecil tenis meja. Di nagari Ujung Gading masyarakat yang menonjol bermain catur.

Permainan bola kaki dan catur sudah dikenal masyarakat daerah ini sejak tahun 1928, sedangkan jenis olahraga lainnya berkembang sesudah perang kemerdekaan. Pembentukan organisasi olah raga ini selain bola kaki dan catur kebanyakan terjadi pada masa menjelang Pelita. Kegiatan kesenian sudah berkembang dan tumbuh pada masa sebelum Pelita. Jenis kesenian tradisional yang banyak berkembang di nagari ini adalah tor-tor yaitu menari sambil melagu yang diiringi dengan rebana, kesenian ini berasal dari daerah Tapanuli. Jenis kegiatan lainnya yang ditemui di daerah ini ialah mimbar adat, dikir, kasidah, marhaban, talempong, randai, dan kaba, yang berkembang di Sungai Aur.

Kegiatan olahraga dan kesenian pada masa sebelum Pelita kurang berkembang, terutama disebabkan kurangnya peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Di samping itu kehidupan dan tingkat pendapatan masyarakat juga masih rendah. Tetapi walaupun begitu semangat dan kemauan masyarakat sangat besar.

2. Desa Koto Baru Simalanggang, Koto Tengah Simalanggang, dan Taeh Baruh di Kabupaten 50 Kota.

Hasil seluruh anggota masyarakat daerah ini terdiri dari suku Minangkabau, dan agama yang dianut masyarakat adalah Islam. Penduduk daerah ini taat menjalankan ajaran agama. Tata pergaulan hidup di samping berlandaskan kepada ajaran agama juga kepada ajaran adat Minangkabau.

Penggunaan waktu dari warga masyarakat Koto Tengah Simalanggang, di samping bertani juga bekerja sambilan untuk menambah pendapatan yang dilakukan pada malam hari. Pekerjaan tersebut adalah menyulam, menjahit pakaian, dan kerajinan wanita lainnya. Di samping itu juga dilakukan pekerjaan anyam-anyaman seperti membuat karung dari mensiang dan menganyam bambu.

Di nagari Taeh Baruh masyarakat sering melakukan upacara tertentu pada musim panen seperti melakukan doa "Tolak Bala" dan kadang-kadang meratapi padi jika diserang hama. Kebiasaan ini dilakukan jauh sebelum masa Pelita, pada saat terakhir ini tidak begitu kelihatan lagi.

Kegiatan politik dan non politik disenangi oleh anggota masyarakat. Kegiatan olah raga dan kesenian pada masa sebelum Pelita terbentur pada sukarnya menyediakan alat dan perlengkapan, walaupun semangat masyarakat cukup tinggi. Di samping itu waktu untuk berolah raga juga tidak mengizinkan karena penduduk sibuk mencari nafkah.

3. Desa Balai Tengah, Tepi Selo, dan Tanjung Bonai di Kabupaten Tanah Datar.

Penduduk yang mendiami ketiga nagari ini adalah suku Minangkabau. Seluruh penduduk beragama Islam, dan taat menjalankan agama-agama terutama mereka yang telah tua. Generasi muda juga patuh menjalankan agama berkat bimbingan golongan tua. Peranan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabulah dapat mengendalikan tingkah laku "anak mudo" di nagari ini.

Perkembangan nilai dan perilaku golongan pemuda tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan pendidikan umum dan teknologi

modern. Dalam masa sebelum Pelita, perkembangan baru dalam tahap "demonstration effect" (kebiasaan mencontoh cara berkonsumsi dunia Barat). Sistem nilai dan perilaku yang diatur oleh adat dan agama berjalan bersamaan dengan sistem nilai dan perilaku yang berasal dari Barat. Keterbukaan orang tua menerima pandangan "anak mudo" yang telah berpendidikan memudahkan proses pengalihan perilaku.

Sebelum Pelita telah tumbuh potensi yang menentukan keberhasilan pembangunan yakni keinginan untuk maju, cara berpikir penduduk yang rasional dalam wadah kesatuan musyawarah mufakat. Orientasi ke masa depan itu dapat dilihat melalui ketekunan penduduk untuk berusaha sehingga waktu untuk istirahat hanya 20 – 25%. Walaupun penduduk giat berusaha tetapi mereka tidak melupakan mengadakan upacara adat seperti kelahiran, perkawinan dan kematian.

Upacara resmi seperti Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional, Kesaktian Pancasila, Hari Pahlawan, Sumpah Pemuda, Hari Kartini adalah merupakan hari yang selalu diperingati setiap tahun. Kenyataan ini menunjukkan bahwa rasa kebangsaan telah berkembang secara baik, yang tidak dapat dipisahkan dari pengalaman perjuangan merebut kemerdekaan. Daerah ini telah mengalami beberapa kali perjuangan, seperti pemberontakan belasting terhadap Belanda, pemberontakan melawan Jepang dan perjuangan merebut kemerdekaan, dimana daerah ini menjadi basis kekuatan Tentara Republik Indonesia.

Organisasi sosial dan ekonomi yang ada sebelum Pelita adalah organisasi koperasi, kewanitaan, keolahragaan, kepemudaan, kesenian, perdagangan dan pertanian, organisasi Muhammadiyah dan Aisyiah serta "Bundo Kandung". Alasan anggota masyarakat ikut serta dalam organisasi sosial dan ekonomi karena sadar akan manfaatnya. Sifat rasional merupakan pedoman bagi penduduk, dalam memilih tindakan disamping sistem nilai yang dianut.

Olahraga yang paling menonjol sebelum Pelita adalah Sepak bola dan Bola Volly dan kegiatan kesenian yang digemari adalah pencak silat dan menyanyi. Pada saat libur atau bulan Ramadhan para pemuda pelajar mengadakan malam kesenian untuk mengumpulkan dana buat kepentingan perbaikan sekolah dan lain-lain.

Bahkan para pemuda nagari ini yang bersekolah di SMTA dan Perguruan Tinggi telah berani membuka sebuah SMA Swasta. Mereka mengumpulkan dana buat membangun gedung dan membiayai guru pada tahun 1966. Hasil usaha mereka ini telah dikukuhkan pemerintah sesudah 10 tahun dengan mengukuhkan SMA Swasta tersebut menjadi sekolah Negeri yang berdiri sendiri. Sikap maju, ketekunan berusaha dengan memperhitungkan waktu serta berorientasi ke masa depan, menghargai dan mematuhi petuh orang tua, merupakan ciri pemuda di nagari ini. Perkembangan organisasi dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pada sistem nilai dan perilaku yang dianut oleh para pemuda.

BAB III

PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

A. LANDASAN PELAKSANAAN

Sebagai landasan pelaksanaan Pelita di Sumatera Barat di bidang Pemerintahan Desa terdapat tiga ketentuan atau pedoman hukum yaitu :

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 015/GSB/1968 tanggal 18 Maret 1968 mengenai Peraturan tentang Pokok Pemerintahan Nagari dalam Daerah Propinsi Sumatera Barat;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 155/GSB/1974 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari di Wilayah Daerah Tingkat II Sumatera Barat;
3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pokok Pemerintahan Desa.

Di samping landasan tentang Pemerintahan Nagari ini masih banyak Peraturan Daerah yang melandasi pelaksanaan Pelita ini di Sumatera Barat.

1. **Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 015/GSB/1968 mengenai Peraturan tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dalam Daerah Sumatera Barat.**

Sesudah pemberontakan G 30 S/PKI dan lahirnya Orde Baru, maka Sk Gubernur No. 2/Desa/GSB/Prt-1963 dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan. Oleh karena itu Gubernur Sumatera Barat berusaha menyusun Peraturan Pokok tentang Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat, tanggal 18 Maret 1968 Nomor 015/GSB/1968.

Dengan ditetapkannya SK Nomor 015 tersebut maka SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 02/Desa/GSB/Prt-1963 dicabut, dan sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari Pemerintah RI, ditetapkan peraturan tentang Pokok Pemerintahan Nagari dalam Daerah Propinsi Sumatera Barat.

Menurut SK Gubernur itu, alat Pemerintah Nagari terdiri dari :

- a. Wali Nagari.
- b. Dewan Perwakilan Nagari.
- c. Kerapatan Nagari.

Wali Nagari bersama dengan Dewan Perwakilan Nagari merupakan Pemerintahan Nagari, sedangkan Kerapatan Nagari adalah peradilan Agama dan Adat, serta Penasehat Nagari (*judicative and consultative body*). Dalam SK Gubernur itu pengertian Nagari dinyatakan sebagai berikut :

”Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum di daerah Propinsi Sumatera Barat yang menjadi dasar dari Negara Republik Indonesia yang tertentu batas daerahnya, mempunyai harta benda sendiri, berhak mengatur rumah tangganya dan memilih penguasanya.

Di dalam SK Gubernur itu ditegaskan pula tugas kewajiban Pemerintah Nagari, di mana dalam pasal 4 dinyatakan bahwa Tugas dan Kewajiban Pemerintahan Nagari meliputi aspek yang luas dan menyeluruh, yaitu :

- a. Bidang Pemerintahan Umum dan Keamanan serta Ketertiban Umum (ayat 1 huruf a, b, dan g).
- b. Bidang Ekonomi Sosial dan Kebudayaan (ayat 1 huruf a, d, dan h).
- c. Pelaksanaan dan pembinaan Demokrasi secara menyeluruh (ayat 1 huruf d).
- d. Pemeliharaan dan peningkatan potensi Nagari sebagai suatu unit Pemerintahan (ayat 1 huruf f).

Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari dan DPR Nagari sedangkan kerapatan Nagari tidaklah merupakan unsur Pemerintahan Nagari. Kerapatan Nagari merupakan Badan Permusyawaratan dari Pemuda Masyarakat di Nagari, yang tugasnya melaksanakan per-

adilan di bidang adat dan agama serta memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Pemerintahan Nagari (pasal 30 jo pasal 2 ayat 3). Pembentukan badan ini dimaksudkan untuk dapat menghimpun seluruh potensi masyarakat, sehingga tidak ada sesuatu potensipun yang terdapat di Nagari yang tidak ikut serta dalam kegiatan Pemerintahan dan Sosial.

Wali Nagari dan DPRN dibentuk berdasarkan hasil pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Penetapan Wali Nagari dan DPRN melalui pemilihan umum ini didasarkan kepada pertimbangan bahwa penggunaan hak pilih di Nagari akan merupakan latihan politik bagi rakyat untuk penggunaan hak pilihnya untuk memilih lembaga yang lebih tinggi. Jumlah anggota DPRN didasarkan atas pertimbangan jumlah penduduk, 1.000 orang penduduk satu wakil dengan jumlah 10 orang dan maksimum 20 orang.

Di samping lembaga tersebut di atas, diintrodusir pula suatu lembaga baru yang dinamakan "Rapat Nagari", yang diadakan sekali setahun untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk secara langsung berhubungan dengan Pemerintahan Nagari, Pemerintahan Nagari menyampaikan laporan pekerjaan tahun yang lalu, menjelaskan rencana kerja tahun yang akan datang dan menampung kritik dan hasrat rakyat nagari.

Rapat nagari diarahkan dalam rangka pembinaan demokrasi dalam kehidupan masyarakat, dengan adanya sosial kontrol yang langsung dan efektif dapat meningkatkan kecerdasan politik rakyat. Wali nagari adalah salah satu alat perlengkapan nagari yang utama, karena ia memegang Pimpinan Pemerintahan Nagari, mewakili nagari di dalam dan di luar pengadilan dan karena jabatannya menjadi Ketua Kerapatan Nagari.

Wali Nagari ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masa empat tahun, melalui proses pemilihan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pancasila,
- b. Tidak terlibat dalam pemberontakan G 30 S/PKI,
- c. Tidak pernah menjadi anggota PKI atau ormas yang bernaung di bawahnya,
- d. Tidak sedang dipecat dari hak memilih atau dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi,

- e. Tidak pernah dihukum karena perkara pidana,
- f. Mempunyai pengalaman dalam memimpin masyarakat,
- g. Mempunyai program dan rencana tentang pembangunan nagari,
- h. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Dasar,
- i. Sekurang-kurangnya berumur 25 tahun,
- j. Menjadi penduduk nagari yang bersangkutan.

Salah satu syarat penting yang diintrodusir dalam pasal 8 ini adalah syarat f dan g, yang dimaksudkan untuk mewujudkan Pemerintahan Nagari yang sanggup melaksanakan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Wali Nagari dibantu oleh Kepala Jorong, yang merupakan bagian nagari sedangkan dalam penyelenggaraan administrasi, Wali Nagari dibantu oleh Sekretaris Nagari yang merangkap pula menjadi Sekretaris DPRN dan Kerapatan Nagari. Pelaksanaan Pemerintahan Jorong dilakukan dengan memindahkan kedudukan Penghulu atau Kepala Kaum menurut adat kebiasaan yang berlaku. Wali Nagari bertanggungjawab kepada DPRN tentang penyelenggaraan rumah tangga nagari dan perbantuan, sedangkan dalam bidang pelaksanaan tugas atasan, ia bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Nagari ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil Pemilihan Umum di Nagari dan harus memenuhi syarat yang sama dengan persyaratan pemilihan Wali Nagari (pasal 20 jo 8).

Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota DPRN, untuk masa jabatan empat tahun atau sama dengan masa jabatan anggota DPRN. Anggota DPRN tidak boleh merangkap menjadi Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Pimpinan Harian Kerapatan Nagari dan pejabat lain yang bertanggung jawab mengenai keuangan nagari.

DPRN berwenang untuk menetapkan anggaran keuangan nagari dan Peraturan Nagari untuk mengurus rumah tangga sendiri, melaksanakan peraturan perundangan yang pelaksanaannya dibebankan kepada nagari, menetapkan sanksi setinggi-tingginya 10p hari kerja atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,- terhadap pelanggaran peraturan nagari.

Di samping mengatur alat perlengkapan nagari dan Lembaga Kerapatan Nagari, SK Gubernur KDH Propinsi Sumatera Barat No.

015/GSB/1968 juga mengatur tentang penggunaan sumber kekayaan nagari, gotong royong, Lumbang Pitih, dan pasar serta pengawasan, pembinaan dan koordinasi perselisihan pemerintahan serta kerjasama dan penggabungan nagari.

2. Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat Nomor 155/GSB/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari di Wilayah Daerah Tingkat II Sumatera Barat.

Dalam rangka penyempurnaan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 015/GSB/1968, pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat telah melakukan berbagai usaha seperti mengadakan Seminar Desa, melakukan penelitian Pemerintahan Nagari dan mengevaluasi Pemerintahan Nagari dan usaha lainnya.

Atas dasar hasil kegiatan tersebut Gubernur Sumatera Barat telah menetapkan SK Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat No. 155/GSB/1974. Di dalam Surat Keputusan ini Alat Perlengkapan Nagari disederhanakan menjadi Wali Nagari dan Kerapatan Nagari yang secara bersama-sama merupakan Pemerintahan Nagari.

Pemerintahan Nagari dibantu oleh Sekretariat Nagari Pembantu Wali Nagari dan Kepala Jorong. Dengan demikian Lembaga DPRN (yang dibentuk berdasarkan Pemilihan Umum) ditiadakan. Di dalam struktur ini tugas DPRN yang lama dilaksanakan oleh Kerapatan Nagari, sehingga dengan demikian Kerapatan Nagari bukan lagi sebagai Badan Peradilan dan Badan Penasehat, tetapi berfungsi sebagai salah satu unsur Pemerintahan Nagari.

Kerapatan Nagari adalah Lembaga Musyawarah untuk mufakat dari pemuka masyarakat yang dipandang patut dan terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai yang mewakili Kepemimpinan Suku dan Kepala Jorong. Jumlah anggota Kerapatan Nagari disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing nagari (pasal 14). Ketua Kerapatan Nagari dijabat oleh Wali Nagari karena jabatannya.

Wakil Ketua Kerapatan Nagari terdiri dari Wakil Ketua Bidang Adat, Bidang Agama dan Bidang Umum, yang membantu Wali Nagari/Ketua Kerapatan Nagari dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Kerapatan Nagari antara lain berwenang untuk memutuskan hal yang berhubungan dengan :

- a. Perhitungan anggaran pendapatan dan belanja nagari.
- b. Pajak dan penghasilan nagari.
- c. Perusahaan nagari.
- d. Fungsi dan harta benda milik nagari serta pinjaman nagari.
- e. Penghapusan tagihan.
- f. Penyelesaian perkara perdata secara damai di mana nagari menjadi satu pihak.
- g. Penerimaan dan pelantikan anggota baru.

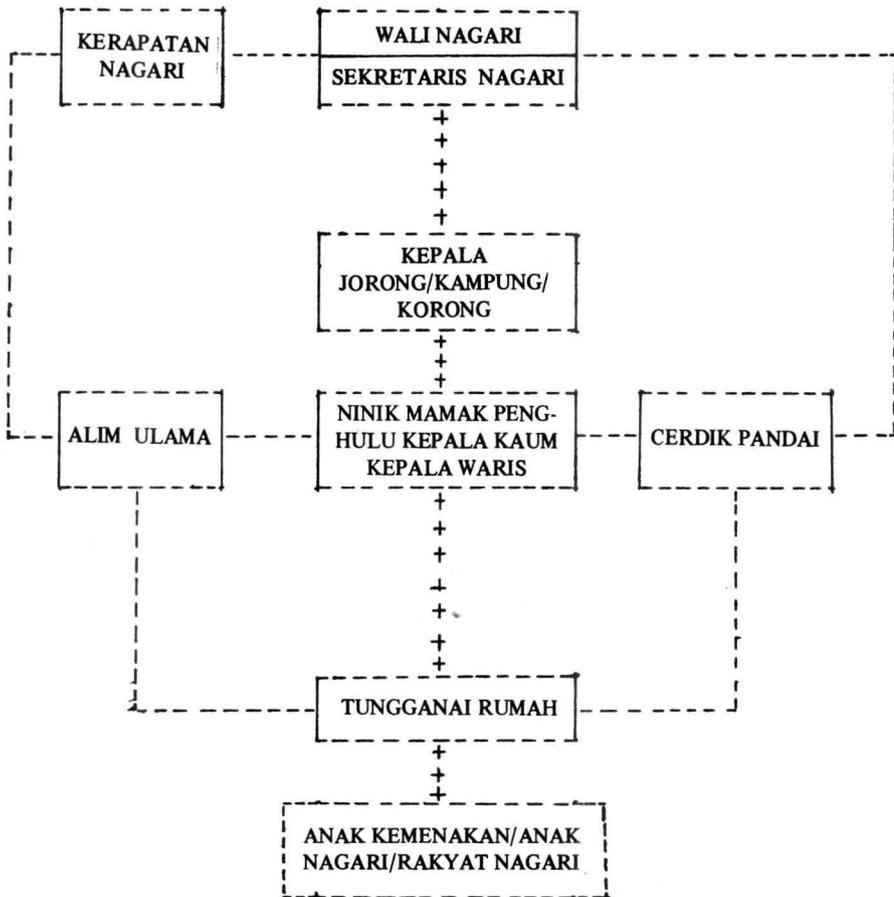
Rapat dari Kerapatan Nagari terbuka untuk umum, dan dapat juga dilakukan secara tertutup jika dipandang perlu oleh Ketua atau sekurang-kurangnya satu kali dalam enam bulan atas panggilan pimpinan.

Wali Nagari memegang pimpinan Pemerintahan Nagari dan bertanggungjawab kepada Kerapatan Nagari dalam pelaksanaan urusan rumah tangga nagari, sedangkan dalam bidang pelaksanaan tugas pemerintahan atasan Wali Nagari bertanggungjawab kepada Bupati KDH Tingkat II. Wali Nagari diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan pemilihan dan diangkat untuk masa jabatan lima tahun. Wali Nagari mewakili nagari di dalam dan di luar peradilan.

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, Wali Nagari dibantu oleh pembantu Wali Nagari dan Kepala Jorong. Pembantu Wali Nagari yaitu pejabat yang disertai Wali Nagari memimpin pelaksanaan urusan tertentu dalam bidang Pemerintahan Nagari. Kepala Jorong adalah Kepala Resort Administratif yang merupakan bagian dari nagari. Pelaksanaan pemerintahan oleh Kepala Jorong dilakukan dengan mengindahkan kedudukan Penghulu atau Kepala Kaum menurut adat kebiasaan setempat. Kepala Jorong diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nagari dengan mengindahkan adat kebiasaan setempat dan setelah lebih dulu mendengar Kerapatan Nagari. Dalam menjalankan tugas kewajibannya Kepala Jorong bertanggungjawab kepada Wali Nagari.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN NAGARI

(menurut S.K. Gubernur Sumatera Barat No. 155/GBSB/1974)



KETERANGAN :

+++++++ = garis komando (kepemimpinan)

..... = garis koordinasi (musyawarah)

Perlu pula dikemukakan bahwa dalam SK Gubernur Sumatera Barat No. 155/GSB/1974 juga diatur tentang pelaksanaan dan pembinaan otonomi nagari antara lain tentang :

- a. Sumber keuangan dan Anggaran Pendapatan Nagari.
- b. Harta benda dan perusahaan nagari.
- c. Lumbung Pith Nagari.
- d. Gotong royong anak nagari.
- e. Keamanan, Kebersihan dan Keindahan Nagari.
- f. Pembinaan Partisipasi Masyarakat.
- g. Klasifikasi dan kegiatan pembangunan nagari.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 disusun anantara lain berdasarkan latar belakang pemikiran :

- a. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1965 tentang Desa Praja tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan karenanya perlu diganti.
- b. Sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan Pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif.
- c. Dipandang perlu segera mengatur bentuk dan susunan pemerintahan desa dalam suatu undang-undang yang dapat memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat yang berazaskan Demokrasi Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 ditentukan dua klasifikasi organisasi pemerintahan terendah yaitu Desa dan Kelurahan. Sesuai dengan azas keseragaman di dalam undang-undang ini ditentukan defenisi Desa dan Kelurahan sebagai berikut :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya ke-

satuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

- b. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Berkenaan dengan hak menyelenggarakan rumah tangga desa dalam penjelasan umum undang-undang itu dinyatakan bahwa hak tersebut bukanlah hak otonomi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Penduduk Kelurahan bukan merupakan masyarakat hukum dan tidak berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Di bawah Desa dan Kelurahan masing-masing terdapat Dusun dan Lingkungan yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa/Kelurahan.

Dalam pasal 3 Undang-undang tentang Pemerintahan Desa dinyatakan bahwa Pemerintahan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Desa
- b. Lembaga Musyawarah Desa (LMD).

yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa, yang terdiri dari :

- a. Sekretariat Desa.
- b. Kepala-Kepala Dusun.

Susunan organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan dan mengindahkan adat istiadat yang berkembang dan berlaku di daerah setempat. Kepala Desa dipilih secara langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh penduduk desa yaitu WNI yang telah berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau telah kawin. Pendidikan minimal berijazah SLP atau berpendidikan dan berpengalaman sederajat dengan itu.

Kepala Desa diangkat oleh Bupati atas nama Gubernur di antara calon-calon terpilih. Masa jabatannya delapan tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dalam melaksanakan hak wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa, Kepala Desa bertanggung jawab kepada Pejabat yang berwenang mengangkatnya melalui Camat dan memberikan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa dan Kepala Dusun. Sekretaris Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dan menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa sehari-hari apabila Kepala Desa berhalangan, sedangkan Kepala Dusun adalah unsur pelaksana tugas Kepala Desa dengan wilayah kerja tertentu. Sekretaris Desa adalah unsur Staf dari Kepala Desa yang membantu Kepala Desa. Alat perlengkapan Kepala Desa di samping Kepala Desa adalah Lembaga Musyawarah Desa.

Lembaga Permusyawaratan dan Permusyawaratan yang anggotanya terdiri dari Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan, Pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan. Kepala Desa karena jabatannya menjadi Ketua Lembaga Masyarakat Desa, sedangkan Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Sekretaris Lembaga Masyarakat Desa.

Menurut Pasal 23 Undang-Undang ini, Pemerintahan Kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan. Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretariat Kelurahan dan Kepala Lingkungan. Kepala Kelurahan adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Bupati atau Walikota/madya atas nama Gubernur. Dalam menjalankan tugas dan wewenang Pimpinan Pemerintahan Kelurahan, Kepala Kelurahan bertanggungjawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat.

Perangkat Kelurahan terdiri dari:

- a. Unsur Staf (Sekretariat Kelurahan).
- b. Unsur Pelaksana (Kepala Lingkungan).

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan Desa dan pemerintahan Kelurahan dilakukan oleh Bupati atau Walikota/madya.

Tiga jenis ketentuan hukum telah mengatur Pemerintahan Desa selama Pelita di bidang pemerintahan. Selain dari itu masih banyak

peraturan Daerah dan Surat Keputusan Gubernur dan Bupati yang dijadikan sebagai landasan pelaksanaan Pelita di daerah di bidang Pemerintahan Desa, termasuk Peraturan yang berhubungan dengan perekonomian masyarakat, pajak, dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bersangkutan.

Selama ini telah diputuskan sebanyak 45 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman dari tahun 1969 sampai dengan 1981. Perincian dan jumlah peraturan tersebut adalah :

Jenis Peraturan/ Surat Keputusan	Kab. Pasaman	Kab. 50 Kota
a. Pajak	6 Peraturan/SK	16 Peraturan/SK
b. Perumahan/Bangunan	1 Peraturan/SK	6 Peraturan/SK
c. Izin Perusahaan	2 Peraturan/SK	2 Peraturan/SK
d. Perdagangan	2 Peraturan/SK	4 Peraturan/SK
e. A P B N	17 Peraturan/SK	14 Peraturan/SK
f. Pemakaian Jalan	2 Peraturan/SK	1 Peraturan/SK
g. Retribusi Pasar	1 Peraturan/SK	6 Peraturan/SK
h. Retribusi Perusahaan	4 Peraturan/SK	6 Peraturan/SK
i. Kartu Tanda Penduduk (KTP)	1 Peraturan/SK	1 Peraturan/SK
j. Keuangan	2 Peraturan/SK	4 Peraturan/SK
k. Organisasi dan Tata Kerja	2 Peraturan/SK	10 Peraturan/SK
l. Retribusi Pemeliharaan Ternak	– Peraturan/SK	2 Peraturan/SK
m. APB Nagari	– Peraturan/SK	80 Peraturan/SK
n Lain-lain	5 Peraturan/SK	8 Peraturan/SK

Tidak semua Keputusan Gubernur yang menyangkut Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan dapat ditemukan. Keputusan Gubernur tentang Ketentuan Alokasi, Penggunaan, Penyaluran dan Pertanggungjawab Bantuan Pembangunan Desa per Nagari dalam Daerah Sumatera Barat dapat dilihat pada bagian lampiran.

B. PELAKSANAAN PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA.

Pelaksanaan Pelita di bidang pemerintahan desa umumnya tidak berbeda antara satu nagari dengan nagari lainnya, walaupun klasifikasi nagari berbeda seperti Ujung Gading sebagai Desa Swasembada, Sungai Aur sebagai Desa Swakarya dan Muara Kiawai sebagai Desa Swadaya. Dikemukakan demikian karena ketentuan pokok yang mengatur Pemerintahan nagari tersebut berasal dari sumber yang sama dan keadaan sosial budaya masyarakat yang tidak jauh berbeda.

Surat Keputusan Gubernur No. 015/GSB/1968 tanggal 18 Maret 1968 ini pada permulaan berlakunya belum lagi dalam masa Pelita. Surat Keputusan ini telah disesuaikan dengan masa Orde Baru dan disesuaikan pula dengan adat dan sistem masyarakat setempat. Sambil menunggu keputusan lebih lanjut dari Pemerintah Republik Indonesia ditetapkan peraturan tentang Pokok Pemerintahan Nagari dalam daerah Propinsi Sumatera Barat dan berlaku sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 155/GSB/74 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.

Surat Keputusan Gubernur yang baru ini lebih demokratis dan rasional seperti pengangkatan Kepala Nagari melalui proses pemilihan dengan memenuhi syarat tertentu seperti berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pancasila, mempunyai pengalaman dalam memimpin masyarakat dan mempunyai program serta rencana pembangunan Nagari. Pelaksanaan Keputusan Gubernur di Bidang Pemerintahan Desa ini tidak mendapat hambatan di daerah pedesaan Sumatera Barat.

Dalam rangka penyempurnaan Surat Keputusan Gubernur No. 015YGSB/1968 tersebut dilakukan pula berbagai usaha oleh Pemerintah Daerah. Implikasi dari usaha tersebut adalah ditetapkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat No. 155/GSB/1974. Dalam Surat Keputusan ini alat perlengkapan Nagari disederhanakan menjadi Wali Nagari dan Kerapatan Nagari yang secara bersama-sama merupakan Pemerintah Nagari. Di samping itu diatur pula tentang pembentukan Lumbung Pitih Nagari dan Perusahaan Nagari yang besar artinya dalam pengembangan Nagari sebagai suatu unit sosial ekonomi sehingga kesempatan pemerataan

pembangunan dan hasilnya melalui Bantuan Desa, Inpres, BUUD/KUD dan lain-lain semakin lama semakin dirasakan manfaatnya.

Dalam pelaksanaan di desa Keputusan Gubernur No. 155/GSB/1974 ini pun berjalan lancar. Tidak saja proses pemilihan Wali Nagari yang selanjutnya diangkat oleh Gubernur, tetapi juga dalam memberikan tanggung jawab kepada Kerapatan Nagari dalam hal urusan rumah tangga nagari dan sebagai pelaksana tugas dari atasan yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Keputusan Gubernur No. 155/GSB/1974 berada dalam Pelita Kedua. Sampai dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Nomor 155/GSB/1974 itu berjalan lancar. Kerapatan Nagari yang merupakan lembaga musyawarah untuk mufakat dan beranggotakan Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai dan Kepala Jorong telah terbentuk dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Dalam masa inti terjadi pemekaran Desa atau penambahan jumlah Desa di Sumatera Barat dari 453 buah menjadi 3.516 buah melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17/77, No. 379/66, No. 152/1978 dan No. 155/1979. Dalam pelaksanaan Surat Keputusan ini yang tidak terdapat hambatan dan masalah yang berarti. Tetapi Undang-Undang itu belum dapat dilaksanakan seluruhnya karena belum adanya Peraturan Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Daerah tersebut antara lain tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan Perangkat Desa. Begitu juga tentang pemilihan dan tata cara pencalonan Kepala Desa, Kedudukan keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun. Di samping itu juga belum ada Peraturan Daerah tentang pendapatan dan kekayaan desa, syarat pengangkatan Kepala Dusun, keputusan desa, serta beberapa hal yang berhubungan dengan Kelurahan seperti pengesahan dan pembatalan keputusan desa.

Namun pada masa peralihan ini telah ada pedoman tentang ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang ini yaitu istilah yang lain dari Desa/Kelurahan dinyatakan sebagai Desa/Kelurahan. Istilah Kepala Desa/Kelurahan yang memenuhi

syarat dinyatakan sebagai Kepala Desa/Kelurahan. Selain dari itu segala peraturan peundangan yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini tetap berlaku. Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1980 dinyatakan bahwa Jorong di Sumatera Barat termasuk Desa menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979.

C. HASIL YANG DIPEROLEH

1. Bidang Pemerintahan Desa.

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat tentang Pokok Pemerintahan Nagari dalam masa Orde Baru serta ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa maka tidak sedikit hasil yang diperoleh dalam memperkuat pemerintahan desa dan meningkatkan kemampuan menggerakkan masyarakat untuk pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang makin meluas dan efektif. Sistem pemerintahan yang ditetapkan dapat diterima oleh masyarakat pedesaan karena disusun dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku di sesuatu daerah.

Pimpinan Pemerintahan Desa semakin meningkat kewibawaannya karena pengangkatannya didasarkan atas pemilihan dan calon yang terpilih benar-benar mendapat dukungan masyarakat. Di samping itu Kepala Desa/Wali Nagari itu benar-benar dipilih dari mereka yang memiliki jiwa kepemimpinan dan berwibawa serta mempunyai program dalam pengembangan dan pembangunan desa bersangkutan.

Pelaksanaan tugas pemerintah nagari telah semakin baik dan pelaksanaan kegiatan administrasi telah semakin lancar pula. Perlengkapan Nagari seperti Wali Nagari dan Kerapatan Nagari atau Lembaga Musyawarah nagari yang merupakan pemerintahan Nagari telah berfungsi dan menjalankan tugasnya secara mantap.

2. Bidang Pembangunan Lainnya.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang mental spiritual adalah semakin terbukanya masyarakat terhadap pembaharuan seperti diterima dan dilaksanakannya mekanisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi di bidang pertanian. Digunakannya bibit-bibit unggul, pupuk buatan, dan perluasan areal pertanian secara berencana dan terarah. Di samping itu juga telah dicoba secara bertahap pemakaian mesin pertanian walaupun dalam jumlah yang kecil.

Di bidang pemerintahan hasil yang telah dicapai adalah makin berfungsinya lembaga Pemerintahan desa yang ada dan terpolanya kegiatan aparatur pemerintahan di pedesaan dari tahun ke tahun. Administrasi pemerintahan pun telah semakin mantap dan meningkat pula wibawanya di daerah ini.

Keberhasilan pembangunan ini tidak saja di bidang pemerintahan tetapi juga di bidang lainnya seperti ekonomi, agama, sosial budaya serta pertahanan keamanan. Keberhasilan pembangunan adalah atas inisiatif dan partisipasi masyarakat serta bantuan Pemerintah Pusat atau Daerah berupa dana, fasilitas, perlengkapan, dan tenaga melalui proyek pembangunan atau kegiatan lain.

Hasil pembangunan sejak Pelita I sampai dengan Pelita III, adalah sebagai berikut :

- a. Desa Ujung Gading, Sungai Aur, dan Muara Kiawai di Kabupaten Pasaman.

Hasil pembangunan di bidang pertanian sudah cukup banyak sejak Pelita I sampai tahun kedua Pelita III. Keberhasilan di bidang pertanian mendorong laju pembangunan dan penambahan pendapatan masyarakat Ujung Gading, Sungai Aur dan Muara Kiawai serta berpengaruh positif terhadap masyarakat daerah lainnya secara tidak langsung.

Perincian hasil yang telah dicapai di bidang pembangunan pertanian ini dapat dilihat dalam Tabel III. 1 di bawah ini :

Tabel III.1 SASARAN YANG DICAPAI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PERTANI-AN PADA DESA UJUNG GADING, SUNGAI AUR DAN MUARA KIAWAI DALAM KECAMATAN LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN SELAMA PELITA I S/D TAHUN KEDUA PELITA III.

No.	Nagari/Desa Macam Kegiatan Proyek	Jumlah	Keterangan
A. Ujung Gading			
1.	Penambahan Areal per sawahan intensifikasi	80 ha	Dari tadah hujan menjadi pengairan pedesaan (sawah Intensifikasi).
2.	Pembuatan saluran irigasi sederhana	600 m	Kegiatan dilaksanakan dengan swadaya masyarakat.
3.	Perbaikan pengairan saluran primer dan beronjong tanggul.	800 m	Dilaksanakan oleh dinas PU dibantu swadaya . .
4.	Peningkatan produksi padi Bimas Inmas	315 ha	Pelaksanaan intensifikasi dari musim tanam 1976 s/d musim tanam 1980.
5.	Peningkatan dan penambahan areal tanaman buah-buahan.	200 ha	Berupa tanaman jeruk dan rambutan.
6.	Pelaksanaan demonstrasi Plot dan Denplot PPL	18 unt	Percobaan pemupukan dan pemberantasan H dan P, serta bibit unggul dan lain-lain.
B. Sungai Aur			
1.	Pembuatan saluran pengairan sederhana	1.400 m	Swadaya panitia setempat.
2.	Penambahan areal sawah intensifikasi	15 ha	Kegiatan tahun 1979/1980 tanah hujan jadi pengairan.

3.	Pelaksanaan Denplot, Denplot PPL	12 unt	Demonstrasi pemupukan dan pemberantasan hama dan penyakit.
4.	Penambahan Kios Saprodi	1 bh	Untuk kelancaran penyaluran pupuk dan obat-obatan.
C. Muara Kiawai.			
1.	Penambahan Kios Saprodi	1 bh	Untuk kelancaran penyaluran.
2.	Pelaksanaan Denplot PPL	4 unt	Penterapan Panca Usaha.
3.	Penggalian saluran pengairan sederhana.	700 unt	Swadaya petani setempat
4.	Penanaman buah-buahan	20 ha	Jeruk dan rambutan.

Pembangunan dan perbaikan irigasi tidak hanya dalam bentuk pembuatan kepala bandar dan saluran irigasi biasa tetapi juga pembangunan pengairan yang cukup besar. Dalam gambar di bawah ini dapat dilihat pembangunan irigasi yang cukup besar pengaruhnya terhadap pengembangan pertanian dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat setempat.

Keberhasilan pembangunan selama Pelita mencakup pembangunan fisik maupun mental spritual. Berkembangnya pembangunan itu berkat adanya bantuan berupa dana, fasilitas, dan tenaga dari pemerintah melalui Pelita Nasional, Pelita Daerah, bantuan pembangunan Dati I Sumatera Barat maupundari dana pembangunan APBD Kabupaten. Pembangunan itu berhasil berkat partisipasi masyarakat setempat dalam bentuk kerja gotong royong atas kesadaran warga masyarakat setempat.

Dana pembangunan yang telah diberikan kepada ketiga desa ini sebesar Rp. 35.156.000,- sejak Pelita I sampai dengan sekarang yang dipergunakan pembangunan pendidikan, rumah ibadah, gedung kantor, kesehatan, dan pengembangan olahraga kesenian masyarakat serta sektor lainnya. Dalam Tabel III.2 sampai dengan Tabel III.2 sampai dengan Tabel III.3 dapat dilihat jenis proyek, dana yang dialokasikan, dan sasaran yang dicapai dalam usaha pembangunan setiap nagari penelitian yang sulit hubungannya.

Masih banyak lagi dana yang telah diinvestasikan di ketiga nagari ini selama Pelita berlangsung, meliputi proyek Pembangunan dan Rehabilitasi, Jalan dan Jembatan. Di samping itu juga investasi yang menyangkut pemberantas hama dan penyakit tanaman, pembinaan Hansip Wanra, Pengembangan Kesenian, Penataran Ninik Mamak dan Alim Ulama serta Pembinaan Generasi Muda.

TABEL III. 2 PROYEK PEMBANGUNAN DI DESA SWASEMBADA UJUNG GADING KECAMATAN LEMBAH MELINTANG SEJAK PELITA I S/D PELITA II.

No.	Nama Proyek	Tahun	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	I. PELITA NASIONAL			
	A. Pelita I			
1.	Bidang Sosial			
a.	Rehabilitasi/upgrading SLTA, SLTP, SD	1970/71 1972/73	100.000,- 62.500,-	ST Ujung Gading SD Ujung Gading
b.	Rehabilitasi/upgrading mesjid	1971/72	100.000,-	Mesjid U. Gading
	B. Pelita II			
1.	Pembangunan gedung Kantor Camat Lembah Melintang	1975/76	12.000.000,-	-
2.	Pembangunan Gedung SMP	1977/78	5.500.000,-	Membangun baru 2 (dua) lokal SMP Ujung Gading.

II. BANTUAN PEMBANGUNAN DATI I SUMATERA BARAT				
A. Pelita II				
1.	Rehabilitasi mesjid	1974/75	100.000,-	Satu unit
2.	Mes. Pemma	1974/75	970.000,-	Sda
3.	Rehabilitasi mesjid	1975/76	250.000,-	Sda
4.	Rehabilitasi mesjid	1976&77	200.000,-	Sda
5.	Alat Olahraga	1976/77	100.000,-	Sda
6.	Alat musik	1976/77	100.000,-	Sda
7.	Rehabilitasi Pasenggarahan	1976/77	2.500.000,-	sda
8.	Alat olahraga	1977/78	32.500,-	*) 1/3 unit
9.	Rehabilitasi mesjid	1978/79	200.000,-	Dua unit
10.	Rehabilitasi mesjid	1978/79	200.000,-	sda
11.	Rehabilitasi SD	1978/79	200.000,-	sda
12.	Pembinaan Genrasi Muda	1978/79	52.000,-	*) 1/3 unit
III. PEMBANGUNAN APBD TINGKAT II PASAMAN				
A. Pelita II				
1.	Rehabilitasi SMA Ujung Gading	1974/75	150.000,-	Satu unit
2.	Rehabilitasi ST Ujung Gading	1974/75	50.000,-	sda
3.	Rehabilitasi TK Ujung Gading	1974/75	100.000,-	sda
4.	Rehabilitasi TK Ujung Gading	1976/77	50.000,-	sda
5.	Rehabilitasi SD Ujung Gading	1976/77	45.000,-	sda
6.	Rehabilitasi SD Ujung Gading	1976/77	45.000,-	sda
7.	Rehabilitasi KUA Ujung Gading	1976/77	75.000,-	sda
8.	Rehabilitasi ST Ujung Gading	1978/79	500.000,-	sda
9.	Pembelian alat mobiler Kantor Camat Ujung Gading	1978/79	143.850,-	sda
IV. BANTUAN SARANA KE-SEHATAN				
A. Pelita II				
1.	Rehabilitasi Puskesmas	1975/76	1.000.000,-	Satu unit
2.	Proyek Pembangunan Rumah Dokter	1976/77	2.100.000,-	sda
J u m l a h			26.925.850,-	

Catatan : *) Jumlah biaya diperkirakan.

Sumber : Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman tahun 1981.

TABEL III.3. PROYEK PEMBANGUNAN DI DESA SWAKARYA SUNGAI AUR KECAMATAN LEMBAH MELINTANG SEJAK PELITA I S/D PELITA II.

No.	Nama Proyek	Tahun	Biaya (Rp.)	Keterangan
	I. PELITA NASIONAL			
	A. Pelita I			
1.	Bidang Ekonomi – Rehabilitasi/upgrading irigasi	1971/72	350.000,-	200 ha
2.	Bidang Sosial – Rehabilitasi/upgrading SLTA, SLTP, SD	1970/71	200.000,-	SMEP Sei Aur
		1970/71	150.000,-	SD No. 1
		1971/72	250.000,-	SD
		1972/72	62.500,-	SD
	II. BANTUAN PEMBANGUNAN DARI I SUMATERA BARAT			
	A. Pelita II			
1.	Rehabilitasi SD	1974/75	140.000,-	Satu unit
2.	Rehabilitasi SD	1975/76	250.000,-	Satu unit
3.	Alat Olahraga	1977/78	32.500,-	1/3 unit
4.	Pembinaan Generasi Muda	1978/79	51.400,-	1/3 unit
	III. PEMBANGUNAN APBD TINGKAT II PASAMAN			
	A. Pelita II			
1.	Rehabilitasi TK Sungai Aur	1976/77	45.000,-	Satu unit
	Jumlah		1.531.500,-	

Catatan : @) Jumlah biaya diperkirakan.

Sumber : Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman tahun 1981.

TABEL III.4. PROYEK PEMBANGUNAN DI DESA SWADAYA MUARA KIAWAI KECAMATAN LEMBAH MELINTANG SEJAK PELITA I S/D PELITA II.

No.	Nama Proyek	Tahun	Biaya (Rp.)	Keterangan
I. PELITA NASIONAL				
A. Pelita I.				
1.	Bidang Ekonomi	1970/71	250.000,-	300 ha
2.	Bidang Sosial			
	a. Rehabilitasi/upgrading SLTA, SLTP, SD	1972/73	62.500,-	SD Muara Kiawai
	b. Rehabilitasi/upgrading Mesjid	1972/73	100.000,-	Mesjid Muara Kiawai.
B. Pelita II				
1.	Rehabilitasi Jembatan	1977/78	5.996.150,-	Jembatan Kasiak Putih
II. BANTUAN PEMBANGUNAN DATI I SUMATERA BARAT				
A. Pelita II				
1.	Rehabilitasi mesjid	1977/78	200.000,-	Satu unit.
2.	Alat olahraga	1977/78	32.500,-	1/3 Unit
3.	Pembinaan Generasi Muda	1978/79	51.500,-	1/3 Unit
J u m l a h			6.692.650,-	

Catatan : @) Jumlah biaya diperkirakan.

Sumber : Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasaman tahun 1981.

Beberapa foto dokumentasi yang menyangkut prasarana pemerintahan seperti gedung kantor Kepala Nagari, Mesjid, Puskesmas, Sarana Transfortasi, Proyek Pasar, Kantor Pemerintah seperti Kantor Departemen P dn K Kecamatan yang sampai saat ini masih terus ditingkatkan pembangunannya.

Di samping meningkatnya hasil pertanian bidang kesehatan dan kesegaran jasmani masyarakat, serta pendidikan, terlihat pula peningkatan hasil pembangunan yang cukup menggembirana. Peningkatan itu tidak saja dalam pendidikan formal tetapi juga menyangkut pendidikan luar sekolah termasuk pembinaan generasi muda.

Di bidang pendidikan formal terutama Sekolah Dasar jauh meningkat angka partisipasi pendidikan dan pemerataan pendidikan bagi seluruh anak umur sekolah sampai ke pelosok. Pendidikan tingkat menengah juga semakin meningkat.

Sebagai indikator dalam tabel di bawah ini dapat dilihat angka partisipasi pendidikan baik SD maupun SLTP/SLTA pada ketiga nagari menurut keadaan tahun 1981.

TABEL III.5 INDIKATOR PENDIDIKAN DI DESA/NAGARI UJUNG GADING, SUNGAI AUR DAN MUARA KIAWAI DI KABUPATEN PASAMAN MENURUT KEADAAN SEBELUM DAN SESUDAH PELITA.

No.	Indikator Pendidikan	Ujung Gading		Sungai Aur		Muara Kiawai	
		Sebelum Pelita (1968)	Sesudah Pelita (1980)	Sebelum Pelita (1968)	Sesudah Pelita (1980)	Sebelum Pelita (1968)	Sesudah Pelita (1980)
1.	Angka pastisipasi SD (NER)	42,88%	90,51%	50.64%	86.52%	36,95%	77,12%
2.	Lulusan SD yang dapat ditampung di SLTP	52.06%	79,39%	12%	40%	—	—
3.	Lulusan SLTP yang dapat ditampung di SLTA	29,93%	78.21%	—	—	—	—

Untuk beroleh gambaran yang lebih jelas tentang jumlah murid, kelas, ruang belajar, dan guru pada SLTP dan SLTA di ketiga nagari ini dapat dilihat dalam Tabel III.6 di bawah ini.

TABEL III-6 JUMLAH SEKOLAH, MURID, KELAS, RUANG BELAJAR, DAN GURU PADA SD, SLTP, DAN SKTA DI NAGARI UJUNG GADING, SUNGAI AUR, DAN MUARA KIAWAI KECAMATAN LEMBAH MELINTANG KABUPATEN PASAMAN TAHUN 1981.

No.	Jenis/Tingkat Pendidikan	Ujung Gading		Sungai Aur		Muara Kiawai	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1	2	3	4	5	6	7	8
A. SD							
1.	Sekolah	16	1	14	—	4	—
2.	Murid	3.566	82	2.066	—	639	—
3.	Kelas	122	6	72	—	25	—
4.	Ruang belajar	80	2	58	—	17	—
5.	Guru	122	6	60	—	24	—
B. SLTP							
1.	Sekolah	2	1	—	—	—	—
2.	Murid	836	63	—	—	—	—
3.	Kelas	16	3	—	—	—	—
4.	Ruang belajar	21	3	—	—	—	—
5.	Guru	34	12	—	—	—	—
C. SLTA							
1.	Sekolah	—	1	—	—	—	—
2.	Murid	—	145	—	—	—	—
3.	Kelas	—	5	—	—	—	—
4.	Ruang belajar	—	4	—	—	—	—
5.	Guru	—	16	—	—	—	—

Di bidang Pendidikan Luar Sekolah juga terlihat perkembangan selama Pelita. Jenis Pendidikan Luar Sekolah semakin bertambah, jumlah anggota masyarakat yang berpartisipasi pun meningkat.

Pada Desa Swasembada Ujung Gading, Desa Swakarya Sungai Aur dan Desa Swadaya Muara Kiawai sebelum Pelita jenis Pendidikan Luar Sekolah kursus pemberantasan Buta Huruf (PBH), Kursus Jahit-menjahit, dan Masak-memasak. Setelah Pelita jenis Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan cukup banyak jumlahnya seperti Kursus Perbengkelan Honda, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Kelompok Belajar Pendidikan Dasar, Kelompok Belajar PPD, Kelompok Belajar PKK, Kursus Perkantoran Niaga, dan Kursus Bahasa Inggris, serta Pendidikan Kepemimpinan terutama generasi muda. Sesudah Pelita tidak banyak lagi ditemui penduduk yang buta huruf, sedangkan pada sekitar tahun enam puluh masyarakat yang masih buta huruf di ketiga dalam Kecamatan Lembah Melintang ini berkisar antara sepuluh sampai dua puluh persen dari penduduk yang berumur 15 tahun ke atas.

Keterampilan yang diperoleh melalui kursus atau kelompok belajar tidak saja dirasakan untuk meningkatkan keterampilan wanita dan pria dalam berumah tangga dan bermasyarakat tetapi ternyata sebagian dari warga belajar Pendidikan Luar Sekolah ini telah menjadikan keterampilan yang diterimanya sebagai pengetahuan atau keterampilan dasar untuk berusaha dalam berbagai kegiatan sebagai sumber mata pencaharian.

Di bidang Sosial Budaya seperti kegiatan olah raga, kesenian, dan organisasi sosial lainnya terlihat perkembangan. Begitu juga penggunaan waktu senggang sudah semakin efektif dan efisien sesuai dengan situasi dan kondisi daerah setempat. Pada masa sebelum Pelita organisasi yang berkembang di masyarakat adalah koperasi, olahraga, kesenian, kepemudaan, dan keagamaan. Jumlah anggota yang aktif masih sedikit. Sesudah Pelita jenis organisasi yang berkembang pada setiap nagari semakin bertambah antara lain organisasi pertanian, perdangan, kewanitaan, dan keuangan.

Pada umumnya di organisasi sosial banyak anggota masyarakat yang aktif di dalamnya seperti organisasi olahraga, kesenian, kelompok tani, Lumbung Pitih Nagari, PKK, Karang Taruna, KNPI, dan or-

ganisasi lainnya. Dalam hal organisasi politik banyak anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam Golongan Karya dan khusus bagi Generasi Muda banyak berpartisipasi dalam Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).

Pada waktu sebelum Pelita cabang olahraga yang berkembang hanyalah bola kaki, volly ball, badminton, tenis meja, dan catur sedangkan pada masa sesudah Pelita cabang olahraga tersebut semakin bertambah jenisnya yang dilaksanakan oleh masyarakat yaitu atletik, senam pagi Indonesia, pencak silat, sepak takraw, basket ball, dan khusus untuk Desa Swasembada Ujung Gading juga telah berkembang olahraga renang pada saat terakhir ini.

Di bidang Kesenian semakin banyak anggota masyarakat yang berpartisipasi. Cabang kesenian modern yang berkembang adalah band dan musik, disamping kesenian tradisional. Jenis kesenian tradisional yang banyak disenangi di ketiga nagari ini adalah dikir, seni Al Qur'an, ronggeng, dan tor-tor. Di Desa Swasembada Ujung Gading mimbar adat kurang banyak peminatnya sedangkan di Desa Sungai Aur dan Muara Kiawai banyak anggota masyarakat yang menyenangi dan berpartisipasi dalam kegiatannya. Randai dan kaba tidak banyak peminatnya di Desa Sungai Aur dan Muara Kiawai, sedangkan di Desa Ujung Gading kesenian randai tidak berkembang bagi anggota masyarakat.

Pada ketiga nagari masyarakat aktif bekerja dalam mata pencaharian masing-masing mulai dari jam 7.⁰⁰ WIB pagi sampai dengan jam 17.⁰⁰. WIB sore. Waktu istirahat pada umumnya antara jam 12.⁰⁰ sampai dengan jam 13.⁰⁰ WIB yang biasa digunakan untuk beribadah dan makan siang. Sebagian anggota masyarakat di malam hari juga melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan atau mata pencaharian pokok sehari-hari sedangkan sebagian anggota masyarakat lainnya mengikuti wirid pengajian dan sedikit yang hanya beristirahat saja pada malam hari.

Sampai dengan tahun 1980 pada setiap nagari terdapat juga anak usia 7–12 tahun yang belum bersekolah dan tidak bersekolah lagi. Gambaran jumlah penduduk dibandingkan dengan partisipasi anak usia 7–12 tahun di Sekolah Dasar dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

TABEL III.7 LUAS DESA, JUMLAH PENDUDUK, DAN PENDUDUK USIA 7-12 TAHUN MENURUT DESA DI KABUPATEN PASAMAN TAHUN 1980.

No.	U r a i a n	Nama Nagari/Desa		
		Ujung Gading	Sungai Aur	Muara Kiawai
1.	Luas Desa (km ²)	333,18	635,95	200,00
2.	Penduduk laki-laki	9.981	6.545	1.855
3.	Penduduk perempuan	10.340	6.509	1.871
4.	Jumlah penduduk	20.321	13.054	3.726
5.	Penduduk usia 7-12 tahun yang belum pernah sekolah	232	245	95
6.	Penduduk usia 7-12 tahun yang masih sekolah	3.070	1.938	492
7.	Penduduk usia 7-12 tahun yang tidak bersekolah lagi	90	57	51
8.	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	3.392	2.240	638

Keberhasilan pembangunan juga dibarengi dengan penambahan penduduk yang cukup tinggi seperti terlihat dalam daftar dibawah ini.

Nama Desa/Nagari	Tahun 1971	Tahun 1980
1. Ujung Gading	12.977	20.321
2. Sungai Aur	11.524	13.054
3. Muara Kiawai	2.979	3.726

Pada tahun 1980 jumlah penduduk menurut agama yang dianut tercatat di ketiga daerah ini sebagai berikut :

TABEL III.8 PENDUDUK MENURUT AGAMA PER NAGARI UJUNG GADING, SUNGAI AUR, DAN MUARA KIAWAI DI KABUPATEN PASAMAN.

No.	Nama Desa/Nagari	A g a m a					Jumlah
		Islam	Katolik	Kristen	Hindu	Budha	
1.	Ujung Gading	20.311	2	8	—	—	20.321
2.	Sungai Aur	13.054	—	—	—	—	13.054
3.	Muara Kiawai	3.716	—	10	—	—	3.726

Sampai dengan tahun 1980 sudah banyak yang berhasil dibangun gedung, dan perumahan di ketiga nagari.

TABEL III.9 BANYAK BANGUNAN FISUK MENURUT JENIS PADA NAGARI UJUNG GADING, SUNGAI AUR, DAN MUARA KIAWAI DI KABUPATEN PASAMAN.

No.	Nama Nagari	Tunggal		Ganding dua		Ganding banyak	
		Tidak bertingkat	Bertingkat	Tidak bertingkat	Bertingkat	Tidak bertingkat	Bertingkat
1.	Ujung Gading	4.786	61	32	12	24	10
2.	Sungai Aur	3.220	25	8	—	12	2
3.	Muara Kiawai	807	11	—	—	8	—

Tingkat kehidupan dan perkembangan pembangunan di daerah pedesaan sejak diselenggarakan Pelita jelas meningkat. Kesehatan masyarakat pun semakin terpelihara dan prasarana pasar semakin berkembang.

- b. Desa Balai Tengah, Tepi Selo, dan Tanjung Bonai di Kabupaten Tanah Datar.

Pembangunan Lima Tahun, telah memberikan pengaruh positif pada masyarakat nagari. Inventasi pemerintah di bidang prasarana dan sarana, politik, ekonomi, dan sosial telah memungkinkan penduduk ketiga nagari lebih terangsang untuk ikut menyediakan dana tambahan untuk usaha pembangunan. "*Soill over benefi*" daripada investasi pemerintah itu antara lain tidak hanya dalam bentuk penyediaan dana pembangunan yang lebih banyak oleh anggota masyarakat tetapi juga dalam bentuk perubahan kesempatan kerja, peningkatan daya guna gotong royong, perubahan struktur angkatan kerja yang mengurangi pengangguran, peningkatan diversifikasi penghasilan pertanian dan perluasan serta pemerataan kesempatan kerja. Di antara manfaat tersebut secara terperinci akan diuraikan sebagai berikut.

- 1). Dana pembangunan prasarana dan sarana masyarakat.

Dana pendamping (*Matching fund*) yang disediakan masyarakat selama Repelita rata-rata sebanyak dana investasi pemerintah untuk nagari-nagari tersebut. Bahkan untuk beberapa usaha investasi, jumlah dana yang disediakan masyarakat nagari melebihi jumlah dana yang disediakan pemerintah. Untuk usaha perbaikan dan pembangunan jalan, jembatan, dan polongan, antara 1969–1980 masyarakat nagari Tepi Selo telah menyediakan dana sebanyak Rp. 19.189.000,—. Masyarakat Nagari Balai Tengah sebanyak Rp. 7.066.000,—, Masyarakat Nagari Tanjung Bonai (untuk tahun 1981/1982 saja) telah menyediakan dana untuk investasi demikian sebanyak Rp. 17.640.000,—

Sampai tahun 1980, buat pembangunan Bandar, Tali Bandar, Bendungan dan Empangan, dana yang berasal dari swadaya masyarakat Tepi Selo sebanyak Rp 816.000,— dan dari swadaya masyarakat Balai Tengah sebanyak Rp. 317.000,—. Masyarakat Tepi Selo telah menggali dana dari sumber setempat untuk mendirikan TK dan SD sebanyak Rp. 4.680.000,— dan masyarakat Balai Tengah dari sumber yang sama sebanyak Rp. 350.000,—

Masyarakat nagari Tepi Selo dan Balai Tengah telah dapat memperbaiki dan membangun mesjid, madrasah, dan musola. Dana yang berasal dari swadaya masyarakat sebanyak Rp. 3.686.000,— di Tepi Selo dan sebanyak Rp.900.000,— di Balai Tengah. Sedangkan di Tanjung Bonai uang yang berasal dari swadaya masyarakat pada tahun 1981/1982 saja berjumlah sebanyak Rp. 5.575.000,—. Swadaya masyarakat dalam bidang gedung dan kantor serta alat-alatnya sejak tahun 1969—1980 telah berjumlah Rp. 2.754.000,— di Tepi Selo dan Rp. 1.075.000,— di Balai Tengah. Di Nagari Tanjung Bonai berjumlah Rp. 1.100.000,— pada tahun 1981/1982 saja.

Spill over venefit lain, tanpa membutuhkan dana bantuan dari pemerintah adalah pemasangan instalasi listrik untuk rumah penduduk. Swadaya masyarakat untuk modal pertama seperti tonggal listrik berjumlah Rp. 225.000,— di Tepi Selo dan Rp. 75.000,— di Balai Tengah. Penyuluhan yang dilaksanakan terhadap masyarakat telah mendorong mereka untuk hidup lebih bersih. Swadaya masyarakat Tepi Selo untuk pengadaan sumur pompa/WC/air bersih berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 300.000,— dan swadaya masyarakat Balai Tengah sebesar Rp. 1.830.000,—. Di Tanjung Bonai usaha yang sama telah dilakukan pula, dan menelan biaya sebanyak Rp. 750.000,—. Pembangunan Balai Desa di Balai Tengah dengan biaya Rp. 4.1 juta bersumber dari swadaya masyarakat.

2) Pembangunan Rumah Rakyat.

Peningkatan penghasilan masyarakat dapat dilihat melalui penambahan rumah permanen yang dibangun penduduk. Sebelum Pelita pada umumnya rumah penduduk terdiri dari kayu dan sebagian kecil merupakan rumah semi permanen yang dindingnya dari anyaman bambu yang ditutup dengan semen atau kapur bercampur pasir. Rumah yang dibangun menggunakan beton bertulang dan batu merah hampir tidak ditemui di ketiga nagari ini.

Selama Pelita rumah penduduk yang terbuat dari beton bertulang dan batu merah telah berkembang secara pesat. Distribusi rumah penduduk menurut jenis bangunan dan nagari dapat dilihat dari tabel berikut ini.

TABEL III.10 DISTRIBUSI RUMAH PENDUDUK MENURUT
JENIS BANGUNAN NAGARI.

No.	Jenis bangunan	N a g a r i		
		Tepi Selo	Balai Tengah	Tanjung Bonai
1.	Permanen	75 (7,9%)	43 (12,0%)	199 (11,7%)
2.	Semi Permanen	241 (25,2%)	88 (24,6%)	431 (25,3%)
3.	Kayu/Darurat	639 (66,9%)	227 (63,4%)	1.103 (63,0%)
J u m l a h		955 (100%)	358 (100%)	1.703 (100%)

3) Barang-barang Rumah Tangga.

Di Nagari Balai Tengah saja, pada tahun 1980, telah ditemukan Televisi sebanyak 72 buah. Di Nagari Tepi Selo, pada tahun 1978 ditemukan 315 Radio. Di Nagari Balai Tengah, pada tahun 1980 tujuh buah rumah tangga telah memiliki alat Kamera. Kamera ini hanya untuk dipakai sendiri, bukan dalam rangka membuka usaha Photo Studio. Mesin jahit yang dimiliki oleh penduduk Tepi Selo berjumlah 215 buah pada tahun 1978 dan yang dimiliki penduduk Balai Tengah sebanyak 107 buah pada tahun 1980.

4). Produksi Perikanan.

Di samping bertani di sawah penduduk nagari-nagari ini juga memiliki kolam ikan. Di Balai Tengah yang merupakan nagari terkecil pada tahun 1980 telah menghasilkan ikan basah sebanyak 25 ton per tahun walaupun cara pemeliharaan ikan masih secara tradisional.

5) Ternak.

Peternakan yang dilakukan penduduk masih bersifat tradisional kecuali dalam memelihara ayam ras. Di Tepi Selo pada tahun 1977 ditemukan sapi sebanyak 173 ekor di Balai Tengah pada tahun 1980 sebanyak 30 ekor dan di Tanjung Bonai pada tahun 1981 ditemukan sapi sebanyak 216 ekor. Jumlah kerbau yang dimiliki penduduk di Tepi Selo pada tahun 1978 sebanyak 224 ekor, di Balai Tengah pada tahun 1980 sebanyak 95 ekor dan jumlah kerbau yang dimiliki penduduk di Tanjung Bonai pada tahun 1981 sebanyak 823 ekor.

Jumlah kambing yang dimiliki penduduk Tepi Selo sebanyak 250 ekor pada tahun 1978, yang dimiliki penduduk Balai Tengah sebanyak 98 ekor pada tahun 1980 dan jumlah kambing yang dimiliki penduduk Tanjung Bonai sebanyak 412 ekor pada tahun 1981. Jumlah itik yang dimiliki penduduk di ketiga nagari ini masing-masing 558 ekor di Tepi Selo pada tahun 1978, 200 ekor di Balai Tengah pada tahun 1980 dan 915 ekor di Tanjung Bonai pada tahun 1980.

Jumlah ayam kampung yang dipelihara penduduk di masing-masing nagari ini adalah 2.123 ekor di Tepi Selo pada tahun 1978, 1.615 ekor di Balai Tengah pada tahun 1980, dan 13.962 ekor di Tanjung Bonai pada tahun 1981. Peternakan ayam ras juga dilaksanakan oleh sebagian kecil penduduk. Tahun 1978 ditemukan 150 ekor ayam ras di Tepi Selo. Sedangkan di Tanjung Bonai pada tahun 1981 ditemukan ayam ras sebanyak 1.100 ekor.

6) Alat Kendaraan.

Di nagari Balai Tengah ditemukan 25 kendaraan bermotor roda empat seperti bus mini, truk, dan sebagaimana yang dimiliki penduduk nagari itu dan di Tanjung Bonai ditemukan pula sebanyak tiga buah. Jumlah sepeda motor yang terdapat di nagari Tepi Selo sebanyak 14 buah pada tahun 1978, di Balai Tengah berjumlah 25 buah pada tahun 1980, dan di Tanjung Bonai berjumlah 86 buah pada tahun 1981. Layu pembangunan sejalan dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat.

a). Penduduk.

Selama Pelita I, II, dan III telah terjadi pertambahan penduduk seperti dalam tabel di bawah ini.

TABEL III.11 PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK NAGARI TEPI SELO, BALAI TANGAH, DAN TANJUNG BONAI TAHUN 1971–1980.

Nagari Tahun	Tepi Selo			Balai Tengah			Tanjung Bonai		
	Lk	Pr	Jml	Lk	pr	Jml	Lk	Pr	Jml
1971	2.224	2.735	4.959	1.158	1.297	2.396	3.864	4.009	7.873
1976	2.740	2.635	5.375	1.164	1.285	2.449	—	—	—
1980	2.814	2.977	5,791	1.172	1.297	2.469	4.645	4.855	9.500

b) Pendidikan dan Penyuluhan.

Laju perkembangan pendidikan dasar dapat dilihat dari Tabel III.12 dibawah ini.

TABEL III.12 LAJU PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DASAR NAGARI TEPI SELO, BALAI TANGAH, DAN TANJUNG BONAI TAHUN 1971–1980.

Nagari Tahun	Tepi Selo			Balai Tengah			Tanjung Bonai		
	Jlh	Tamat	Drop. Out	Jlh	Tamat	Drop. Out	Jlh	Tamat	Drop. Out
1971	640	63	54	229	20	7	690	60	56
1976	603	65	31	181	47	0	704	67	35
1980	843	77	26	219	57	0	1.060	86	21

Kegiatan penyuluhan banyak pula dilakukan, antara lain penyuluhan kesehatan seperti dalam tabel di bawah ini.

TABEL III.13 PENYULUHAN KESEHATAN DI NAGARI TEPI SELO, DAN BALAI TANGAH, TAHUN 1975 – 1980.

Nagari Tahun	Tepi Selo			Balai Tengah		
	Ceramah (dlm kali)	Kursus (dlm kali)	Kunjungan ke rumah-rumah	Ceramah (dlm kali)	Kursus (dlm kali)	Kunjungan ke rumah-rumah
1975	6	—	—	—	—	—
1976	12	—	—	—	—	—
1977	15	3	177	8	—	96
1978	2	—	93	21	—	92
1979	—	—	—	32	1	157
1980	—	—	—	9	1	56

Di samping itu telah dilakukan pula serangkaian pendidikan non formal lainnya dalam bentuk PKK dengan perincian seperti dalam Tabel III. 14 di bawah ini.

TABEL III-4 PKK DI NAGARI TEPI SELO, DAN BALAI TANGAH TAHUN 1975-1980

Nagari Tahun	T e p i S e l o								B a l a i T a n g a h							
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1975	5	5	2	6	-	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	7	7	3	8	-	3	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	12	12	4	3	1	6	3	6	6	5	1	2	1	3	1	2
1978	13	1	-	-	-	1	-	-	6	5	1	2	1	3	1	2
1979	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	1	1	1	4	1	2
1980	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	1	1	1	2	1	1

Keterangan: 1 = Kursus memasak
2 = Kurus menjahit
3. = Kursus mengubah bunga
4 = Kursus Kesejahteraan Keluarga
5 = Kursus Gizi
6 = Ceramah KB Pertanian
7 = Ceramah Kesehatan
8 = Ceramah lainnya.

Investasi lain dalam bentuk pecegahan penyakit menular juga lebih terarah pada Pelita. Distribusi usaha tersebut dapat dilihat dari Tabel III.15 di bawah ini.

TABEL III.15 VAKSINASI YANG DILAKUKAN DI NAGARI TEPI SELO, DAN BALAI TANGAH, DARI TAHUN 1975–1980 (Jumlah dalam orang).

Nagari Tahun	Tepi Selo		Balai Tangah		Tanjung Bonai	
	Cacar	BCG	Cacar	BCG	Cacar	BCG
1975	91	91	—	—		
1976	157	112	—	—		
1977	308	189	27	30		
1978	257	108	34	31		
1979	—	—	32	35		
1980	—	—	18	29		

Tentang penyakit yang menonjol di nagari-nagari itu adalah sebagai berikut .

TABEL III.16 PENYAKIT YANG MENONJOL DALAM MASYARAKAT NAGARI TEPI SELO, DAN BALAI TANGAH.

Nagari Tahun	Tepi Selo			Balai Tangah		
	TBC	Malaria	Dll	TBC	Malaria	Dll
1975	50	3	175	—	—	—
1976	35	5	150	—	—	—
1977	11	4	195	30	5	6
1978	—	—	—	10	4	6
1979	—	—	—	—	4	2
1980	—	—	—	—	2	2

Pelaksanaan bimbingan masal pertanian sebagai berikut.

TABEL III.17 BIMAS PADI NAGARI TEPI SELO, DAN BALAI TANGAN TAHUN 1975–1980 (dalam ha).

Nagari Tahun	Tepi Selo		Balai Tangah	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1975/76	152	266	—	—
1976/77	150	164	—	—
1977/78	220	122	—	—
1978/79	—	—	50	106
1979/80	—	—	110	107

Di samping itu dilaksanakan pula Inmas, yang distribusinya sebagai berikut.

TABEL III.18 INMAS PADI NAGARI TEPI SELO, DAN BALAI TANGAN, TAHUN 1975–1980 (dalam ha).

Nagari Tahun	Tepi Selo		Balai Tangah	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1975	255	255	—	—
1976	185	185	—	—
1977	174	265	—	—
1978	120	60	60	45
1979	—	—	97	92
1980	—	—	62	25

C) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah.

Perkembangan pendidikan dapat dilihat pula tahun pembangunan SD Inpres dalam tabel berikut ini.

TABEL III.9 PERTAMBAHAN PRASARANA SD DI NAGARI
TEPI SELO, BALAI TANGAH, DAN TANJUNG
BONAI SELAMA PELITA.

Tahun/Uraian/Nagari	Tepi Selo	Balai Tangah	Tanjung Bonai
1976	—	—	1 SD Inpres
1978	1 SD Inpres	—	—
1980	—	1 SD Inpres	
Jumlah ruang belajar pada tahun 1981	22 buah	15 buah	23 buah
Jumlah guru	27 orang	16 orang	33 orang.

Pada tahun 1981, di Tepi Selo tiap satu ruang belajar terdiri dari 263 murid di Balai Tangah 165 murid, dan di Tanjung Bonai 413 murid. Ratio murid masing-masing nagari tersebut pada tahun 1980 adalah 31 orang di Tepi Selo, 14 orang di Balai Tangah, dan 32 orang di Nagari Tanjung Bonai.

Gedung yang dibangun selama Pelita adalah seperti di bawah ini.

TABEL III.20 PRASARANA FISIK YANG DIBANGUN SELAMA
PELITA DI TEPI SELO, BALAI TANGAH,
DAN TANJUNG BONAI.

Jenis bangunan/Nagari	Tepi Selo	Balai Tangah	Tanjung Bonai
1. Islamic Centre	X	—	—
2. Kantor Wali Nagari	—	X	X
3. Kantor Jorong	X	X	X
4. Balai Pengobatan	—	X	—
5. P a s a r	—	X	—
6. Sekolah Dasar	X	X	X

Keterangan : X = Dibangun.

Arah pembangunan yang berkembang di ketiga nagari ini, tidak terlepas dari pola pembangunan yang diatur oleh pemerintah. Namun demikian berhasilnya beberapa kegiatan pembangunan seperti pertanian adalah berkat kegiatan masyarakat setempat.

Penduduk di ketiga nagari ini telah memperlihatkan perhatian terhadap kemajuan dan modernisasi sejak dulu. Penduduk telah banyak yang bersekolah bahkan sudah ada yang mencapai pendidikan tinggi. Namun peningkatan pendidikan tersebut secara tidak langsung menyebabkan terjadinya "brain-drain" dari nagari-nagari itu.

Sesudah Pelita dilaksanakan, terutama sejak Pelita Kedua usaha pembangunan di ketiga nagari ini telah menunjukkan pengaruh yang nyata. Pembangunan prasarana dan sarana ekonomi dan sosial di ketiga Nagari ini dapat dilihat dalam uraian-uraian yang berikut :

- (1) Sejak Pelita I telah terjadi peningkatan investasi dalam bidang jalan, jembatan, dan polongan. Jumlah seluruh investasi pemerintah sejak tahun 1968/1969 sampai dengan tahun 1981/1982 berjumlah Rp 19.323.000,- di Nagari Tepi Selo Rp. 4.750.000,- di Balai Tengah, dan Rp. 12.000.000,- di Nagari Tanjung Bonai sekurang-kurangnya tiap nagari beroleh pembiayaan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan polongan rata-rata per tahun Rp. 1.500.000,- di Tepi Selo, Rp. 396.000,- di Balai Tengah, dan Rp. 1.000.000,- di Nagari Tanjung Bonai.
- (2) Investasi Bandar dan Tali Bandar dan Bendungan juga telah dilaksanakan di ketiga nagari ini. Di Tepi Selo jumlah investasi pemerintah dalam bidang ini sebanyak Rp. 432.000,- dan di Balai Tengah sebanyak Rp. 300.000,-
- (3) Investasi pemerintah dalam prasarana dan sarana Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar sampai tahun 1979/1980 telah berjumlah Rp. 6.921.000,- di Tepi Selo, dan Rp. 7.350.000,- di Nagari Balai Tengah.
- (4) Bantuan pemerintah dalam bidang pembangunan mesjid, madrasah, dan musalla sebesar Rp. 20.000,- di Tepi Solo sampai tahun 1979/1980 Rp. 90.000,- di Balai Tengah sampai tahun 1979/1980 dan di Tanjung Bonai pada tahun 1981/1982 saja berjumlah Rp. 4.250.000,-

- (5) Investasi penghijauan yang dilaksanakan pemerintah di Tepi Selo sebanyak Rp. 1.344.000,— sedangkan di Balai Tangah dan Tanjung Bonai belum ditemukan kebutuhan pembiayaan penghijauan.
- (6) Pembangunan gedung dan kantor telah menghabiskan biaya Rp. 814.000,— di Tepi Selo, Rp. 175.000,— di Balai Tangah sampai tahun 1979/1980 dan di Tanjung Bonai sebanyak Rp 1.500.000,— tahun 1981/1982.
- (7) Di Tepi Selo, pada tahun 1976/1977 telah dibiayai pemerintah Investasi proyek air bersih dengan jumlah pembiayaan sebanyak Rp. 255.000,— di Balai Tangah, pada tahun 1979/ 1980 sebanyak Rp. 100.000,— dan Rp 3.450.000,— lagi pada tahun 1980/1981. Sedangkan di Tanjung Bonai pada tahun 1981/1982 sebesar Rp. 1.500.000,—
- (8) Investasi pemerintah dalam bidang pembangunan kesehatan telah dilakukan di Balai Tangah dalam bentuk perbaikan gedung dengan biaya sebesar Rp. 1.000.000,— Di Nagari Balai Tangah ini juga telah dibangun Pasar Inpres dengan biaya sebanyak Rp. 27.850.000,— pada tahun 1978/1979.
- (9) Di Nagari Tepi Selo pada tahun 1977/1978 pemerintah juga telah membangun Pos Hansip dan kolam dengan biaya Rp. 700.000,—

c). Nagari Koto Baru Simalanggang, Koto Tangah Simalanggang dan Taeh Baruh di Kabupaten 50 Kota.

Turun ke sawah pada masa sebelum Pelita hanya dilakukan satu kali dalam setahun, tetapi setelah Pelita, dengan membaiknya irigasi telah berubah menjadi dua kali dalam satu tahun walaupun belum merata ke seluruh nagari. Produksi padi pada masa sebelumnya hanya sekitar dua ton per hektar, telah meningkat menjadi \pm 5 ton per hektar. Keberhasilan produksi padi selain membaiknya irigasi, juga disediakan pupuk buatan dan insektisida yang mudah didapat dengan harga yang terjangkau.

Hubungan telah semakin lancar untuk semua jenis kendaraan. Hasil pertanian telah mempunyai pasar yang semakin luas antar nagari antar kabupaten dan malah antar propinsi.

Pada tahun 1980 hasil pertanian di ketiga nagari tersebut adalah sebagai berikut:

Jenis hasil	Koto Baru Simalanggang	Koto Tengah Simalanggang	Taeh Baruh
1. Padi	1.064 ton	700 ton	648 ton
2. Jagung	—	252 ton	468 ton
3. Sayur-sayuran	—	60 ton	—
4. Cengkeh	—	2.000 batang	—
5. Buah-buahan	—	± 500 ton	—

Setelah masa Pelita di Koto Baru Simalanggang dengan biaya Bantuan Desa telah dibangun dan berfungsi tiga sumber pengairan atau bendungan baru yaitu Bendungan Namang I di Jorong Tabek Panjang, Namang II di Jorong Koto Baru dan Bendungan Sarosah di Jorong Parumpung. Ketiga bendungan ini dapat mengairi sekitar 200 ha sawah. Bendungan lainnya yang terdapat di daerah ini adalah Bendungan Pilola, Bendungan Belubus dan Namang III. Untuk membantu pengairan daerah pertanian di Koto Baru Simalanggang sejak lama dimanfaatkan jaringan irigasi yang bersumber dari nagari Sei. Beringin yang berdekatan letaknya dengan Nagari Koto Baru Simalanggang.

Selain dari peningkatan hasil pertanian sawah dan kebun selama Pelita juga terlihat semakin meningkatnya usaha di bidang peternakan. Jenis dan jumlah ternak di nagari yang bersangkutan adalah sebagai berikut .

Jenis ternak	Koto Baru Simalanggang	Koto Tangan Simalanggang	Taeh Baruh
1. Kerbau	200 ekor	78 ekor	324 ekor
2. Sapi	150 ekor	162 ekor	150 ekor
3. Kuda	15 ekor	11 ekor	50 ekor
4. Kambing	100 ekor	100 ekor	100 ekor
5. Itik	1.200 ekor	1.500 ekor	2.000 ekor
6. Ayam biasa	2.000 ekor	3.500 ekor	4.000 ekor
7. Ayam Ras	10.000 ekor	2.500 ekor	5.000 ekor

Tidak saja di bidang pertanian, dan sektor ekonomi lainnya terdapat peningkatan dalam masa Pelita ini tetapi adalah meningkatnya secara berarti jumlah lembaga pendidikan dasar terutama dengan program Inpres. Pendidikan Menengah Pertama yang biasanya terdapat di Kota Payakumbuh, sejak awal Pelita III telah dibangun satu SMP Negeri di pusat daerah ketiga nagari yang terletak di pinggir nagari Koto Baru Simalanggang. Atas prakarsa anggota masyarakat, para pendidik dan Pemerintah Daerah Kecamatan, di daerah ini sejak dua tahun terakhir telah didirikan pula sebuah SMA Swasta dalam pembinaan PGRI setempat yang masih memakai gedung pinjaman.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan usaha yang intensif di bidang kesehatan seperti pembangunan BKIA, Taman Gizi, dan dalam rangka menggalakkan keberhasilan program Keluarga Berencana telah pula didirikan Pos dan Klinik KB pada setiap nagari di daerah ini.

Dalam foto berikut dapat dilihat beberapa buah pembangunan gedung atau lembaga pendidikan baik di tingkat pendidikan dasar maupun menengah, begitu juga beberapa buah prasarana fisik lembaga kesehatan.

TABEL III.21 — PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK PADA KETIGA NAGARI

No.	N a g a r i	Tahun 1971	Tahun 1980
1.	Koto Baru Simalanggang	3.207	4.300
2.	Koto Tengah Simalanggang	1.852	2.267
3.	Taeh Baruh	4.650	5.304

TABEL III.22 PERKEMBANGAN JUMLAH MURID SD, SMP DAN SMA PADA KETIGA NAGARI.

No.	N a g a r i	SD		SMP		SMA	
		1968	1981	1968	1981	1968	1981
1.	Koto Baru Sima- langgang	392	753	—	839	—	135
2.	Koto Tengah Si- malanggang	332	470	—	—	—	—
3.	Taeh Bukit	597		—	—	—	—

Seiring dengan pembangunan di sektor pertanian, pendidikan dan kesehatan, pembangunan di bidang pemerintahan, perkoperasian, keolahragaan dan sosial juga menunjukkan hasil. Usaha dan hasil yang telah dicapai selama Pelita di daerah ini dapat dilihat dalam terperinci pembangunan yang dicantumkan pada halaman yang berikut.

**NAMA DAN LOKASI PROYEK PEMBANGUNAN
YANG DIBIYAI DENGAN DANA INPRES DAN PELITA
NASIONAL DAERAH PADA KETIGA NAGARI
DI KABUPATEN 50 KOTA**

- 1971/72 Jalan aspal jurusan Payakumbuh – Suliki 3 km.
- 1974/75 Jalan Makadam Koto Baru – Piobang 5 km.
- 1975/76 Jalap Lampasi – Taeh 5 km.
- 1976/77 Pelebaran Jalan Lampasi – Guguk 2,5 km.
- 1978/79 Jalan aspal Lampasi – Taeh 3 km.
- 1978/79 Jembatan gantung Taeh Baruh – Taeh Bukit 60 m.
- 1979/80 Jalan aspal Koto Baru – Piobang 1,5 km.
- 1979/80 Pengkerikilan jalan Koto Baru – Simalanggang 1,25 km.
- 1979/80 Pengkerikilan jalan Taeh Baruh – Taeh Bukit 3 km.
- 1980/81 Jalap aspal Koto Baru – Piobang 2 km.
- 1980/81 Jalan aspal Lampasi – Taeh 2 km.
- 1981/82 Jalan aspal Koto Baru – Piobang 2,1 km.
- 1975/76 SD Inpres Taeh Baruh 1 unit.
- 1975/76 SD Inpres Koto Baru Simalanggang.

Rehabilitasi SD.

- 1975/76 SD Koto Tengah Simalanggang.
- 1976/77 SD Inpres Taeh Baruh.
- 1976/77 SD Inpres Koto Baru Simalanggang.
- 1976/77 SD 1 Taeh Baruh.

Rehabilitasi SD Bukan Milik Pemerintah.

- 1976/77 Pendidikan Islam Koto Baru Simalanggang.
- 1976/77 Sekolah Perti Taeh Baruh.

Rehabilitasi SD Inpres.

- 1977/78 SD Inpres Koto Tengah Simalanggang 1 unit.
- 1977/78 SD Inpres Parit Dalam Taeh Baruh 1 unit.
- 1977/78 SD dekat SMP Standar Lampasi 1 unit.
- 1977/79 SD Inpres Koto Tengah Simalanggang 1 unit.
- 1978/79 SD Inpres Parit Dalam Taeh Baruh 1 unit.
- 1978/79 SD Inpres dekat SMP Standar Lampasi 1 unit.

Tambahan Ruang Kelas.

- 1978/79 SD Koto Tengah Simalanggang.
- 1979/80 SD 2 Taeh Baruh.
- 1979/80 SD Parumpung Koto Baru Simalanggang.
- 1980/81 SD Koto Baru Simalanggang.
- 1980/81 SD 1 Taeh.
- 1980/81 SD Koto Tengah Simalanggang.

Rumah Dinas Kepala Sekolah.

- 1980/81 SD Koto Tengah Simalanggang.
- 1980/81 SD Koto Baru Simalanggang.

Rumas Dinas Penjaga Sekolah.

- 1980/81 SD Parit Dalam Taeh Baruh.
- 1980/81 SD Koto Tengah Simalanggang.

Rehabilitasi SD Negeri.

- 1980/81 SD Parumpung.

Inpres Kesehatan.

- 1974/75 Puskesmas Koto Baru.

Inpres Penunjang Jalan

- 1980/81 Penetrasi jalan jurusan Payakumbuh – Suliki 6 km.

Rehabilitasi SD

- 1972/73 SD Taeh Baruh.

Perluasan SD

- 1973/74 SD Koto Tengah Simalanggang.

Rehabilitasi SD

- 1973/74 SD Koto Baru Simalanggang.
- 1974/75 SD Taeh Baruh.

Rehabilitasi Tempat Ibadat.

- 1974/75 Mesjid Tambun Ijuk Koto Tengah Simalanggang.

Rehabilitasi SD

1976/77 SD Koto Tengah Simalanggang.

Rehabilitasi Tempat Ibadat.

1978/79 Mesjid Koto Baru.

1979/80 Mesjid Koto Baru Simalanggang.

1980/81 Mesjid Koto Tengah Simalanggang.

1980/81 Surau Atas Air Taeh Baruh.

1980/81 Mushalla Parumpung Koto Baru Simalanggang.

1981/82 Mesjid Istiqamah Tabek Panjang Koto Baru.

Irigasi

1980/81 Empangan Namang II Simalanggang.

1980/81 Empangan Namang I Simalanggang.

1981/82 Empangan Bungkoa Taeh.

Pelita Nasional Melalui Pemda

1976/77 Kantor Camat Payakumbuh.

1979/80 Rumah Dinas Camat Payakumbuh.

Prasana dan sarana perhubungan, penerangan, mesin produksi, kesehatan dan kebersihan, pasar dan lembaga kemasyarakatan srta tenaga di bidang pertukangan dan para pedagang setelah masa Pelita ini jumlahnya meningkat dibandingkan dengan masa sebelumnya. Meningkatnya jumlah prasarana dan sarana itu selain dari hasil proyek pembangunan, adalah juga berkat kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah baik dengan jalan gotong royong maupun usaha khusus lainnya.

Jumlah infrastruktur dan tenaga di bidang jasa di ketiga daerah ini adalah sebagai berikut.

I. Penerangan	Koto Baru	Koto Tangah	Taeh Baruh
Listrik negara		12.000 watt (swasta)	2.000 watt (swasta)
Radio		200 buah	300 buah
Televisi	42 buah	46 buah	50 buah
II. Perhubungan			
Jln. Propinsi	—	—	—
Jln. Kabupaten	3 km	2 km	5,5 km
Jln. Desa	2 km	4,1 km	2,5 km
Jembatan Desa	3 bh a 4 m	1 bh a 4 m	1 bh a 30 m
III. Alat Angkutan			
Mobil atau motor	4 buah	3 buah	4 buah
Sepeda motor	52 buah	42 buah	150 buah
Sepeda	200 buah	125 buah	324 buah
IV. Sosial			
WC Umum	120 buah	200 buah	200 buah
Sumur	20 buah	200 buah	100 buah
V. Perusahaan Rakyat			
Gilingan padi	4 buah	2 buah	4 buah
Kilang minyak	—	—	2 buah
Batu bata	—	—	3 buah
VI. Industri rumah			
Anyaman	ada	ada	ada
Sulaman	—	—	—
VII. Lembaga Kemasyarakatan			
Balai Desa	2 buah	3 buah	3 buah
Balai Adat	3 buah	1 buah	1 buah
Gotong royong	3 buah	3 buah	3 buah
Kelompok tani	ada	ada	ada
VIII. Jasa			
Tukang	86 orang	30 orang	100 orang
Pedagang	86 orang	17 orang	50 orang
Pegawai	86 orang	42 orang	75 orang
Dukun Kampung	4 orang	3 orang	3 orang

**IX. Sarana lain dan
Kepemudaan**

Pasar umum	1 buah	1 buah	1 buah
Kios atau warung	15 buah	21 buah	50 buah
Gudang	—	2 buah	—
Pramuka	ada	ada	—
Kesenian	ada	—	—
Olahraga	ada	ada	ada

Hasil pembangunan yang telah diperoleh secara berganda telah mendorong peningkatan pembangunan berikutnya di semua sektor kehidupan. Implikasinya adalah semakin meningkatnya taraf hidup masyarakat daerah setempat, tidak saja di bidang ekonomi atau fisik, tetapi juga terhadap aspek kehidupan mental spiritual. Keadaan ini juga memberi pengaruh yang positif dan nyata, ke bidang pemerintahan di pedesaan.

BAB IV

PENGARUH PELITA DI DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

Pemerintahan nagari di Sumatera Barat telah tumbuh sejak berabad-abad yang lalu dan merupakan suatu kesatuan masyarakat yang riil, utuh, mantap, dan berjalan secara lancar dan efektif. Nagari sebagai suatu kesatuan otonom dapat mengurus diri sendiri dan mengatasi permasalahan berdasarkan kepada hukum adat.

Pepatah adat menyatakan bahwa adat *salingkuang* nagari, pusako salingkuang kaum artinya adalah nagari atau desa berhak mengatur dirinya sendiri. Struktur pemerintahan nagari ditentukan berdasarkan status dan fungsi penghulu atau ninik mamak dalam masyarakat nagari, dan disesuaikan dengan ketentuan hukum adat. Menurut sistem adat Bodi Caniago, pemerintahan nagari terdiri dari Penghulu Andiko yang duduk sama rendah dan tegak sama tinggi dalam pengelolaan pemerintahan nagari, sedangkan menurut sistem adat Koto Piliang, struktur pemerintahan nagari terdiri dari seorang Penghulu Pucuk yang memimpin Penghulu Andiko dalam melaksanakan pemerintahan nagari.

Sejak kemerdekaan pemerintahan nagari masih tetap berkembang dengan mengalami beberapa perubahan dan penyempurnaan, sampai masa Pelita. Masalah yang akan disorot adalah menyangkut struktur pemerintahan, cara pemilihan aparat pemerintahan, kedudukan, dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah dan keadaan organisasi, politik dan non politik.

A. STRUKTUR PEMERINTAHAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1979 mengatur struktur Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa serta mengatur struktur pemerintahan kelurahan yang terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan. Struktur pemerintahan yang diatur dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 155/GSB/1974 relevan untuk dijadikan ukuran dalam menentukan pengaruh Pelita di bidang pemerintahan desa. Surat Keputusan Gubernur Nomor 015/GSB/1968 yang mengatur tentang pokok Pemerintahan Nagari dan berlaku sejak pra Pelita sampai dengan Pelita I hanya dijadikan sebagai bahan perbandingan.

Menurut SK Gubernur Nomor 155/GSB/1974, Struktur Pemerintahan Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Kerapatan Nagari. Dibandingkan dengan SK Gubernur Nomor 015/GSB/1968 yang menetapkan struktur pemerintahan nagari yang terdiri dari Wali Nagari, Dewan Perwakilan Nagari, dan Kerapatan Nagari, jelaslah terdapat perbedaan yang menonjol. Dalam SK Gubernur Nomor 155/GSB/1974 Kerapatan Nagari tidak saja berfungsi sebagai Lembaga Peradilan dan Penasehat Wali Nagari tetapi juga sebagai Badan Legislatif, sedangkan dalam SK Gubernur Nomor 015/GSB/1968 Kerapatan Nagari ini adalah merupakan Peradilan Agama dan Adat serta penasehat Wali Nagari dan Pemerintahan Nagari hanya terdiri dari Wali Nagari dan Dewan Perwakilan Nagari.

Peraturan Daerah Nomor 2/Desa/GSB/Prt-1963 yang menetapkan alat pemerintahan nagari terdiri dari Kepala Nagari, Badan Musyawarah Nagari, Musyawarah Gabungan, Pamong Nagari, Panitera Nagari, dan Pegawai Nagari maka jelas SK Gubernur Nomor 155/GSB/1974 yang lebih sederhana struktur pemerintahannya jauh lebih baik dari Peraturan Daerah Nomor 2/Desa/GSB/Prt-1963. Struktur Pemerintahan Nagari ini dipengaruhi oleh situasi dan kondisi politik dan pemerintahan pada waktu itu yang didasarkan kepada MANIPOL DAN USDEK. Struktur tersebut kurang mendapat dukungan dari masyarakat sehingga tidak mempunyai pengaruh dan wibawa terhadap anggota masyarakat.

SK Gubernur Nomor 155/GSB/1974 mendapat dukungan masyarakat tidak saja karena Wali Nagari dipilih langsung oleh rakyat tetapi anggota Kerapatan Nagari pun terdiri dari wakil masyarakat dari perutusan suku, Ulama, dan Cerdik Pandai yang merupakan pemimpin masyarakat yang berakar kepada rakyat. Keanggotaan Kerapatan Nagari ini terdiri dari Kepala Kampung atau orang yang telah serasi dan menghayati aspirasi masyarakat daerahnya.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 penyusunannya antara lain didasarkan kepada ketentuan adat istiadat yang masih berlaku di daerah Sumatera Barat guna dapat menggerakkan masyarakat dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa secara efektif dan efisien. Struktur pemerintahan ini menunjang pembangunan perekonomian masyarakat, sosial budaya, dan pendidikan di daerah pedesaan. Struktur pemerintahan dalam

Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian sasaran yang telah ditentukan dalam Pembangunan Lima Tahun di daerah ini.

B. CARA PEMILIHAN APARAT PEMERINTAHAN DESA

Sejak berlakunya Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat Nomor 015/GSB/1968 dan SK Gubernur Nomor 155/GSB/1974 apalagi dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1979 pemilihan Wali Nagari atau Kepala Nagari dilakukan oleh rakyat secara langsung, umum bebas, dan rahasia, sedangkan pada periode sebelumnya atau tegasnya pada masa berlakunya Peraturan Daerah No. 2/Desa/GSB/Prt-1963, Kepala Nagari diangkat oleh kepala Daerah Tingkat I di antara calon yang diajukan oleh Badan Musyawarah Nagari. Badan Musyawarah Nagari tidak dibentuk berdasarkan pemilihan langsung oleh rakyat tetapi merupakan perwakilan dari sepuluh golongan masyarakat nagari yang sebagian besar bukan merupakan golongan yang benar-benar nyata dalam masyarakat malahan lebih bersifat buatan seperti Golongan Front Nasional, Golongan Buruh, Golongan Koperasi Desa, dan golongan lainnya.

Menurut SK Gubernur No. 015/GSB/1968, Wali Nagari dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari dibentuk berdasarkan pemilihan yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Kerapatan Nagari walaupun keanggotaannya tidak berdasarkan pemilihan tetapi merupakan perwakilan dari kelompok masyarakat yang benar-benar ada seperti Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai. Lembaga ini merupakan badan permusyawaratan dari pemuka masyarakat.

Dalam SK Gubernur No. 155/GSB/1974 diatur keanggotaan Kerapatan Nagari tidak saja terdiri dari perutusan suku atau Ninik Mamak, Ulama dan Cendekiawan juga termasuk di dalamnya para Kepala Kampung. Dalam Undang-undang No. 5 tahun 1979 keanggotaan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) juga terdiri dari Kepala Dusun, Pimpinan Lembaga Kemasyarakatan, dan Pemuka Masyarakat di Nagari yang bersangkutan.

Cara pemilihan aparat pemerintahan nagari selain dipilih secara langsung, bebas dan rahasia oleh warga masyarakat nagari bersangkutan para calon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu.

Peraturan daerah No. 2/Desa/GSB/Prt-1963 banyak dipengaruhi oleh politik yang berlaku saat itu seperti menyetujui USDEK dan MANI-POL sedangkan peraturan setelah itu disesuaikan dengan semangat Orde Baru dalam menunjang dan mensukseskan Pelita guna meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat bangsa Indonesia.

Persyaratan seseorang dapat diangkat menjadi Wali Nagari atau Kepala Nagari pada zaman Orde Baru atau masa Pelita ialah latar belakang pendidikan adalah berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan dan berpengalaman yang sederajat dengan itu. Malah menurut SK Gubernur No. 155/GSB/1974 seorang calon Kepala Nagari harus pula mempunyai pengalaman dalam memimpin masyarakat dan mempunyai rencana serta program tentang pembangunan nagari.

Pada zaman pemerintah Hindia Belanda dalam rangka melaksanakan politik kolonialnya mereka telah membiarkan struktur pemerintahan nagari sebagaimana adanya menurut adat tetapi menempatkannya di dalam struktur pemerintahan kolonial sehingga mudah dikendalikan. Penghulu atau Ninik Mamak yang diangkat menjadi Kepala Nagari tidak lagi berfungsi sebagai pemberi nasehat, petunjuk dan bimbingan kepada anak kemenakannya atau masyarakat nagari bersangkutan tetapi telah berubah menjadi penguasa pemerintah.

Dalam zaman Pelita aparat pemerintahan nagari yang dipilih oleh rakyat dan merupakan perwakilan anak nagari di lembaga nagari, merupakan kunci bagi kelancaran dan berhasilnya program Pelita di nagari itu. Setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan atau di daerah pedesaan telah mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari semua lapisan dan golongan masyarakat serta bersedia berkorban menurut kemampuan yang dimiliki.

Keberhasilan suatu program Pelita lebih mendorong pelaksanaan program Pelita selanjutnya. Khusus di bidang pendidikan baik formal maupun non formal telah mencerdaskan masyarakat. Sistem demokrasi dalam cara pemilihan aparat pemerintahan nagari lebih mendorong masyarakat untuk bekerja sungguh-sungguh dan mengambil peranan dalam segala sektor pembangunan terutama dari kalangan generasi muda.

C. KEDUDUKAN DAN PERANAN PEMIMPIN MASYARAKAT NON PEMERINTAH

Sesuai dengan semangat Orde Baru yang mendasarkan tatanan kehidupan Bangsa dan Negara diletakkan atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta keinginan untuk mensukseskan Pembangunan Lima Tahun yang telah dirancang, maka kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah kembali diberi tempat dan ditingkatkan peranannya dalam pemerintahan nagari. Sejak dilaksanakannya SK Gubernur No. 015/GSB/1968 dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 pemuka masyarakat seperti Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai telah berperan kembali. Sebagai implikasi dari keadaan ini maka pemerintahan nagari benar-benar telah berakar kepada struktur masyarakat dan telah dipegang oleh pemimpin yang berpengaruh dalam masyarakat.

Meningkatnya kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah disebabkan struktur pemerintahan yang berlaku di mana menurut SK Gubernur No. 015/GSB/1968 dan SK Gubernur No. 155/GSB/1974 Kerapatan Nagari adalah merupakan salah satu unsur dari struktur pemerintahan nagari sejak awal Pelita sampai dengan berlakunya Undang-undang No. 5 tahun 1979. Dalam lembaga Kerapatan Nagari pemimpin masyarakat non pemerintah turut menentukan roda pemerintahan nagari karena badan ini merupakan lembaga permusyawaratan dari perutusan suku, Ulama, Cendekiawan dan Kepala Kampung, menurut SK Gubernur No. 155/GSB/1974. Sedangkan menurut SK Gubernur No. 015/GSB/1968 Kerapatan Nagari ini merupakan lembaga peradilan dan penasehat.

Dibandingkan dengan peraturan tentang pemerintahan nagari sebelumnya seperti SK Gubernur KDH Sumatera Barat No. 2/Desa/GSB/Prt-1963 pemimpin masyarakat non pemerintah ini tidak mendapat tempat dalam pemerintahan nagari. Memang terdapat utusan atau wakil golongan dalam Badan Musyawarah Nagari sebagai salah satu unsur dalam struktur pemerintahan nagari tetapi penggolongan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Penentuan golongan dipengaruhi oleh kepentingan politik Orde Lama. Penggolongan tersebut sebagian bersifat asing dan terasa sengaja diciptakan untuk tujuan-tujuan tertentu.

Dihubungkan dengan pengaruhnya terhadap Pelita di daerah, kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah telah semakin meningkat dan nyata-nyata berfungsi dalam masyarakat, untuk mendorong setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah.

"Tali tiga sepilin," "tungku tiga sajarangan" yang merupakan pelambang kerja sama yang erat dan unsur yang mutlak menentukan keberhasilan pemerintah di daerah Sumatera Barat sejak zaman dahulunya, pada masa Orde Baru atau Pelita telah berfungsi kembali. Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai telah diikuti dalam roda pemerintahan nagari.

Hasil yang diperoleh selama Pelita di samping bantuan fasilitas dari pemerintah dan keuletan aparat pemerintah sendiri yang tak kalah pentingnya adalah peran serta pemimpin masyarakat non pemerintah dengan semua masyarakat pendukungnya. Setiap bantuan desa atau program pembangunan yang diberikan dan dilaksanakan pemerintah di daerah pedesaan selalu mendapat dukungan yang aktif dan positif dari semua lapisan masyarakat di bawah koordinasi pemimpin masyarakat non pemerintah baik selaku Ninik Mamak, Alim Ulama, maupun sebagai pemimpin yang berasal dari golongan Cerdik Pandai.

D. ORGANISASI POLITIK DAN NON POLITIK

1. Organisasi Politik

Semenjak disederhanakannya jumlah partai politik menjelang Pemilihan Umum tahun 1971, di samping Golongan Karya, Partai Politik Parmusi, NU dan Perti kelihatan lebih menonjol hidup di daerah pedesaan Sumatera Barat. Partai Politik lainnya seperti PSII, IPKI, PNI, MURBA dan PARKINDO serta KATOLIK ditemui pada daerah tertentu di propinsi ini dan jumlah pendukungnya kecil.

Setelah Pemilihan Umum tahun 1977 yang didahului dengan penyederhanaan jumlah partai politik dan Golongan Karya menjadi 3 (tiga) partai dan golongan, organisasi politik yang lebih menonjol adalah Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan, sedangkan Partai Demokrasi Indonesia tidak merata tersebar di seluruh daerah Sumatera Barat.

Seiring dengan penyederhanaan jumlah partai politik dan Golongan Karya dalam masa pelita kelihatannya sebagian besar masyarakat semakin rasional. Maksudnya adalah masyarakat di daerah pedesaan kelihatan ordentasinya mengarah kepada partai dan golongan yang mempunyai program nyata dalam mencapai tingkat kemakmuran dan kesejahteraan secara adil dan merata. Kenyataan menunjukkan baik pada Pemilihan Umum tahun 1971 maupun pada Pemilihan Umum tahun 1977, Golongan Karya yang programe oriented jauh lebih banyak jumlah pemilihnya dibandingkan dengan kontestan lain.

Pada zaman Pelita masyarakat benar-benar telah berorientasi kepada keberhasilan yang nyata guna meningkatkan kesejahteraan hidup melalui pencapaian sasaran pembangunan di semua sektor baik fisik maupun mental. Perubahan orientasi sebagian besar masyarakat, menentukan keberhasilan program Pelita yang dilaksanakan di daerah. Pertentangan politik yang tajam antar golongan tidak kelihatan secara menonjol lagi sehingga kestabilan politik yang dirasakan di daerah-daerah pedesaan telah pula merupakan prasyarat untuk *take off* dalam pembangunan.

2. Organisasi Non Politik

Dibandingkan dengan keadaan sebelum Pelita, semakin meningkat jumlah organisasi non politik yang ditemui di daerah pedesaan. Hampir di semua sektor kehidupan baik sosial, ekonomi maupun budaya semakin meningkat anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam organisasi tertentu. Semakin meningkat jumlah anggota masyarakat terutama generasi muda yang ikut aktif dalam perkumpulan olahraga, kesenian, koperasi dan organisasi kewanitaan. Umumnya organisasi non politik ini berkembang sesuai dengan keadaan lingkungan sosial budaya masyarakat setempat.

Selain dari meningkatnya jumlah atau jenis organisasi dan banyaknya anggota masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam organisasi non politik ini selama Pelita juga terlihat meningkatnya mutu berorganisasi di kalangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan semakin lancarnya mekanisme kerja dari organisasi bersangkutan dan semakin membaiknya kegiatan administrasi sebagian besar organisasi tersebut. Keadaan ini dipengaruhi dan mempunyai sangkut paut dengan keberhasilan program pendidikan masyarakat baik

formal maupun non formal. Di samping itu juga akibat pengaruh berhasilnya penerangan yang diberikan kepada masyarakat terutama di daerah pedesaan.

Semakin meningkatnya mutu organisasi politik dan non politik di daerah pedesaan menunjang kelancaran pencapaian sasaran Pelita yang telah ditargetkan, sehingga dengan demikian mempunyai implikasi yang positif pula di bidang pemerintahan desa di propinsi ini.

BAB V KESIMPULAN

A. RANGKUMAN ISI

Dalam GBHN sudah dirumuskan bahwa "perhatian sebesar-besarnya perlu diberikan kepada peningkatan pembangunan pedesaan terutama melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung maupun yang tidak langsung diperuntukkan bagi pembangunan pedesaan seperti INPRES bantuan desa dan lain-lain."

Sehubungan dengan itu sejak tahun 1969 telah dilaksanakan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) yang sampai saat ini telah memasuki tahap yang ketiga. Sebagai implikasi dari kegiatan ini telah menimbulkan pelbagai akibat terhadap kehidupan masyarakat termasuk masyarakat di daerah pedesaan. Akibat tersebut juga menyangkut perkembangan pemerintahan desa, karena adanya pelbagai peraturan yang bertujuan untuk lebih menyempurnakan dan lebih mendayagunakan pemerintahan desa.

Pengumpulan bahan kesejarahan diharapkan berguna untuk penulisan sejarah dan dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan kebijaksanaan oleh pemerintah. Untuk itu maka di daerah Sumatera Barat dilakukan serangkaian kegiatan penelitian dengan melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi aspek yang relevan.

Lokasi penelitian dipilih 9 buah nagari yang terletak pada tiga dari 14 Kabupaten dan Kotamadya yang ada di daerah ini yaitu Kabupaten Pasaman, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten 50 kota. Masing-masing Kabupaten dipilih 3 nagari yang representatif untuk mengungkapkan sejarah pengaruh Pelita dengan seluruh implikasinya di daerah ini. Nagari tersebut adalah : Desa Swasembada Ujung Gading, Desa Swakarya Sungai Aur dan Desa Swadaya Muara Kiawai di Kabupaten Pasaman, Desa Swakarya Balai Tengah, Desa Swasembada Tepi Selo dan Desa Swadaya Tanjung Bonai di Kabupaten Tanah Datar serta Desa Swasembada Koto Baru Simalanggang, Desa Swadaya Koto Tengah Simalanggang dan Desa Swakarya Taeh Baruh di Kabupaten 50 Kota.

Latar belakang kehidupan masyarakat pada semua nagari yang diteliti adalah sama, sebagian besar anggota masyarakat adalah ber-

tani. Di samping itu penduduk hampir semuanya menganut Agama Islam dan tata pergaulan juga didasarkan atas norma Adat Minangkabau. Selain dari pada itu struktur dan jumlah anggota keluarga hampir bersamaan yaitu sekitar 5 – 6 orang untuk satu Kepala Keluarga.

Perbedaan yang nampak di antara nagari ini adalah di Kabupaten 50 Kota rata-rata kepadatan penduduknya ($405 - 447$ jiwa/ km^2) jauh melebihi rata-rata kepadatan penduduk Propinsi Sumatera Barat (± 70 jiwa/ km^2) pada masa sebelum Pelita dan di Kabupaten Tanah Datar rata-rata kepadatan penduduk di nagari bersangkutan bervariasi yaitu antara $79 - 386$ jiwa/ km^2 , sedangkan di Kabupaten Pasaman ketiga sasaran ini rata-rata kepadatan penduduknya hanya antara $13 - 31$ jiwa/ km^2 , atau jauh di bawah rata-rata Sumatera Barat.

Perbedaan lainnya dari ketiga lokasi penelitian pada masing-masing kabupaten adalah dalam hal kelancaran komunikasi dan transportasi. Nagari yang diteliti di Kabupaten 50 Kota sistem komunikasi dan transportasinya lancar, sedangkan nagari yang diteliti di Kabupaten Pasaman sukar sarana perhubungan dan komunikasinya. Adapun di Kabupaten Tanah Datar, nagari bersangkutan fasilitas komunikasi dan transportasinya cukup memadai.

Di bidang struktur pemerintahan pada seluruh nagari yang diteliti sama halnya dengan nagari lainnya di Sumatera Barat memedomani peraturan perundang-undangan Pemerintahan nagari yang sama sumbernya. Hanya saja jumlah anggota Lembaga-lembaga Musyawarah nagari berbeda disebabkan berbedanya pada jumlah penduduk nagari bersangkutan yang menjadi ukuran jumlah anggota perwakilan yang ada. Di samping itu unsur-unsur Kepemimpinan Masyarakat Non Pemerintah adalah sama jenisnya yaitu ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai yang merupakan "tali tiga sepilin" sebagai lambang kesepakatan masyarakat Minangkabau.

Dalam pelaksanaan Pelita di bidang pemerintahan ditemui kenyataan tidak terdapat hambatan atau masalah sebab aturan perundang-undangan yang berlaku semakin lama semakin dipatuhi oleh masyarakat, karena sesuai dengan adat, kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di kalangan masyarakat sejak zaman lampau. Pemimpin masyarakat non pemerintah sangat berperan dan ikut am-

bil bagian dalam mensukseskan pelaksanaan Pelita di daerah bersangkutan tidak saja di bidang pemerintahan tetapi juga di bidang pembangunan lain baik ekonomi maupun mental spiritual.

Hasil yang dicapai selama Pelita sangat berarti di segala bidang. Perumahan rakyat telah berubah corak dari beratapalang dan berinding bambu menjadi rumah papan dan batu yang baik sesuai dengan kondisi dan ekologi daerah. Jalan raya yang sebelumnya kurang memadai saat ini telah dikeraskan dan ada di antaranya dibangun baru sehingga memudahkan komunikasi antar daerah dan antar pasar.

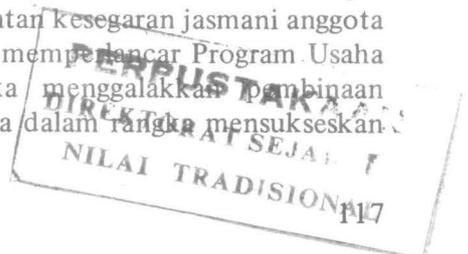
Partisipasi anggota masyarakat umur sekolah di dalam pendidikan telah semakin meningkat dengan nyata berkat pembangunan dan perluasan fasilitas pendidikan baik negeri maupun swasta. Di bidang non formal, keolahragaan, pembinaan generasi muda dan pengembangan kesenian serta peningkatan pemahaman anggota masyarakat terhadap sejarah bangsa dan pemeliharaan warisan budaya bangsa juga meningkat.

Di bidang politik masyarakat telah semakin mantap dalam pemahaman dan pentrapan demokrasi Pancasila serta meningkatnya perilaku kehidupan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan perjuangan bangsa. Akibat pengaruh dan pembaharuan dan modernisasi, masyarakat semakin berorientasi kepada pembangunan sehingga rintangan mental terhadap pembangunan jauh berkurang di kalangan masyarakat.

B. POKOK-POKOK MASALAH

1. Kehidupan masyarakat di desa yang diteliti di daerah Sumatera Barat pada masa sebelum pelita sebagian besar masih menyedihkan baik fisik maupun spiritual.
2. Kurangnya mata pencaharian atau sangat terikatnya masyarakat pada bidang pertanian sebagai sumber kehidupan merupakan faktor penyebab sukarnya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Rendahnya pendapatan masyarakat menyulitkan membangun proyek yang bersifat "*Social overhead Capital*" sehingga syarat mutlak pembangunan ini merupakan salah satu hambatan untuk meningkatkan lajunya pembangunan di daerah pedesaan.

4. Aturan perundang-undangan pemerintahan desa yang tidak dilandasi dengan jwa dan adat kebiasaan masyarakat yang berlaku di daerah pedesaan sukar untuk diterapkan dan implikasinya menimbulkan kepincangan terhadap roda pemerintahan.
5. Peraturan perundang-undangan pemerintahan desa yang telah semakin disempurnakan dan disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat, selama Pelita berlangsung telah menimbulkan dampak yang positif terhadap kehidupan demokrasi di daerah pedesaan dan mendapat dukungan serta partisipasi aktif anggota masyarakat dalam peneterapannya guna mencapai sasaran di semua sektor kehidupan.
6. Secara umum hasil pembangunan yang telah dicapai selama Pelita baik fisik maupun mental telah meningkatkan taraf hidup dan ikut menambah lapangan kerja masyarakat daerah pedesaan.
7. Meningkatnya taraf hidup pedesaan tidak seluruhnya ditentukan oleh sektor perhubungan dan transportasi tetapi juga oleh tersedianya potensi alam dan keterampilan yang dimiliki oleh anggota masyarakat dalam memanfaatkan alam untuk kehidupannya.
8. Penyebaran dan pemerataan pendidikan terutama pada tingkat pendidikan dasar melalui proyek Inpres telah menunjukkan hasil yang memuaskan di mana angka partisipasi atau *Net Enrolment Ratio* Sekolah Dasar telah menanjak secara drastis di desa yang diteliti khususnya atau di pedesaan Sumatera Barat pada umumnya.
9. Pengembangan yang intensif dan berencana di bidang pendidikan menengah telah menimbulkan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota masyarakat terutama generasi muda dan jumlahnya pun telah meningkat dibanding dari masa sebelum Pelita.
10. Penyebaran dan pemerataan lembaga kesehatan ke daerah pedesaan telah mendorong peningkatan kesehatan jasmani anggota masyarakat berobat serta sangat banyak memunculkan Program Usaha Kesenian Sekolah dalam rangka menggalakkan pembinaan kesehatan lingkungan. Begitu juga dalam rangka mensukseskan Program Keluarga Berencana.



11. Program Listrik Masuk Desa bermanfaat bagi anggota masyarakat tidak saja untuk penerangan tetapi terbukanya kesempatan kerja dalam berbagai kegiatan karena mudahnya memperoleh sumber energi. Di samping itu sangat membantu sektor penerangan masyarakat melalui pesawat Televisi yang semakin meningkat jumlah dan penyebarannya ke daerah pedesaan.
12. Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa masih belum diterapkan sepenuhnya karena dalam proses transisi. Sepanjang informasi yang diperoleh sangat disukai dan diterima oleh masyarakat daerah pedesaan.

C P E N U T U P

Laporan penelitian tentang Sejarah Pengaruh Pelita di Daerah terhadap Kehidupan Masyarakat Pedesaan telah dapat mengungkapkan proses pelaksanaan Pelita di daerah pedesaan Sumatera Barat terutama di bidang pemerintahan desa dan semua unsur yang menyangkut di dalamnya seperti struktur pemerintahan, cara pemilihan pimpinan dan aparat pemerintahan desa, kedudukan dan peranan pemimpin masyarakat non pemerintah dan keadaan organisasi politik dan non politik di daerah pedesaan.

Di samping itu juga menyangkut beberapa aspek kehidupan seperti keadaan perekonomian masyarakat pedesaan, keadaan sosial budaya masyarakat, keadaan alam dan lingkungan penduduk serta keadaan pendidikan baik pemerintah maupun swasta.

Penelitian ini belum menjangkau hal yang sangat detail dari setiap aspek kehidupan masyarakat tersebut karena untuk menggali data dan informasi yang sudah lama sukar, disebabkan kurangnya informan kunci yang diinginkan dan tidak terdapatnya suatu catatan yang relatif lengkap tentang kehidupan masyarakat daerah pedesaan tersebut.

Sebagai sumber sejarah laporan penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan walaupun dirasakan perlunya pendalaman penggalan informasi tentang aspek yang terkandung dalam penelitian ini. Karena Pelita masih akan berlangsung dan berlanjut pada masa yang akan datang, maka penelitian ini perlu diteruskan tidak saja untuk kepentingan kesejarahan tetapi juga sebagai bahan informasi dalam menyusun perencanaan dan perumusan kebijaksanaan baru dalam bidang pendidikan dan kebudayaan pada khususnya atau pembangunan pada umumnya.

**SALINAN
LAMPIRAN I A**

**DAFTAR : TURUNAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
TANGGAL 28 JULI 1975
NO. 010/SK/PMD/GSB/1975**

**T E N T A N G
KETENTUAN ALOKASI, PENYALURAN, PENGGUNAAN
DAN PERTANGGUNG JAWAB BANTUAN PEMBANGUNAN
DESA/BANTUAN RP. 300.000,— PER NAGARI
TAHUN 1975/1976 DALAM DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT**

**"GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT"**

Membaca : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Desa Tahun 1975/1976 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas No. 67 tahun 1975 dan masing-masing No. Kep.402/MK/I/4/1975 dan No. Kep. 031/Ket/4/1975 serta Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 15.3/Bang/1-1, di mana Daerah Tingkat I Sumatera Barat telah ditetapkan mendapat bantuan Pembangunan Desa sebesar Rp. 307.000.000,— (Tiga ratus tujuh juta rupiah).

Menimbang : Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan bantuan kepada Desa/Nagari tahun 1975/1976 dalam Daerah Tingkat I Sumatera Barat, perlu dikeluarkan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1957, yo Undang-undang No. 61 tahun 1958.
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri no. 42 tahun 1969 tentang Pola Dasar dan gerak operasional Pembangunan Masyarakat Desa.
4. Instruksi Presiden No. 16 tahun 1969, tentang pemberian bantuan kepada Desa.
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Ekuin/Ketua Bappenas No. 67 tahun 1975 No. Kep. 402/MK/I/4/75 No. Kep. 031/Ket/4/1975.

"M E M U T U S K A N"

Menetapkan : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, tentang Ketentuan Alokasi, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembangunan Desa/Nagari (Bantuan Rp. 300.000,- per Desa) dalam Daerah Tingkat I Sumatera Barat tahun 1975/1976.

Pertama : "PENENTUAN POKOK"

1. Bantuan Pembangunan Desa/Nagari (Rp. 300.000,- per Desa) dalam ketentuan ini selanjutnya disebut bantuan.
2. Yang dikatakan Desa/Nagari dalam ketentuan ini adalah Desa/Nagari sebagaimana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 155/GSB/1974, tanggal 24 Desember 1974.
3. Bantuan Rp. 300.000,- per Desa/Nagari diberikan guna meningkatkan usaha-usaha Swadaya Gotong Royong di Nagari yang diberikan langsung seluruhnya dalam bentuk uang tunai (Rp. 300.000,-) kepada Wali Nagari/Kepala Resort Administratif.

4. Penyerahan bantuan kepada Wali Nagari/Kepala Resort dilakukan sesudah rencana proyek yang diajukan oleh Camat setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
5. Penggunaan bantuan oleh Wali Nagari/Kepala Resort dilakukan sesudah rencana proyek yang diajukan oleh Camat, telah mendapat pengesahan dari Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
6. Penggunaan bantuan oleh Wali Nagari/Kepala Resort Administratif diarahkan kepada usaha-usaha yang bersifat produktif, guna membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan Pembangunan Nagari/Resort dalam rangka peningkatan dan pengembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan nagari, hal ini meliputi :
 - a. Prasarana Produksi Desa/Nagari;
 - b. Prasarana Perhubungan Desa/Nagari;
 - c. Prasarana Pemasaran Desa/Nagari;
 - d. Prasarana Sosial Desa/Nagari.
7. Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II serta Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Bantuan Desa, guna mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan, sedangkan pembinaan, pengawasan dan penyelenggaraan administrasi sepenuhnya dilakukan oleh Pejabat Sub. Direktorat PMD Kabupaten/Kotamadya dan Petugas PMD Kecamatan.
8. Dalam pelaksanaan penggunaan bantuan Pembangunan Desa aparat PMD Tingkat I, Tingkat II dan Petugas PMD Kecamatan untuk atas nama Gubernur, Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah dan Camat, melakukan bimbingan, pembinaan, pengawasan dan kontrol secara teratur yang kontinu.

9. Setiap Nagari/Resort menerima bantuan, pekerjaan pelaksanaan fisik tidak dibenarkan dilakukan pemborongan dan harus dikerjakan dengan usaha gotong royong.
10. Bantuan Rp. 300.000,— setiap Nagari/Resort pelaksanaannya dikaitkan dengan usaha-usaha Lembaga Sosial Desa (LSD) dalam rangka lebih mengintensifkan partisipasi masyarakat dalam koordinasi pembangunan di Desa.
11. Dalam pelaksanaan fisik proyek masing-masing Wali Nagari/Kepala Resort membentuk Panitia pelaksana pembangunan, guna mengintensifkan dan mempercepat kelancaran penyelesaian proyek, sedangkan pertanggung jawaban penggunaan bantuan langsung di tangan Wali Nagari.

Kedua : "KETENTUAN PENGGUNAAN"

1. Bantuan pada dasarnya digunakan untuk pengadaan bahan-bahan pembangunan yang sukar didapat dan atau tidak tersedia di Nagari untuk pembangunan proyek-proyek Prasarana Desa meliputi Prasarana Produksi Desa, Prasarana Perhubungan Desa, Prasarana Pemasaran Desa dan Prasarana Sosial Desa.
2. Pengadaan bahan-bahan pembangunan dilakukan oleh Nagari/Resort penerima Bantuan itu sendiri.
3. Untuk satuan-satuan wilayah ditingkatkan Nagari dalam kota, bantuan dapat digunakan untuk perbaikan dan pembangunan satuan-satuan wilayah dalam lingkungan kota dimaksud.
4. Dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa/Nagari/Resort tidak dibenarkan adanya pungutan MPO dan PPN.

5. Masing-masing Nagari/Resort diharuskan membuat rencana proyek penggunaan bantuan sesuai dengan urgensinya dalam rangka pelaksanaan Pola Pembangunan Masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat yang bersangkutan.
6. Dalam menggerakkan partisipasi masyarakat, maka setiap Wali Nagari/Kepala Resort mengadakan musyawarah Nagari dengan mengikutsertakan Lembaga Sosial Desa (LSD) untuk menentukan rencana pembangunan Nagari.
7. Sesuai dengan hasil musyawarah Nagari/Resort, Wali Nagari/Kepala Resort menyiapkan usul rencana proyek, kemudian disampaikan kepada Bupati/Wali Kotamadya rangkap 4 (empat) lewat Camat dalam rangkap 5 (lima) setelah ditandatangani oleh Wali Nagari/Resort dan Ketua I LSD.
8. Setelah usul rencana proyek tersebut pada point (7) ditanda-tangani oleh Wali Nagari/Resort dan Ketua I LSD harus dibubuhi dengan Cap Kepala Nagari/Resort dan Cap LSD.
9. Penggunaan bantuan Desa dapat digabungkan:
 - a. Apabila proyek-proyek yang akan dibangun lebih menguntungkan dan mendapat persetujuan dari Nagari-nagari yang bersangkutan.
 - b. Berada dalam koordinasi satu Wilayah Kecamatan.
Dalam hal ini rencana Proyek dilakukan oleh Camat yang bersangkutan sekaligus menanda tangani rencana proyek gabungan yang dimaksud.
10. Camat dan petugas Pembangunan Desa Kecamatan meneliti dan mengolah rencana proyek Nagari/Resort dimaksud dan selanjutnya menyampaikan dalam suatu daftar Rekapitulasi dengan melampirkan bahan-bahan rencana tersebut kepada Kepala Sub. Direktorat Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya.

11. Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II dengan dibantu oleh Kepala Sub. Direktorat Pembangunan Desa, meneliti, menilai dan mengolah rencana proyek-proyek yang diusulkan untuk ditetapkan oleh Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Kepala Direktorat Pembangunan Desa Tingkat I dalam bentuk daftar, serta daftar Rekapitulasinya rangkap 2 (dua).
12. Dalam meneliti, menilai rencana proyek dimaksud Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah, dibantu oleh Kepala Sub. Direktorat Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya, terlebih dahulu berkonsultasi dengan Unit Perencanaan Kabupaten/Kotamadya untuk memperoleh keserasian dalam bidang Program Pembangunan Nasional dan Regional.
13. Terhadap rencana-rencana Proyek Nagari/Resort yang sudah ditetapkan oleh Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah, dalam penggunaan bantuan ini tidak boleh menyimpang dari rencana-rencana proyek tersebut.
14. Pengeluaran dalam rangka penggunaan Bantuan Desa ini dilakukan langsung oleh Wali Nagari/Resort, kecuali proyek gabungan dilakukan oleh Camat.
15. Uang Bantuan Pembangunan Desa ini tidak diperkenankan untuk :
 - a. Membangun proyek-proyek di luar golongan/jenis proyek tersebut pada diktum pertama point 6 di atas.
 - b. Modal usaha/dipinjamkan untuk modal usaha.
 - c. Membeli alat-alat kantor atau biaya administrasi.
 - d. Proyek-proyek sarana.

Ketiga : "KETENTUAN PENYALURAN"

1. Kantor Bank Rakyat Indonesia Cabang setempat melakukan pembayaran langsung kepada Wali Nagari/Kepala Resort yang bersangkutan berdasarkan kepada rencana penggunaan bantuan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah dengan mengajukan daftar permintaan uang, yang terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Camat dan Kepala Sub. Direktorat Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya setempat.
2. Bagi proyek-proyek gabungan, Bank Rakyat Indonesia Cabang melakukan pembayaran langsung kepada Camat.
3. Bagi Resort/Jorong Administratif yang berada dalam Daerah Tingkat II Kotamadya Padang, Bukittinggi, Padang Panjang, Solok dan Payakumbuh masing-masing Kantor Bank Rakyat Indonesia setempat melakukan pembayaran kepada Kepala-kepala Resort/Jorong, berdasarkan rencana penggunaan bantuan yang sudah ditetapkan oleh Wali Kotamadya Kepala Daerah dengan mengajukan daftar permintaan uang, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Kepala Sub. Direktorat Pembangunan Desa Kotamadya.
4. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan, Sawahlunto-Sijunjung, Pasaman dan Kotamadya Sawahlunto, Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah yang bersangkutan melakukan pengambilan uang kepada Bank Rakyat Indonesia terdekat, kemudian 3 (tiga) hari sesudah pengambilan, Bupati/Wali Kotamadya menyerahkannya kepada Wali Nagari/Kepala Resort di hadapan Camat dan Pemuka-pemuka masyarakat, Nagari yang bersangkutan dengan dilengkapi bukti tanda terima bantuan dari Wali Nagari.

5. Setelah uang bantuan diterima oleh Wali Nagari dan Bank Rakyat Indonesia Cabang, pada hari itu juga Camat melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Sub. Direktorat Pembangunan Desa Tingkat I kecuali Kotamadya yang tidak ada Camatnya, Kepala Sub. Direktorat langsung melaporkan kepada Tingkat I.
6. Masing-masing Bupati/Wali Kotamadya kepala Daerah agar mengeluarkan Surat Keputusan besarnya Alokasi bantuan bagi tiap-tiap Kecamatan dalam wilayahnya.

Keempat : "KETENTUAN PERTANGGUNG JAWAB".

1. Setiap Nagari/Resort penerima bantuan paling lambat tanggal 10 tiap-tiap bulan diwajibkan menyampaikan laporan fisik/keuangan dan laporan pertanggung jawaban (SPJ) ke Kantor Sub. Direktorat Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya rangkap 3 (tiga) melalui Camat.
2. Kepala Sub. Direktorat Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya menguji laporan fisik/keuangan dan SPJ untuk Bupati Wali Kotamadya KDH dan menghimpun dalam suatu daftar beserta daftar Rekapitulasinya untuk disampaikan kepada Gubernur KDH melalui Kepala Direktorat Pembangunan Desa Tingkat I Sumatera Barat dalam rangkap 2 (dua).
3. Masing-masing Wali Nagari/Kepala-kepala Resort yang menerima bantuan dan Camat diwajibkan membuat berita acara penyelesaian proyek, laporan tutup tahun (tutup tahun anggaran yang verbal (laporan yang bersifat triwulan) dan laporan tutup tahun (tutup anggaran yang bersangkutan) yang disampaikan kepada Bupati/Wali Kotamadya melalui Kepala Sub. Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa dan selanjutnya Kepala Sub. Direktorat Pembangunan Desa harus

pula menyampaikannya pada Tingkat I beserta beberapa contoh dari masing-masing prasarana yang dibangun, laporan visuil (foto berukuran kartu pos).

4. Masing-masing laporan sehubungan Bantuan Desa ini, supaya disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1974.

Kelima : "KETENTUAN PENGALOKASIAN"

Pengalokasian dan penggunaan bantuan Pembangunan Desa/Nagari tahun 1975/1976 sejumlah Rp. 307.000.000,— (tiga ratus tujuh juta rupiah) digunakan untuk :

1. Bantuan langsung kepada Nagari/Resort 543 Nagari a'Rp. 300.000,— dengan jumlah Rp. 162.900.000 (seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan dalam surat Keputusan ini (daftar jumlah Nagari/Resort administratif masing-masing Kabupaten/Kotamadya terlampir).
2. Bantuan Nagari/Resort administratif yang sisanya sebesar Rp. 144.100.000,— (seratus empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) akan ditentukan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan serta kekhilafan dalam penetapan ini.

TEMBUSAN : Dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. **Menteri Dalam Negeri** (3 x)
 - a. Sekretaris Jenderal
 - b. Inspektur Jenderal
 - c. Direktur Jenderal Pembangunan Desa.

2. **Menteri Keuangan (3 x)**
 - a. Direktorat Jenderal Anggaran
 - b. Direktorat Jenderal Moneter
 - c. Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.
3. Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas (3 x)
4. Direksi Bank Rakyat Indonesia Jakarta (3 x)
5. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Daerah Sumatera Barat dan Riau (3 x)
6. Inspektorat Daerah Tingkat I Sumatera Barat (2 x)
7. Ketua Bappeda Tingkat I Sumatera Barat (2 x)
8. Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Sumatera Barat (2 x)
9. Kepala Sub. Direktorat Pembangunan Desa Tingkat II se Sumatera Barat (2 x)
10. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Sumatera Barat (2 x)

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. dto.

(MAHYUDI ALGAMAR)

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT,

ttd.

(HARUN ZAIN)

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 28 Juli 1975 No. 010/SK/PMD/GSB/1975.

Daftar : Jumlah Nagari/Resort Administratif tiap Kabupaten/Kotamadya dalam Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

No.	Kabupaten/ Kotamadya	Nagari/Resort Administratif yang dapat Bantuan Langsung	Jumlah (Rp.)	Keterangan
1.	Kab. Agam	73	21.900.000,-	Masing-masing nagari/ resort administratif 300.000,- (tiga ratus bu rupiah).
2.	Kab. 50 Kota	70	21.000.000,-	
3.	Kab. Pasaman	49	14.700.000,-	
4.	Kab. Tanah Datar	75	22.500.000,-	
5.	Kab. Solok	82	24.600.000,-	
6.	Kab. Sawahlunto/Sjj.	58	17.400.000,-	
7.	Kab. Padang Pariaman	65	19.500.000,-	
8.	Kab. Pesisir Selatan	36	10.800.000,-	
9.	Kodya Padang	13	3.900.000,-	
10.	Kodya Bukittinggi	5	1.500.000,-	
11.	Kodya Padang Panjang	4	1.200.000,-	
12.	Kodya Sawahlunto	5	1.500.000,-	
13.	Kodya Payakumbuh	7	2.100.000,-	
14.	Kodya Solok	1	300.000,-	
Jumlah		543	162.900.000,-	Seratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah.

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMATERA BARAT

Cap. dto
(MAYUDI ALGAMAR)

ttd.
(HARUN ZAIN)

SALINAN

P E N J E L A S A N

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat
No. 010/SK/GSB/75 tanggal 28 Juli 1975

Guna untuk keseragaman penggunaan bantuan Pembangunan Desa di Nagari-nagari dan menjaga jangan ada kesimpang siuran dalam pemakaian istilah prasarana yang dibangun perlu mempedomani sebagai berikut :

I. 1. Irigasi

- bendungan (dam) desa/bangunan pengambilan.
- waduk lapangan
- gorong-gorong
- bangunan pembagi
- saluran irigasi
- pompa air
- talang air
- siphon
- sekat ukur
- stordam (bangunan terjun)
- turap kayu
- bangunan irigasi lainnya.

2. a. Pengawetan tanah dan pengendalian anak air

- penghijauan
- terasering
- usaha-usaha pencegahan banjir (misalnya pembuatan tanggul)

b. Ketenagaan

- kelistrikan
- kincir air (untuk kelistrikan desa, menggerak penggilingan padi, penggerak penggilingan tebu.

II. Prasarana Perhubungan Desa, meliputi :

- jembatan
- jalan desa
- perahu, motor air
- pelabuhan desa/dermaga.

III. Prasarana Pemasaran Desa, meliputi :

1. Pasar umum : pasar hewan – pembuatan areal/lapangan.
2. Fasilitas pasar : los pasar – kios pasar – gudang pasar.
3. Fasilitas lain : lumbung desa – gudang desa.

IV. Prasarana Sosial Desa, meliputi :

- balai desa
- tempat ibadah (mesjid, surau/langgar/mushalla, gereja dan sebagainya)
- tempat permandian umum
- balai pengobatan
- air minum umum, tempat/sumbernya
- kakus/W.C. umum
- perluasan/penggerakan, pemugaran rumah sehat desa
- taman kanak-kanak
- pos hansip

Perlu ditegaskan dalam pelaksanaan bantuan pembangunan desa tahun 1975/1976, di samping mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 tahun 1974, juga diwajibkan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 1975.

Padang, 28 Juli 1975

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I
SUMATERA BARAT
KEPALA DIREKTORAT PMD

cap. dto.

(DRS. ASHARI)

SALINAN
LAMPIRAN IB

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT**

NO. : 43/SK/PMD/GSB/1976

TENTANG :

**KETENTUAN PELAKSANAAN PENGALOKASIAN INPRES
BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 1976/1977,
BAGI KABUPATEN/KOTAMADYA DATI II
DALAM WILAYAH PROPINSI DATI I SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa tahun 1976/1977, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas No. 58 tahun 1976, No. Kep.363/NK/I/3/1976, No. Kep.909/Ket/3/1976 tanggal 31 Maret 1976 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1976 tanggal 1 juni 1976, untuk Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat ditetapkan Inpres Bantuan Pembangunan Desa sebesar Rp. 667.650.000,—
 - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa sebesar dimaksud sub (a) di atas, perlu ditetapkan pengalokasiannya bagi tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
 - c. Bahwa alokasi Inpres Bantuan Pembangunan Desa dimaksud pada sub (b) di atas perlu diatur dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat.

- d. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa dalam Propinsi Daerah Tk. I Sumatera Barat perlu juga dikeluarkan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini (lihat lampiran II).

- Mengingat :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 1976 tentang Inpres Bantuan Pembangunan Desa.
 2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas No. 58 tahun 1976, No. Kep.363/MK/1/3/1976, No. Kep. 909/Ket/3/1976 tanggal 31 Maret 1976 tentang pedoman Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa tahun 1976/1977
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1976, tentang petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa tahun 1976/1977.
 4. Undang-undang No. 5 tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. 155/GBS/1974, tanggal 2 Desember 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri No. Pem.2/3/35 tanggal 8 September 1976, tentang penetapan jumlah nominatif Desa untuk tahun anggaran 1976/1977 dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. D.3729/S.Ren/PMD/XI-1976, tanggal 13 Nopember 1976 tentang plapond jumlah Jorong setingkat Desa untuk tiap-tiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Alokasi Inpres Bantuan Pembangunan Desa tahun anggaran 1976/1977 untuk Desa-desa dalam daerah Tk. I di Sumatera Barat disediakan sebesar Rp. 667.650.000,- (enam ratus enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri dari :
- a. Bantuan untuk tiap-tiap Jorong/Kampung setingkat Desa a'Rp. 300.000,- = 2172 x Rp. 300.000,- = Rp. 651.600.000,- (enam ratus lima puluh satu juta enamratus ribu rupiah).
 - b. Bantuan bagi pemenang Lomba desa Tingkat I dan Tingkat II se Sumatera Barat disediakan sebesar Rp. 16.050.000,- (enam belas juta lima puluh ribu rupiah) dan masing-masing pemenang diberikan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat No. 008/SK/PMD/GSB/1976, tanggal 27 April 1976.
 - c. Besar bantuan sebagaimana dimaksud point a dan b di atas untuk masing-masing Kabupaten/Kotamadya sesuai menurut lampiran (I) surat Keputusan ini juga.
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini yang bertalian dengan penyelenggaraan Inpres Bantuan Pembangunan Desa tahun 1976/1977, agar mempedomani ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 1976, tentang Bantuan Pembangunan Desa, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Ekuin/Ketua Bappe nas No. 58 tahun 1976, No. Kep. 363/MK/1/3/1976, No. Kep.909/Ket/3/1976 tanggal 31 Maret 1976, tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa tahun 1976/1977, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1976 tanggal 1 Juni 1976 tentang petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.

- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku untuk tahun Anggaran 1976/1977 mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang.
Pada tanggal 14 Desember 1976.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
Sumatera BARAT

Cap. dto

(HARUN ZAIN)

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Bupati/Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Sumatera Barat.
2. Pimpinan BRI Daerah Sumatera Barat dan Riau di Padang.
3. Pimpinan BRI Cabang se Sumatera Barat.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri (3 x)
 - a. Sekretaris Jenderal di Jakarta
 - b. Inspektur Jenderal di Jakarta
 - c. Direktur Jenderal Pembangunan Desa di Jakarta.
2. Menteri Keuangan (3 x) :
 - a. Direktur Jenderal Anggaran di Jakarta
 - b. Direktur Jenderal Moneter di Jakarta.
 - c. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
3. Menteri Negara Ekuin/Ketua Bappenas di Jakarta.
4. Direksi Bank Rakyat Indonesia di Jakarta.
5. Kepala Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
6. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tk. I Sumatera Barat, di Padang.
7. Kepala Direktorat Pembangunan Propinsi Daerah Tk. I Sumatera Barat, di Padang.
8. Inspektur Daerah Propinsi Daerah Tk. I Sumatera Barat di Padang.
9. Para Kepala Sub Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Sumatera Barat.
10. Para Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Sumatera Barat.
11. Para Wali Nagari/Resort/Kepala Kampung se Sumatera Barat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

No. : 43/SK/PMD/GSB/1976 TANGGAL 14 DESEMBER 1976

tentang

KETENTUAN PELAKSANAAN PENGALOKASIAN INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN
DESA TAHUN 1976/1977, BAGI KABUPATEN/KOTAMADYA DATI. II
DALAM WILAYAH PROPINSI DATI. I SUMATERA BARAT

No.	Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Kecamat- an	Jumlah Nomena- tif Desa (Nagari/ Resort)	Jumlah Desa dan Jumlah Bantuan yang Ditetapkan				Keterangan	
					Desa/ Kamp- ung (Jorong/ Korong yang di beri ban- tuan	Bantuan Rp. 300.000,- un- tuk jorong R.K.	Bantuan Keserasi- an (Rp.)	Bantuan khu- sus Desa Peme- nang Lomba Desa (Rp.)		Jumlah Bantu- an seluruhnya (Rp.) (Rp.)
1.	Kab. Ag a m	371.771	10	73	258	77.400.000,-	-	1.050.000,-	78.450.000,-	Untuk kepu- lauan Menta- wai, satu Na- gari diberi bantuan 10 Jorong/Kam- pung.
2.	Kab. 50 Kota	250.508	7	70	218	65.400.000,-	-	1.050.000,-	66.450.000,-	
3.	Kab. Pasaman	316.334	7	49	238	71.400.000,-	-	1.050.000,-	72.450.000,-	
4.	Kab. Tanah Datar	305.985	10	75	218	65.400.000,-	-	1.550.000,-	66.950.000,-	
5.	Kab. Solok	322.359	12	82	318	95.400.000,-	-	1.050.000,-	96.450.000,-	
6.	Kab. Sawahlun- to/Sjj.	180.098	9	58	179	53.700.000,-	-	1.500.000,-	55.200.000,-	
7.	Pd. Pariaman	611.328	15	65	368	110.400.000,-	-	1.050.000,-	111.450.000,-	
8.	Pss. Selatan	285.704	7	36	218	65.400.000,-	-	1.450.000,-	66.850.000,-	
9.	Kodya Padang	221.843	3	13	80	24.000.000,-	-	1.050.000,-	25.050.000,-	
10.	Kodya Bukittinggi	62.590	-	5	20	6.000.000,-	-	1.050.000,-	7.050.000,-	
11.	Kodya Padang	31.632	-	4	14	4.200.000,-	-	1.050.000,-	5.250.000,-	
12.	Kodya Sawah- lunto	12.729	-	5	12	3.600.000,-	-	1.050.000,-	4.650.000,-	
13.	Kodya Solok	27.172	-	1	13	3.900.000,-	-	1.050.000,-	4.950.000,-	
14.	Kodya Payakum- buh	71.003	-	7	18	5.400.000,-	-	1.050.000,-	6.450.000,-	
J u m l a h		3.071.056	80	543	21.72	651.600.000,-	-	16.050.000,-	667.650.000,-	

GUBERNUR KEPALA DAERAH I SUMATERA BARAT

Cap. dto.

(H A R U N Z A I N)

LAMPIRAN II :

PENJELASAN DARI SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT NO. 43/SK/PMD/GSB/1976 TANGGAL 14 DESEMBER 1976 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 1976/1977.

I. KETENTUAN UMUM

1. Inpres Bantuan Pembangunan Desa dialokasikan pada Jorong /Korong serta RK (selanjutnya kita sebut dengan istilah Desa/Kampung).
2. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II diberi wewenang untuk menetapkan Jorong/Korong serta RK setingkat Desa yang akan diberi Inpres Bantuan Pembangunan Desa dalam daerahnya tahun anggaran 1976/1977.
3. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II selanjutnya membuat surat keputusan pengalokasian Inpres Bantuan Pembangunan Desa, jumlah Jorong/Korong serta RK yang akan memperoleh bantuan untuk tiap-tiap Kecamatan dalam wilayahnya.
4. Bantuan Rp. 300.000,— diberikan pada Jorong/Korong serta RK dimaksud guna mendorong dan menggerakkan usaha-usaha gotong royong masyarakat desa yang diberikan langsung berupa uang tunai kepada Wali Nagari, Kepala Resort dan Kepala Kampung, yang digunakan untuk pengadaan bahan-bahan yang tidak tersedia di Desa dan diarahkan untuk prasarana :
 - Prasarana Produksi
 - Prasarana Perhubungan
 - Prasarana Pemasaran
 - Prasarana Sosial.
5. Bantuan Rp. 300.000,— tidak dibenarkan digunakan untuk:
 - a. Modal usaha, dipinjamkan atau didepositokan
 - b. Pembeli alat-alat kantor (biaya administrasi)
 - c. Diborongkan dalam pelaksanaannya
 - d. Pengeluaran untuk upah dalam pelaksanaan fisik proyek.

6. Bagi proyek-proyek yang sudah selesai fisik proyeknya, agar diberi papan nama dengan mencantumkan :
 - a. Inpres Bantuan Pembangunan Desa tahun 1976/1977
 - b. Jumlah bantuan Pemerintah Pusat
 - c. Jumlah bantuan Swadaya Masyarakat
 - d. Jumlah bantuan Pemerintah Daerah

II. KETENTUAN PERENCANAAN

1. Bahwa Bantuan Pembangunan Desa diserahkan pada Desa setelah usulan rencana Proyek disahkan oleh Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II dan usulan rencana tersebut tidak boleh dirobah lagi, kecuali ada persetujuan dari Kepala Daerah dengan membuat Berita Acara pengalihan proyek, yang disahkan oleh Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan dan disampaikan pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat cq. Direktorat PMD.
2. Bagi Jorong/Korong dan RK penerima Inpres Bantuan Pembangunan Desa, diwajibkan membuat rencana usulan Proyek, sementara LSD Jorong yang bersangkutan, belum dibentuk maka pengusulan rencana dilakukan oleh LSD Nagari/resort dan Kampung yang bersangkutan, kemudian diajukan pada Kerapatan Nagari (KN) untuk disetujui.
3. Apabila usulan rencana proyek sudah mendapat persetujuan dari KN, maka Wali Nagari, Kepala Resort dan Kepala Kampung beserta Ketua LSD menandatangani dan membubuhi cap stempel LSD. guna disampaikan kepada Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II, melalui Camat untuk disahkan.
4. Camat terlebih dahulu meneliti/mengolah usulan rencana proyek yang diajukan Wali Nagari, Kepala Resort dan Kepala Kampung dalam form (Ds/1), kemudian diteruskan pada Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah Tingkat II dalam Model (Ds/2), untuk mendapatkan pengesahan.
5. Sebelum disahkan usulan rencana proyek yang diusulkan Wali Nagari, Kepala Resort dan kepala Kampung melalui Camat, maka Bupati/Walikota-madya kepala Daerah Tk.II

- cq. Kepala Sub Direktorat PMD terlebih dahulu berkonsultasi dengan unit Perencanaan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, guna menjamin keserasian dengan Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional.
6. Penggunaan Inpres bantuan Khusus bagi Pemenang Perlombaan Desa baik Tingkat I maupun pemenang Tingkat II dilakukan atas dasar rencana usulan Proyek, disetujui oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah usulan Proyek, disetujui oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II cq. Kepala Sub Direktorat PMD guna disampaikan pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat c.q. Kepala Direktorat Pembangunan masyarakat Desa untuk disahkan.
 7. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II menyampaikan usulan rencana proyek yang telah disahkan dalam model form (Ds/3 dan Ds/3a) masing-masing rangkap 3 (tiga) kepada :
 - a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat c.q. Kepala Direktorat PMD.
 - b. Pimpinan BRI Daerah Sumatera Barat dan Riau serta BRI Cabang setempat.
 - c. Badan perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
 - d. Direktorat Pembangunan Kantor Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Barat.
 - e. Inspektur Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
 - f. Camat Kepala Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

III. KETENTUAN PENYALURAN

1. Kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang setempat melakukan pembayaran uang bantuan Rp. 300.000,— langsung pada Wali Nagari, Kepala Resort dan Kepala Kampung, berdasarkan kepada usulan rencana Proyek yang sudah disahkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dengan mengajukan daftar permintaan uang Bantuan Desa (model E), yang terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Camat dan Kepala Sub Direktorat PMD Kabupaten/Kotamadya a.n. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

2. Bantuan khusus pemenang Perlombaan Desa sebesar Rp. 16.050.000,- (enambelas juta limapuluh ribu rupiah), dipindahkan pada Rekening Direktorat PMD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, untuk diserahkan pada pemenang-pemenang Daerah Tingkat I maupun untuk Daerah Tingkat II, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.: 008/SK/PMD/GSB/1976 tanggal 27 April 1976.
3. Setelah Wali Nagari, Kepala Resort dan Kepala Kampung mengambil Inpres Bantuan Pembangunan Desa dari BRI Cabang, Camat diwajibkan membuat laporan pengeluaran setiap bulan pada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II cq. Kepala Sub Direktorat PMD dan seterusnya Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II menyampaikan laporan penyaluran uang ke Desa setiap bulannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat cq. Kepala Direktorat PMD dalam suatu daftar form (Ds/8), paling lambat tanggal 10 tiap bulan.
4. Camat, Wali Nagari, Kepala Resort dan Kepala Kampung yang menerima Inpres Bantuan Pembangunan Desa dalam daerahnya diwajibkan membuat dan memasukkannya ke dalam :
 - a. Buku Kas B.9.
 - b. Buku Kas Pembantu.
 - c. Membuat Buku Swadaya Masyarakat guna lebih memudahkan melakukan kontrol dalam pemeriksaan bagi yang berwenang.
5. Selambat-lambatnya 5 hari sesudah uang Inpres Bantuan Pembangunan Desa diterima Wali Nagari, Kepala Resort dan Kepala Kampung sebagai pimpinan Proyek, maka Kepala Jorong/Korong, Ketua RK dan anggota Seksi Pembangunan LSD, segera melaksanakan phisik proyek.
6. Setiap jenis phisik proyek dilaksanakan, pimpinan proyek diwajibkan membuat rencana kerja waktu pelaksanaan phisik proyek secara bertahap, sehingga proyek dapat selesai sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan dan rencana kerja ini agar disampaikan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah

Tingkat II cq. Kepala Sub Direktorat PMD jika ternyata dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka Kepala Daerah Tingkat II, dapat mengambil tindakan pengamanan.

IV. KETENTUAN PERTANGGUNGAN JAWAB.

1. Bupati/Walikota/cq. Kepala Sub Direktorat PMD dan Camat memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk-petunjuk kepala Wali Nagari, Kepala Resort, Kepala Kampung bawahannya dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program Inpres Bantuan Pembangunan Desa sesuai dengan Surat Keputusan ini dan pedoman Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 12 tahun 1976.
2. Bupati/Walikota/cq. Kepala Daerah Tingkat II cq. Kepala Sub Direktorat PMD dan Camat mengkoordinir serta membina secara langsung kegiatan-kegiatan dalam hal persiapan perencanaan dan pelaksanaan fisik proyek, sekaligus usaha-usaha Swadaya gotong royong masyarakat Nagari, Kampung bawahannya dengan menggerakkan LSD sebagai wadah partisipasi masyarakat.
3. Wali Nagari, Kepala Resort dan Kepala Kampung yang menerima bantuan Pembangunan Desa bertanggungjawab atas:
 - a. Kelancaran pelaksanaan fisik Proyek prasarana Desa dalam rangka Inpres Bantuan Pembangunan Desa serta menggerakkan usaha-usaha swadaya gotong royong masyarakat Desanya.
 - b. Mengadakan pengembangan dan pemeliharaan secara terus menerus terhadap proyek-proyek prasarana Desa yang telah dibangun dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desanya.
 - c. Menyampaikan laporan selambat-lambatnya tanggal 10 tiap-tiap bulan melalui Camat kepada Bupati/Walikota/cq. Kepala Daerah Tingkat II cq. Kepala Sub Direktorat PMD untuk diteruskan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat masing-masing rangkap 4 :

1. Laporan fisik, Keuangan dan S.P.J.
2. Laporan penyaluran uang bantuan oleh BRI ke Desa.
3. Laporan Verbal.
4. Laporan berkala (bulanan dan triwulan).
5. Laporan tutup tahun pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Desa diusahakan tanggal 31 Maret 1977.
6. Laporan Visual/Photo berukuran postcard dari masing-masing golongan prasarana.
7. Laporan berita acara penyelesaian fisik proyek.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT

cap. dto.

(HARUN ZAIN)

DAFTAR KEPUSATAKAAN

- Bappeda Tingkat I Sumatera Barat, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat 1974/75 – 1978/79*, Jilid II, Bappeda Tingkat I Sumatera Barat, Padang, 1974.
- Bappeda Tingkat I Sumatera Barat, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga Pemerintah Daerah Propinsi, Sumatera Barat 1979/80 – 1983/84*, Bappeda Tingkat I Sumatera Barat, Padang, 1979.
- Bappeda Tingkat I Sumatera Barat, *Rencana Pengembangan Wilayah Pembangunan B Propinsi Dati, I Sumatera Barat*, Jilid I, Bappeda Tingkat I Sumatera Barat, Padang, 1979.
- Bappeda dan Kantor Sensus/Statistik Tingkat I Sumatera Barat, *Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 1980*, Bappeda Tingkat I Sumatera Barat, Padang, 1981.
- Biro Pusat Statistik, *Penduduk Propinsi Sumatera Barat 1980*, Kantor Statistik Propinsi Sumatera Barat, Padang, 1981.
- Departemen P dan K RI, *Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga 1979/80 – 1983/84*, BP3K Departemen P dan K, Jakarta, 1980.
- Djojohadikusumo, Sumitro, *Indonesia dalam Perkembangan Dunia Kini dan Masa Datang*, LP3ES, Jakarta, 1975.
- Direktorat PMD Kantor Gubernur Propinsi Dati I Sumatera Barat, *Daftar Nagari Beserta Jorong, Jumlah Penduduk dan Luas Daerah Dalam Daerah Propinsi Sumatera Barat*, Direktorat PMD Propinsi Sumatera Barat, Padang, 1974.
- Direktorat PMD Kantor Gubernur Propinsi Dati I Sumatera Barat, *Daftar Monitoring, Tipologi dan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa Tahun 1979/1980*, Direktorat PMD Propinsi Sumatera Barat, Padang, 1981.
- Dt. Rangkayo Basa, Hamdan, Faisal, SH, dkk. *Sistim Kesatuan Hidup Setempat Daerah Sumatera Barat*, Proyek IDKD, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen P dan K RI, Padang, 1981.

- Kantor Bupati Dati. II 50 Kota, *Kumpulan Peraturan Daerah Kabupaten 50 Kota Beserta Beberapa Surat Keputusan Pelaksanaannya Tahun 1960 s/d 1978*, Kantor Bupati Dati. II 50 Kota, Payakumbuh, 1979.
- Kantor Bupati Dati. II 50 Kota, *Lembaran Daerah Kabupaten 50 Kota*, Kantor Bupati Dati II 50 Kota, Payakumbuh, 1979.
- Koentjoroningrat, Prof.Dr. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Penerbit PT Dian Rakyat, Jakarta, 1972.
- Kantor Bupati Dati II 50 Kota, *Lembaran Daerah Kabupaten 50 Kota*, Kantor Bupati Dati II 50 Kota, Payakumbuh, 1980.
- Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sumatera Barat, *Statistik Pendidikan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Sumatera Barat Tahun Ajaran 1981/1982*, Kantor Wilayah Dep P dan K Propinsi Sumatera Barat, Padang, 1982.
- Kepres No. 11 Tahun 1974, *Rencana Pembangunan Lima tahun Kedua 1974/1975 – 1978/1979*, Departemen Penerangan RI, Jakarta, 1974.
- Kruse, Rodenacker, A. Dr. Prof. dkk., *Rencana Pembangunan Untuk Pasaman Barat/Sumatera*, Dep. Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik, Direktorat Jenderal Cipta Karya – Direktorat Tata Kota dan Daerah, Bukittinggi, 1975.
- Lipton, Michael dan Moore, Mick, (Terjemahan Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial) *Metodologi. Studi Pedesaan di Negara-Negara Berkembang*, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, 1980.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Penerbit Buku Bermutu Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 No. 56, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa*, Penerbit C.V. Pantjuran Tudjuh, Jakarta.
- Nawi, Marnis, Drs. dkk, *Pola Pemukiman Penduduk Pedesaan Daerah Sumatera Barat*, Proyek IDKD, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen P dan K RI, Padang, 1981.

Naim, Mochtar, Dr. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1979.

Proppipda Sumatera Barat, *Laporan Statistik tentang Trend Pembangunan di Sumatera Barat Ditinjau dari Lingkungan Pendidikan*, Proyek Perencanaan Integral Pendidikan Daerah (Proppipda) Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat, Padang 1975.

Suryaningrat, Bayu, Drs. *Organisasi Pemerintahan Wilayah/Daerah*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1980.

TPPBP Pegawai Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Garis-garis Besar Haluan Negara*, Tim Pembinaan Penatar dan Bahan-bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, Jakarta.

P E T A
PROPINSI SUMATERA BARAT
Skala 1 : 780.000



Tidak diperdagangkan untuk umum